



UNIVERSITAS INDONESIA

**ALTERNATIF SOLUSI MANAJEMEN PENGAMANAN
MARKAS KEPOLISIAN OLEH PELAYANAN MARKAS (YANMA)
POLDA METRO JAYA**

TESIS

**MOHAMMAD IQBAL
NPM 0906599365**

**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ALTERNATIF SOLUSI MANAJEMEN PENGAMANAN
MARKAS KEPOLISIAN OLEH PELAYANAN MARKAS (YANMA)
POLDA METRO JAYA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**MOHAMMAD IQBAL
NPM 0906595365**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI
JAKARTA
JULI 2011**

ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

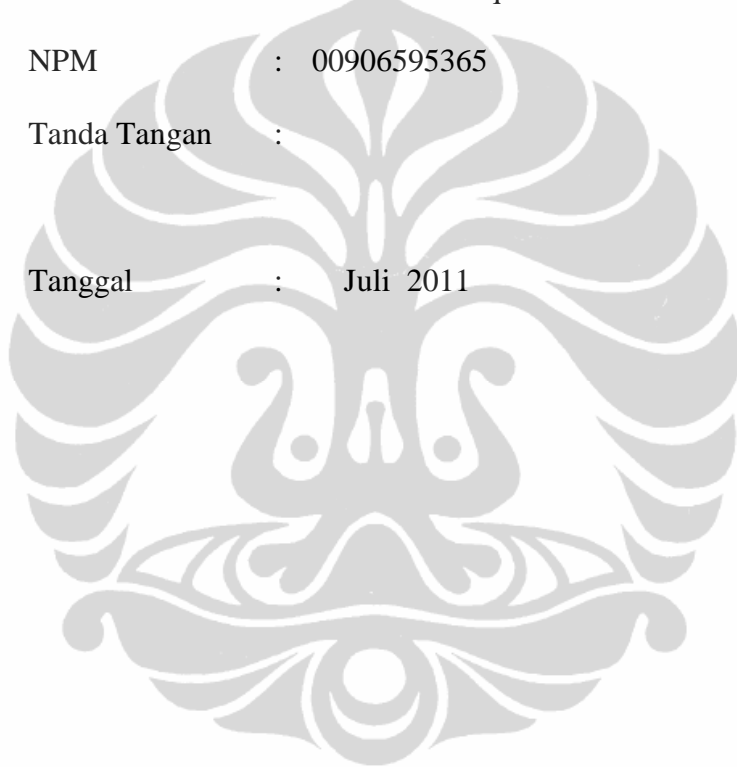
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Mohammad Iqbal

NPM : 00906595365

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : **MOHAMMAD IQBAL**
NPM : **0906595365**
Program Studi : **KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**
Judul Tesis : **ALTERNATIF SOLUSI MANAJEMEN
PENGAMANAN MARKAS KEPOLISIAN OLEH
PELAYANAN MARKAS (YANMA) POLDA
METRO JAYA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Drs. Ahwil Luthan, SH.MM.MBA**

Penguji : **Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi**

Penguji : **Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.MM.MBA**

Penguji : **Dra. Ida Ayu W. Soentono, M.Kom**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Tanggal : **Juli 2011**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT, karena atas segala limpahan kasih dan karunia-Nya maka penyusunan tesis ini berhasil diselesaikan tepat waktu. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam rangka mencapai gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Tesis ini saya tulis dengan judul Alternatif Solusi Manajemen Pengamanan Markas Kepolisian oleh Pelayanan Markas (YANMA) Polda Metro Jaya. Fokus masalah dalam tesis ini adalah Penyelenggaraan Manajemen Pengamanan yang dilaksanakan oleh Pelayanan Markas (YANMA) Polda Metro Jaya dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian di Polda Metro Jaya, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui dikriptis analitis untuk mengetahui penyelenggaraan manajemen pengamanan, kelemahan kelemahan pengamanan dalam penyelenggaraan manajemen pengamanan dan alternatif solusi untuk optimalisasi manajemen pengamanan di Polda Metro Jaya.

Hasil penelitian telah diseminarkan dan disajikan dalam bentuk tulisan tesis secara utuh yang berisi gambaran tentang fakta-fakta atau gejala-gejala empiris tentang Penyelenggaraan Manajemen Pengamanan Markas Kepolisian oleh Pelayanan Markas (YANMA) Polda Metro Jaya, yang telah dianalisa dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang relevan.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau masukan dalam Penyelenggaraan Manajemen Pengamanan Markas Kepolisian serta pengembangan ilmu kepolisian berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen pengamanan.

Penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bimbingan dan motivasi dari pembimbing saya Drs. Ahwil Luthan, SH, MM, MBA sekaligus juga beliau adalah pendahulu saya di SMA Negeri 1 Medan dan senior kami di AKABRI

Kepolisian, dimana di tengah-tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk menurunkan ilmunya dan meluangkan waktunya dalam setiap proses penelitian dan penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Prof. DR. Sarlito Wirawan Sarwono, Psi selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan seluruh dosen pengajar yang telah membimbing dan memberikan tambahan ilmu serta wawasan pengetahuan kepada saya, dan tak kalah pentingnya kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing Informal saya Kombes. Drs, M.Fadil Imran, Msi (Kandidat Doktor Kriminologi UI) , bu Romy yang dengan bimbingannya melengkapi khasanah pengetahuan saya dari sisi ilmu kriminologi. Rekan-rekan angkatan XIV reguler dan angkatan XIV khusus, Bang Ferry Kiwuk, Anang, Oscar, seluruh staf posko "Rumah Aspirasi" yang telah memberikan saya banyak aspirasi dalam penyelesaian tugas akhir ini. Serta rasa terima kasih saya juga tujukan kepada seluruh staf sekretariat KIK yang telah memberikan dukungan kepada saya selama menjadi mahasiswa sampai dengan selesainya penulisan tesis ini.

Tak lupa kami persembahkan juga rasa terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs Sutarman, dan Kepala Yanma Polda Metro Jaya AKBP. Agus Sudrajat beserta seluruh staf Yanma Polda Metro Jaya, serta para informan lainnya yang telah membantu proses pengumpulan data dan informasi selama penelitian di lapangan.

Di akhrit kata saya sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dan memberikan doa restunya sepanjang perjalann hidup saya. Dan juga rasa terima kasih saya yang setulus- tulusnya kepada isteri saya tercinta Dian Handayani serta kedua putri tersayang saya Shahnaz Khairunnisa Baldin dan Alya Humaira Baldin, dimana dengan ketabahan, kesabaran, dan pengertiannya mereka telah memberikan semangat dan dukungan moril kepada saya, meskipun selama proses perkuliahan mereka harus sering kehilangan waktu bersama saya diakhir minggu.

Akhirnya saya berharap semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan bapak/ibu/saudara semua, serta senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA kepada kita semua, amiin.

Jakarta, Juli 2011

Penulis



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
(Hasil Karya Perorangan)**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mohammad Iqbal
NPM : 0906595365
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non_Eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ALTERNATIF SOLUSI MANAJEMEN PENGAMANAN MARKAS
KEPOLISIAN OLEH PELAYANAN MARKAS (YANMA) POLDA METRO
JAYA**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalimedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juli 2011

Yang menyatakan

(MOHAMMAD IQBAL)

ABSTRAK

Nama : Mohammad Iqbal
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : Alternatif Solusi Manajemen Pengamanan Markas oleh Pelayanan Markas (Yanma) Polda Metro Jaya

Tesis ini tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan markas yang dilaksanakan oleh Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian di Polda Metro Jaya, Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melaksanakan manajemen pengamanan di Polda Metro Jaya untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian di Kepolisian Daerah Metro Jaya namun masih terjadi kerawanan berupa ancaman terhadap keamanan, dan ketertiban berupa terjadinya pencurian kendaraan di dalam markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, kasus penipuan dan banyaknya calo dalam pengurusan surat surat kendaraan bermotor, dan kasus unjuk rasa, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan manajemen pengamanan yang diterapkan oleh Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya, mengapa masih terdapat kelemahan pengamanan yang dilakukan oleh Pelayanan Markas (Yanma) terhadap Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya dan bagaimana alternatif solusi terhadap manajemen pengamanan di Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang akan dibahas menggunakan teori manajemen, konsep manajemen pengamanan, konsep organisasi, teori pencegahan kejahatan situasional, teori crime prevention through environmental design (CPTED) untuk membahas dan menganalisisnya. Dengan harapan dapat menggambarkan penyelenggaraan yang terjadi, mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan manajemen pengamanan dan memberikan masukan berupa alternatif solusi bagi perbaikan penyelenggaraan manajemen pengamanan di Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Kata Kunci : Alternatif Solusi Manajemen Pengamanan Markas Kepolisian

ABSTRACT

Name : Mohammad Iqbal
Study Program : Police Studies
Titel : Solution Alternative of Security Management for
Headquarters Security by the Headquarters Service
Division of Jakarta Metropolitan Police

The thesis talks about the implementation of security management of the headquarters conducted by the Headquarters Service Division of Jakarta Metropolitan Police Region. The division has implemented the security management of the headquarters of Jakarta Metropolitan Police Region in order to secure public order, security and the smoothness of the implementation of responsibilities and duties of its personnel around the headquarters. However, security disturbances still occur such as vehicle theft, fraud, matchmakers in extending vehicle registration papers, and demonstrations. These interest the author to examine how security management runs and why weaknesses still exist and what the solution alternatives are. The author employs management theories, security management concepts, organisation concepts, theory of situational crime prevention, theory of crime prevention through environmental design in order to examine and analyse the problems. It is expected that by examining and analyzing the problem, the author knows the obstacles and weaknesses of the implementation of security management in the headquarters of Jakarta Metropolitan Regional Police. It is also highly expected that author then can recommends solution alternatives in improving and revising the implementation of security management of the headquarters of Jakarta Metropolitan Regional Police.

Keywords: solution alternatives, security management, police headquarters

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan	
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Batasan Konsep	14
2.1.1 Konsep Manajemen.....	17
2.1.2 Konsep Organisasi.....	19
2.1.3 Konsep Manajemen Keamanan.....	22
2.1.4 Konsep Tentang Polisi	23
2.2.5 Konsep Tentang Kejadian, Insiden Keamanan dan Resiko.....	24
2.2 Tinjauan Literatur	
2.2.1 Penelitian Tentang Manajemen Keamanan Di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat Oleh Yuyun Yudhantara Tahun 2004.....	24
2.2.2 Penelitian Tentang Mnajemen Sekuriti Fisik di PT.Gudang Garam Tbk Kediri Oleh Marjoko Tahun 2006.....	25

2.2.3	Penelitian Manajemen Keamanan Kawasan Wisata Taman Impian Jaya Ancol pada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) oleh Trisaksono Puspo aji.....	26 27
2.3	Teori Teori	27
2.3.1	Teori Manajemen Dari Henry Fayol	28
2.3.1.1	Perencanaan (Planning).....	28
2.3.1.2	Pengorganisasian (Organizing).....	29
2.3.1.3	Pelaksanaan (Actuating).....	29
2.3.1.4	Pengawasan dan Pengadilan (Controlling).....	30
2.3.2	Teori Crime Prevention Through Environmental Design (CPTD)...	32
2.3.3	Teori Pencegahan Kejahatan Situasional.....	34
2.3.3.1	Strategi Pencegahan Kejahatan.....	36
2.3.3.2	Komponen Dalam Pencegahan Kejahatan Situasional.....	
BAB 3	METODE PENELITIAN	40
3.1	Pendekatan Penelitian	42
3.2	Jenis Penelitian.....	43
3.3	Data Primer dan Data Sekunder.....	43
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5	Teknik Analisa Data	46
3.6	Kendala Dalam Penelitian	
BAB 4	PEMBAHASAN	48
4.1	Gambaran Umum Polda Metro Jaya.....	58
4.1.1	Situasi Pelayanan Markas (YANMA) Polda Metro Jaya.....	62
4.1.2	Potensi Ancaman Di Markas Polda Metro Jaya.....	65
4.1.3	Pelaksanaan Pengamanan di Polda Metro Jaya	66
4.1.3.1	Kebijakan Pengamanan Di Polda Metro Jaya.....	66
4.1.3.2	Manajemen Pengamanan <i>Inhouse</i> dan <i>Outsourcing</i>	67
4.1.3.3	Sasaran Pengamanan.....	69
4.1.3.4	Sarana Dan Prasarana.....	70
4.1.3.5	Pola Pengamanan	

4.2	Analisa Manajemen Pengamanan Markas Kepolisian Oleh Yanma Polda Metro Jaya (Diskripsi dan Temuan Kelemahannya).....	73 86
4.2.1	Analisa Resiko Keamanan di Poda Metro Jaya.....	86
4.2.1.1	Faktor Lingkungan	87
4.2.1.2	Faktor Manusia	88
4.2.1.3	Faktor Finasnsial	
4.2.2	Upaya yang dilakukan Yanma Polda Metro Jaya dalam mengimplementasikan untuk mengantisipasi segala bentuk resiko ancaman dan kejahatan terhadap Polda Metro Jaya.....	88
4.2.3	Faktor penyebab lemahnya Manajemen Pengamanan yang dilakukan oleh Yanma.....	95 101
4.2.4	Altermatif Solusi	
BAB 5	PENUTUP	111
5.1	Kesimpulan.....	113
5.2	Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN PENELITIAN		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 : Lay Out Polda Metro Jaya	48
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Polda Metro Jaya	54
Gambar 4.3 : Struktur Organisasi YANMA Polda Metro Jaya	57
Gambar 4.4 : Lay Out Pembagian Petugas Pengamanan di Polda Metro Jaya.....	74
Gambar 5.1 : Lay Out pembagian Area parkir kendaraan di Polda Metro Jaya...	114



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam tesis ini peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang alternatif solusi manajemen pengamanan Markas Besar Kepolisian oleh Pelayanan Markas (YANMA) Polda Metro Jaya. Kejahatan telah menjadi suatu masalah sosial yang meresahkan dan menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Kejahatan akan selalu terjadi dikarenakan manusia secara terus menerus berupaya mencapai tujuannya melalui berbagai cara, termasuk cara-cara yang tidak disukai oleh orang lain hingga melanggar norma yang ada di masyarakat. Cara-cara dalam melakukan kejahatan tersebut akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang dimiliki oleh manusia.

Kejahatan berkembang mulai dari kejahatan konvensional, seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di mana pelakunya merupakan orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi, kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi (*cyber crime*) di mana pelakunya dapat berupa siapa saja tanpa memandang korbannya siapa dan batas wilayah atau negara tidak menjadi hambatan, hingga kejahatan luar biasa, seperti terorisme yang dapat mengancam nyawa setiap manusia, pemikiran seseorang, serta keberlangsungan pemerintahan yang sedang berlangsung.

Namun bagaimana jika kejahatan itu dialami oleh institusi yang tugasnya adalah untuk menanggulangi kejahatan? cukup aneh tapi nyata. Seperti yang kita ketahui beberapa kejadian belakangan ini, bahwa beberapa kelompok tertentu sudah mulai melakukan kejahatan dengan sasaran anggota Polri, dalam hal ini lebih difokuskan pada Polisi sebagai orang, karena contoh kasus yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2011 dimana sesuai pemberitaan di media massa, Detiknews.com pada tanggal 15 Maret 2011 bahwa adanya pengiriman bom melalui jasa pengiriman paket dimana di dalam paket tersebut terdapat buku yang ditujukan ke salah satu Petinggi Polri dengan alasan untuk meminta mengisi lembar kata pengantar, yang tidak dapat kita sangkal lagi bahwa barang tersebut

sudah masuk ke gedung kantor Badan Narkotika Nasional di daerah Cawang. Dalam Majalah Tempo Interaktif tanggal 15 Maret 2011 mengatakan bahwa kecurigaan petugas muncul ketika mendengar di berita televisi bahwa telah terjadi ledakan dengan modus yang sama di Utan Kayu Jakarta Timur pada sore harinya, paket bom tersebut pun diamankan di basement kantor BNN dan setelah tim Gegana datang tidak berapa lama bom tersebut pun dapat diledakkan pada tengah malam

Dari uraian diatas dapat kita analisa apabila tidak ada kejadian bom yang meledak karena dipicu oleh penanganan yang kurang efektif di Utan Kayu, maka dapat dipastikan bahwa bom tersebut dapat mengenai petinggi Polri tersebut. Kejadian lain yang juga tidak kalah barunya yang dikutip dalam Tribunnews.Com tanggal 15 April 2011 mengatakan bahwa pada pertengahan April tahun 2011 terjadi peledakan bom bunuh diri di dalam masjid Polres Cirebon yang mana dengan aksi peledakan bom bunuh diri tersebut telah melukai Kapolres Cirebon. Peristiwa ledakan bom yang terjadi di Masjid Polres Cirebon menewaskan seorang pria yang diduga sebagai pelaku peledakan bom, sekitar 25 orang yang menjadi korban akibat ledakan tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit, satu di antaranya Kapolresta Cirebon AKBP Herukoco. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika sebagian besar umat muslim mulai memasuki masjid guna menunaikan shalat Jumat. Keterangan sejumlah saksi mata yang ikut dalam jamaah sholat, menceritakan detik-detik meledaknya bom bunuh diri dari jamaah mulai berdatangan yang mana mayoritas jamaahnya adalah anggota Polres Cirebon sampai saat peledakan dimana peristiwa itu terjadi setelah imam mengucapkan takbir.

Selain peristiwa penyerangan terhadap markas kepolisian juga pernah terjadi suatu kejadian yang diberitakan Detiknews.Com tanggal 5 Januari 2011 dimana seorang tahanan kasus narkoba yang diduga sebagai pengedar ganja melarikan diri saat diperiksa Penyidik di Gedung Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Tersangka beralasan hendak kencing. Peristiwa itu terjadi pada Selasa tanggal 4 Januari 2011 saat itu, Dadang dipanggil untuk diperiksa diruang Penyidik Satuan I

sehingga penyidik kemudian mengizinkannya untuk buang air kecil di toilet yang ada di ruangan penyidik, setelah ditunggu beberapa menit tersangka tersebut tidak kunjung keluar maka setelah dicek oleh petugas, ternyata tersangka telah melarikan diri melalui plafon toilet.

Peristiwa lain yang pernah terjadi pada Kompasnews.Com tanggal 29 Desember 2009 mengatakan bahwa di Mabes Polri menurut keterangan yang dikutip dari Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen.Pol. Sulistyو Ishak mengatakan telah terjadi pembakaran mobil Wakil Inspektorat Pengawasan Umum Polri Irjen Pol Rismawan, Mobil Toyota Camry bernopol 30-00 milik Mabes Polri, pembakaran yang dilakukan oleh tersangka Iras, Iras melakukan perbuatan tersebut karena laporannya terkesan diabaikan atau tidak ditanggapi oleh pihak Kepolisian. Setelah ditelusuri ternyata berkasnya sudah di SP3 karena tidak memenuhi unsur, tetapi yang menjadi *critical point* peneliti adalah terkait pernyataan Wakadiv Humas Polri Brigjen.Pol. Sulistyو Ishak yang mengatakan terkait peristiwa tersebut maka Propam telah melakukan pemeriksaan terhadap Detasemen Markas Mabes Polri terkait masalah pengamanan yang kecolongan sehingga Iras bisa masuk ke Mabes Polri dan melakukan pembakaran tersebut. Dapat kita sayangkan peristiwa-peristiwa ini terjadi di kantor polisi yang mana sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi apabila di setiap kantor polisi memiliki manajemen pengamanan yang baik sehingga hal-hal seperti ini dapat dicegah sedini mungkin.

Beberapa contoh cuplikan peristiwa kriminal yang terjadi di lingkungan kepolisian di atas adalah beberapa contoh yang menunjukkan kerawanan dan ancaman yang besar terhadap keamanan Markas Kepolisian, Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti Manajemen Pengamanan Markas Kepolisian yang dilakukan oleh Pelayanan Markas (YANMA) Polda Metro Jaya.

Peneliti menduga masih ada beberapa peristiwa kriminal lain yang terjadi. Sungguh ironis jika di satu sisi, Polisi dipersepsikan sebagai *guardian of the people* dan digadang-gadang banyak menuai sukses dalam mengatasi masalah kriminal di masyarakat. Namun di sisi lain, ternyata Polisi sendiri pun terkesan

belum optimal atau (secara ekstrim dapat dikatakan) gagal untuk melindungi dirinya sendiri. Situasi ini dipandang oleh peneliti sebagai manifestasi sebuah paradoks.

Berbicara seputar beberapa persoalan masalah keamanan sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas utama kepolisian karena apapun bentuknya dengan kehadiran polisi diyakini dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Kepolisian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI pada pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengapa masalah keamanan menjadi hal yang utama dan pertama dicantumkan dalam tugas pokok kepolisian, itu karena sejatinya tugas polisi dimanapun berada adalah menjaga keamanan dan ketertiban sehingga sudah barang tentu apabila masyarakat berbenturan dengan masalah keamanan maka yang pertama akan ditanyakan masyarakat adalah kemana polisinya. Ini menjadikan Polisi semakin disoroti apabila isu utama ini tidak dapat ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian.

Polisi selain sebagai subyek pengamanan sebenarnya juga sebagai obyek yang harus diamankan karena bagaimana seorang polisi dapat memberikan rasa aman kepada masyarakatnya apabila ia tidak dapat mengamankan dirinya sendiri. Akan terlihat riskan apabila orang yang bertugas memberikan rasa aman tetapi tidak dapat mengamankan dirinya sendiri.

Besar kemungkinan hal ini diduga karena adanya ego sektoral di beberapa oknum kepolisian yang menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling ahli atau *expert* di dalam masalah keamanan, sehingga terkadang oknum tersebut mengabaikan hal-hal mendasar dalam konsep pengamanan. Untuk itu perlu kiranya dicarikan suatu metode dalam mencegah bagaimana agar polisi baik sebagai orang, tempat maupun kegiatannya tidak menjadi sasaran kejahatan. Terkait dengan permasalahan tersebut maka dirasakan sangat penting apabila kita mengetahui apa saja faktor atau situasi yang dapat menjadikan polisi sebagai sasaran kejahatan tersebut.

Jika kita singgung tentang pencegahan kejahatan, umumnya konsep ini lebih sering didiskusikan dalam konsteks pencegahan kejahatan di masyarakat. Secara historis, ada beberapa ahli yang pernah berbicara tentang pencegahan kejahatan dan salah satunya adalah Ronald V Clark, 1995. dalam bukunya yaitu *Situational Crime Prevention ; Its Theoretical Basic and Practical Scope Crime and Justice* yang mengatakan Hampir sama dengan ahli lain, pemikiran Clark tentang pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional muncul pada peralihan tahun 1970-an ke 1980-an. Upaya pencegahan ini muncul sebagai wujud dari suatu respon terhadap kegagalan teori-teori dan program tradisional. Dengan kata lain, pendekatan situasional menantang asumsi yang diberikan oleh pendekatan-pendekatan sebelumnya, yang mendominasi riset terhadap pencegahan kejahatan.

Terdapat perbedaan mendasar dalam asumsi antara kedua pendekatan pencegahan kejahatan ini tradisional dan situasional. Asumsi yang berlaku dalam sistem pencegahan kejahatan tradisional adalah fokus perhatian mereka terhadap individu dan keterlibatan mereka dalam kejahatan. Sehingga tujuan pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan tingginya tingkat pelanggar atau pelanggar yang berbahaya agar mereka tidak bebas untuk “memangsa” warga negara yang patuh terhadap hukum. Sedangkan asumsi dalam pendekatan pencegahan kejahatan situasional difokuskan bukan hanya pada orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi juga pada konteks dimana kejahatan itu terjadi.

Sistem pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional berupaya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kejahatan dan strategi pencegahan kejahatan, sehingga efektif melalui kepedulian terhadap lingkungan fisik, peranan organisasi dan sosial yang bersifat informal yang memungkinkan berkurangnya tingkat kejahatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, pendekatan ini tidak mengabaikan para pelanggar (*offender*), hanya menempatkan mereka sebagai bagian dari suatu pemahaman bagi upaya pencegahan kejahatan yang lebih luas yang berpusat pada konteks kejahatan itu,

dan penekanannya terhadap alternatif pilihan yang mengacu pada seting lingkungan.

Menurut Clarke V, 1995 mengatakan ada empat komponen yang harus diperhatikan dalam membangun kerangka berfikir *Situational Crime Prevention*, antara lain 1) dasar teori yang menggambarkan seberapa pentingnya pendekatan-pendekatan yang digunakan (*A theoretical foundation drawing principally upon routine activity and rational choice approaches*); 2) adanya metodologi yang standar berdasarkan pada penelitian lapangan (*A standard methodology based on the action research paradigm*); 3) diperlukan seperangkat teknis –maupun konsep-konsep mengenai pengurangan kesempatan melakukan kejahatan (*A set of opportunity-reducing techniques*) dan ; 4) perlunya evaluasi terhadap model yang digunakan mengingat SCP bersifat relatif terhadap tempat dan waktu. (*A body of evaluated practice including studies of displacement*).

Pendekatan situasional dinilai lebih efektif dalam menjelaskan perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan. Karena umumnya situasi yang memberi kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan akan diisi oleh kejahatan-kejahatan yang tergolong licik dan serakah, seperti pencurian dengan pembongkaran di tempat tinggal, pengutilan dan *vandalisme*, atau juga kejahatan kekerasan yang tentunya membutuhkan kesempatan yang lebih khusus lagi.

Daya tarik dari langkah-langkah situasional terletak pada kapasitasnya untuk menyediakan solusi yang realistis, taktis, seringkali sederhana dan tidak mahal. Bagaimanapun juga, keberhasilan dari pendekatan pencegahan kejahatan situasional tergantung pada seberapa jauh para calon pelanggar menyadari dan menganggap bahwa perubahan situasi adalah hal yang responsif terhadap kemungkinan perbuatan melanggar hukum yang akan dilakukan, dengan menimbang resiko dan keuntungan yang akan diterima, misalnya suasana yang tidak aman dalam melakukan kejahatan atau resiko yang semakin berat bagi mereka jika melakukan kejahatan.

Ada dua program utama dari langkah-langkah situasional, yaitu (1) langkah-langkah sekuriti yang akan membuat lebih sukar untuk dilakukannya kejahatan, dan (2) langkah-langkah yang mempengaruhi biaya dan keuntungan dari dilakukannya kejahatan (Clarke;1995) menyebutkan bahwa berdasarkan pemikiran bahwa pengurangan kesempatan dapat dihubungkan dari meningkatnya usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah kejahatan (*increasing perceived effort*), kemudian dengan meningkatkan resiko bagi tindak kejahatan (*increasing perceived risks*) dan mengurangi “nilai” dari sasaran kejahatan (*reducing anticipated rewards*), dan membuat alasan-alasan tertentu untuk mencegah kejahatan (*removing excuses*) yang kemudian ditambahkan oleh Wourth dengan mengurangi berbagai bentuk provokasi (*reduce provoke*).

Setelah berpanjang lebar membahas permukaan dari pendekatan situasional terhadap pencegahan kejahatan, harus dilihat bagaimana aplikasi dari pendekatan situasional terhadap pencegahan kejahatan di Indonesia.

Cukup gamang jika kita berbicara seputar tingkat keseriusan kejahatan di Indonesia. Ada sebagian orang beranggapan bahwa realitas kejahatan yang terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan. Sebagian kalangan beranggapan bahwa kondisi ini besar kemungkinan dipicu dari pengabaian terhadap pentingnya pencegahan kejahatan. Peneliti sepakat dengan beberapa anggapan diatas. Hanya satu yang ditambahkan oleh peneliti bahwa sebenarnya besar kemungkinan hal tersebut juga dipicu dari pemilihan subyek dan obyek yang kurang tepat dalam strategi pencegahan kejahatan.

Khususnya dalam pendekatan situasional, lebih bersifat aplikatif praktis mestinya dapat menumbuhkan kreasi dalam mencegah kejahatan yang sesuai tempat dan waktu. Setting arsitektur sebuah bangunan baik itu kantor, pusat perbelanjaan, apartemen maupun hotel, letak secara geografis, padanan interior dan eksterior yang memudahkan pengawasan dan pengambilan tindakan jika terjadi hal-hal yang diinginkan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan. Dan di Indonesia

sendiri hal ini merupakan suatu yang langka. Jarang dijumpai bangunan yang dapat memadukan unsur estetika dan sekuritas secara baik, atau wilayah yang aman dari bentuk kejahatan. CPTED (*crime prevention trough environtmental design*) juga masih sangat kurang dipahami dan digunakan dalam membangun sebuah lokasi yang aman (*defensible space*).

Tata kota yang katanya sedang menuju “penataan” menimbulkan adanya kesenjangan sosial, ironis sekali dari ketinggian gedung kita dapat melihat kumuhnya Jakarta. Dari yang beratapkan beton sampai yang hanya beratapkan langit menjadi satu daerah. Dari tempat tinggal yang berlantai puluhan sampai yang bahkan tak berlantai juga menjadi satu. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional hendaknya dipahami tidak hanya sebagai pencegahan dengan memanfaatkan situasi fisik, tapi juga situasi sosial.

Peneliti mencermati bahwa “sumbatan“ dari persoalan ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya aspek sumber daya manusia yang kurang kreatif dalam hal pencegahan kejahatan, terbatasnya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sebuah model pencegahan kejahatan yang berbasis teknologi ataupun kualitas aparat yang bertugas mengawasi dan mengamankan lingkungan setempat seperti Satuan Pengamanan (Satpam), pamong praja maupun masyarakat sendiri untuk mendesain sebuah lingkungan yang dapat mencegah kejahatan. Masyarakat cenderung mengandalkan aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi kejahatan, padahal perbandingan jumlah polisi dan masyarakat sangat jauh berbeda belum lagi jika kita berbicara mengenai kualitas dari polisi tersebut. Maka, tidak heran jika tingkat keseriusan kejahatan di Indonesia cenderung berkembang. Bahkan dapat ditangkap kesan, kejahatan dapat dipersepsikan terkadang “satu langkah di depan” dari upaya penanggulangan oleh aparat hukum.

Beberapa persoalan terkait maraknya tindak kejahatan di lingkungan kepolisian seperti yang diutarakan diatas, tentu saja memunculkan sebuah fenomena unik dan sekaligus juga menyisakan satu persoalan besar yaitu rentannya kantor polisi dari

tindak kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan yang selama ini di gadang-gadang oleh kepolisian dengan fokus pada masyarakat, sudah saatnya untuk diterapkan juga dalam lingkungan kepolisian. Setiap pimpinan polri perlu untuk merespon hal ini dengan bijak. Oleh karena itu melalui penelitian ini, peneliti akan menggunakan Polda Metro Jaya sebagai “laboratorium” untuk mendalami fenomena tersebut.

Berbicara tentang tanggung jawab keamanan di lingkungan kepolisian (khususnya level Polda), maka domain ini umumnya menjadi ranah bidang Yanma. Tidak jauh berbeda dengan Polda lain, hal ini juga berlaku di lingkungan Polda Metro Jaya. Yanma merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, pengamanan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda Metro Jaya yang mencakup seluruh kantor Polda Metro Jaya dirasa perlu menerapkan manajemen keamanan guna menciptakan keadaan yang kondusif dan nyaman bagi seluruh anggota kepolisian didalamnya maupun anggota masyarakat pada umumnya yang datang ke kantor Polda Metro Jaya.

Aman itu mahal namun lebih mahal lagi jika tidak aman sehingga dalam pengamanan suatu markas diperlukan manajemen pengaman yang terintegrasi baik dimulai dari kegiatan perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*) maupun pengawasan (*Controlling*) hal inilah yang akan peneliti lihat terhadap Pelayanan Markas (YANMA)n Polda Metro Jaya dalam upaya mengamankan Polda Metro Jaya.

Untuk menumbuhkan rasa aman guna memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat perlu adanya peningkatan keamanan yang layak dan termonitoring dalam segi perencanaan, pelaksanaan sampai perawatan sehingga dapat terciptanya rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas pokok dalam setiap Subbag yang ada di bawah Kepala Yanma untuk meningkatkan segala bentuk keamanan di Markas Polda yang lebih berkualitas dan dapat memberikan kenyamanan terhadap pelayanan masyarakat dengan baik dan tertib, memperkuat

kesatuan dan persatuan nasional, dan meningkatkan jati diri yang baik di Polda Metro Jaya.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Bermula dari penjelasan secara teoritis maupun konsep-konsep yang digunakan serta latar belakang di atas maka permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana mencari solusi terhadap manajemen pengamanan markas kepolisian yang dilakukan oleh Pelayanan Markas Polda Metro Jaya dengan melakukan pendekatan pencegahan kejahatan terhadap polisi baik sebagai orang, tempat maupun kegiatannya.

Beranjak dari konsepsi di atas, maka rumusan masalah kali ini ini adalah lemahnya manajemen keamanan di Polda Metro Jaya cenderung melahirkan beberapa persoalan. Oleh karena itu diperlukan solusi terhadap manajemen pengamanan markas kepolisian yang dilakukan oleh Pelayanan Markas Polda Metro Jaya dengan melakukan pendekatan pencegahan kejahatan terhadap polisi baik sebagai orang, tempat maupun kegiatannya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana manajemen pengamanan yang diterapkan oleh Yanma saat ini di Polda Metro Jaya ?
2. Mengapa masih terdapat kelemahan pengamanan yang dilakukan oleh Pelayanan Markas terhadap Mapolda Metro Jaya?
3. Bagaimana alternatif solusi manajemen pengamanan terhadap Mapolda Metro Jaya?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan mengenai manajemen pengamanan yang selama ini dilakukan oleh Yanma Polda Metro Jaya dan mengidentifikasi masalah serta kelemahan yang ditemukan selama penelitian

untuk dapat memberikan pemecahan masalah atau perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan pengamanan yang ditemukan oleh peneliti di Pelayanan Markas Polda Metro Jaya. Untuk lebih jelaskan kami bagi tujuan penelitian ini ke dalam tiga aspek yaitu :

1. Mendeskripsikan Manajemen Pengamanan yang dilakukan oleh Pelayanan Markas terhadap Mapolda Metro Jaya
2. Mengidentifikasi kelemahan Manajemen Pengamanan yang dilakukan oleh Pelayanan Markas terhadap Mapolda Metro Jaya
3. Memberikan alternatif solusi Manajemen Pengamanan terhadap Mapolda Metro Jaya

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akademis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang suatu manajemen pengamanan yang baik sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan bagi program kajian ilmu kepolisian dan Universitas Indonesia.
2. Praktis
 Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para *stake holder* yang ada di kewilayahan untuk dapat menerapkan suatu manajemen pengamanan yang baik agar dapat memberikan rasa aman baik bagi personil, tempat dan kegiatan yang menjadi tempatnya bertugas.

1.5. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Semua kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya yang mana kegiatan pengamanan tersebut dilakukan oleh Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Pelayanan Markas atau yang disingkat Yanma sesuai Perkap Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah. Pengamanan yang dilakukan menyangkut

semua persyaratan dalam spesifikasi keamanan yang menjadi bagian dari sistem manajemen pengamanan, yang mana cakupan aplikasinya tergantung beberapa faktor sesuai kebijakan keamanan, resiko-resiko serta kompleksitas operasional Polda Metro Jaya.

Manajemen pengamanan ini fokus pada masalah keamanan markas serta alternatif pencegahan untuk mengantisipasi ancaman, gangguan serta kejahatan yang dapat terjadi di Markas Polda Metro Jaya.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Tata urutan penulisan bermanfaat untuk memberikan alur penulisan agar sistematis. Tata urutan dalam tesis ini terbagi dalam tujuh bab, dimana dalam setiap bab mempunyai hubungan yang saling terkait. Adapun ketujuh bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan, meliputi latar belakang, perumusan masalah, , tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Sehingga secara sepintas melalui bab ini diharapkan sudah dapat diketahui tentang penelitian yang dilakukan.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka, berisi tentang beberapa konsep serta teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan permasalahan penelitian.

BAB 3 : Metode Penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, data primer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisa data, pentahapan penelitian dan kendala penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini.

BAB 4: Pembahasan yang berisi gambaran situasi Polda Metro Jaya, Situasi Yanma Polda Mero Jaya serta Analisa dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti menguraikan analisis tentang hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian apakah sesuai dengan teori dan konsep yang dikemukakan dalam bab 2 tentang tinjauan pustaka.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran berisi uraian tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diuraikan dalam bab 1 dengan menggunakan pembahasan dan analisis pada bab 6, dan saran merupakan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perbaikan manajemen pengamanan Polda Metro Jaya.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan tinjauan literatur atau yang sering disebut tinjauan pustaka berisi tentang kerangka teori, literatur konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar penelitian untuk penulisan tesis ini. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah, teori manajemen, teori pencegahan kejahatan situasional, teori aktivitas rutin sedangkan kerangka konsepnya adalah konsep manajemen pengamanan, konsep sekuriti, dan konsep lainnya yang berhubungan dengan tesis ini.

2.1. BATASAN KONSEP

Peneliti menggunakan beberapa konsep sebagai kajian pustaka dilakukan untuk membangun kerangka konseptual dalam penelitian ini. Kerangka konseptual itu dibangun dari berbagai konsep yang berasal dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Menurut Suparlan (1997) kerangka konseptual adalah “syarat mutlak” dalam penelitian. Konsep digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis data penelitian. Sehingga menjadi kerangka berpikir peneliti dengan menghubungkan konsep dan teori untuk mencapai kesimpulan, yang dijelaskan berikut ini.

2.1.1. KONSEP MANAJEMEN

Secara umum manajemen diartikan sebagai pengkoordinasian usaha-usaha manusia sehingga tujuan perorangan akan diwujudkan dalam keberhasilan sosial. Sering juga manajemen diartikan sebagai seni menggerak orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Dalam *ensiclopedia of the social science* mendefenisikan manajemen sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi. Keberhasilan mencapai tujuan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dan cara menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen menen-

tukan keefektifan dan efisiensi kegiatan suatu organisasi di dalam pencapaian tujuan atau sasaran.

Bertitik tolak dari ulasan diatas maka ini menjadi pedoman dasar dalam pengembangan ilmu manajemen, salah satu ahli green (1998) efisiensi ditekankan pada melakukan pekerjaan dengan benar (*doing the thing right*), sedangkan efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right thing*), efektif sering mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan efisien mengacu pada penggunaan sumberdaya minimum untuk menghasilkan output yang ditentukan. Di dalam manajemen efektifitas lebih menjadi prioritas utama dibanding efisiensi.

Menurut James A.F. Stoner (1986) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian upaya, kegiatan dan pekerjaan anggota/karyawan suatu organisasi melalui proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat ini didefinisikan sebagai suatu proses atau cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan menyeluruh, saling berinteraksi dan merupakan suatu kesatuan utuh.

Menurut Sondang P. Siagian (2003), menyatakan bahwa manajemen dapat diartikan dari 2 sudut pandang yaitu : 1) Proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan, 2) kemampuan atau keterampilan seseorang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

George R. Terry (1997) dalam bukunya *Principle of management* mengatakan ada 6 sumber daya pokok dari manajemen, yaitu :

1. Men and women yang diartikan sebagai unsur manusia,
2. Materials diartikan sebagai prasarana

3. Machines diartikan sebagai sarana
4. Money diartikan sebagai dana atau anggaran.
5. Markets diartikan sebagai pasar atau sasaran
6. Methods diartikan sebagai metode

Masih menurut Terry (1997) menyatakan bahwa manajemen diartikan sebagai proses yang khas dan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut menyebutkan adanya suatu proses yang diartikan sebagai suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan yang menyeluruh dalam suatu kesatuan yang utuh. Manajemen pengamanan adalah merupakan bagian dari manajemen dan siap diperlukan sebagai suatu bagian dari pengetahuan manajemen.

Manajemen pengamanan ini dimaksudkan untuk membantu organisasi dapat menjalankan secara efektif dan efisien elemen-elemen sistem manajemen pengamanan yang dapat disatukan dengan persyaratan dasar manajemen lainnya. Manajemen ini juga dapat membantu organisasi untuk mencapai sasaran pengamanan dan kepentingan ekonomi. Manajemen ini seperti manajemen lainnya tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai hambatan organisasi. Persyaratan khusus dari manajemen pengamanan ini dapat membantu suatu organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan dan sasaran yang memposisikan tanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan peraturan perundangan dan resiko ancaman keamanan. Manajemen pengamanan ini dapat diterapkan pada semua tipe dan jenis organisasi, dan juga dapat untuk mengakomodir perbedaan wilayah geografis, budaya dan kondisi sosial.

2.1.2. KONSEP ORGANISASI

Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani “*organon*” yang berarti organ, alat atau instrument. Mc.Crie (2001) mendefinisikan tentang organisasi sebagai berikut :*Organizations are composed of groups of people bounded by a purpose a systematic scheme to achieve mutually agreed-upon objectives...Organization are created, therefore, in order to achieve deemed desirable by leader and planners of the orgnizatio, by those who carry out tasks , or in some cases from both.*

Memperkuat dari pendapat di atas, Siagian (2000) menyatakan bahwa organisasi sebagai kelompok orang yang terikat secara formal dan hierarkis serta bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Stephen Robbins memberikan definisi yang lebih komprehensif tentang organisasi, dimana merupakan unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relative lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau seperangkat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kemudian Thibault, M.Lynch dan Mc.Bride (2001) memperluas definisi organisasi menjadi dua aspek organisasi yang menjadi bagian dari definisi dasar atas, yaitu pendekatan mekanis/struktural dan pendekatan humanis. Dalam pendekatan mekanis/struktural disebutkan bahwa organisasi merupakan seluruh susunan dan sub divisi kegiatan untuk menjamin ekonomi upaya melalui spesialisasi dan koordinasi kerja sehingga menuju kesatuan aksi (definisi ini menekankan aspek mekanis atau fisik dari organisasi). Selanjutnya dalam pendekatan humanis diikhtisarkan sebagai bentuk pendefinisian dan pengelompokan kerja menjadi satuan pekerjaan dan mendefinisikan hubungan standar di antara individu yang mengisi tugas-tugas ini (definisi ini menekankan bahwa manusia yang mendirikan organisasi dan melalui kegiatan manusia seluruh pekerjaan yang dijalankan).

Organisasi dan manajemen merupakan dua hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ibarat tubuh manusia maka organisasi merupakan raganya, se-

dangkan manajemen adalah ruh dari raga tersebut. Menurut Terry (1997) pengertian dari manajemen merupakan suatu pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain. Menurut Zamani (1998) mengutip pandangan Terry bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya.

Djamin dan Siswanto (1995) memberikan definisi tentang manajemen definisi tentang manajemen yang merupakan ilmu dan kemahiran untuk pengelolaan orang-orang maupun aktifasinya dalam organisasi tersebut. Lebih lanjut dikatakan mereka bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai seni dalam pengertian yang luas dan umum yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan serta keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen sebagai ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan, atau pengetahuan yang terorganisir.

Sebagai intisari dari beberapa konsepsi di atas maka secara sederhana organisasi dapat dirumuskan sebagai kumpulan sekelompok orang yang mengadakan aktivitas bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya. Untuk mencapai tujuan bersama tersebut maka dalam pengelolaannya digunakan ilmu dan kemahiran tertentu. Ilmu dan kemahiran untuk pengelolaan orang-orang maupun aktivitasnya dalam organisasi tersebut dinamakan manajemen.

Untuk dapat menerapkan manajemen yang optimal terhadap suatu organisasi maka harus didukung dari segala sumber daya yang ada pada organisasi tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Efektifitas yang harus ditetapkan dalam proses manajemen berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat sehingga diperlukan profesionalisme seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Sedangkan efisiensi bermakna bahwa seseorang harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan benar agar dapat meminimalkan biaya sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3. KONSEP MANAJEMEN KEAMANAN

Definisi manajemen keamanan dapat berasal dari beberapa ahli manajemen. Secara sederhana, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumberdaya yang ada. Manajer adalah seseorang yang bekerja dengan orang lain dan melalui orang lain dengan cara mengkoordinasi kerja mereka untuk memenuhi tujuan organisasi. Tugas manajer adalah untuk memimpin pengelolaan sumber daya organisasi, melakukan koordinasi penyelesaian pekerjaan orang-orang dalam organisasi, dan memegang aturan-aturan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan organisasi. Di antara aturan-aturan itu adalah:

- a. Aturan informasi : mengumpulkan, memproses, dan menggunakan informasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan.
- b. Aturan interpersonal : berinteraksi dengan *stakeholder* dan orang atau organisasi lain yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tercapainya tujuan organisasi dimana dia menjadi manajer.
- c. Aturan keputusan : memilih diantara beberapa alternatif pendekatan, memecahkan konflik, dilema atau tantangan.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah secara khusus membahas tentang manajemen pengamanan yang sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut mengandung pengertian sebagai bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan pe-

nerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien, dan produktif.

Manajemen pengamanan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi, untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Setiap organisasi, perusahaan, dan atau instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia, wajib menerapkan manajemen pengamanan ini.

Standar manajemen pengamanan meliputi :

- a. Penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan manajemen pengamanan;
- b. Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan;
- c. Penerapan kebijakan manajemen pengamanan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan;
- d. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- e. Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan manajemen pengamanan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.

Unsur – unsur yang terdapat dalam standar dan penerapan manajemen pengamanan pada organisasi, perusahaan dan atau instansi/lembaga pemerintah, terdiri atas :

- a. Pemeliharaan dan pembangunan komitmen;
- b. Pemenuhan aspek peraturan perundang – undangan keamanan;

- c. Manajemen resiko pengamanan;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Perencanaan dan program
- f. Pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan;
- g. Konsultasi, komunikasi dan partisipasi;
- h. Pengendalian dokumen dan catatan;
- i. Penanganan keadaan darurat;
- j. Pengendalian proses dan infrastruktur;
- k. Pemantauan dan pengukuran kinerja;
- l. Pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian;
- m. Pengumpulan dan penggunaan data;
- n. Audit;
- o. Tinjauan manajemen;
- p. Peningkatan berkelanjutan.

Spesifikasi sistem manajemen pengamanan ini memberikan persyaratan-persyaratan untuk penerapan manajemen pengamanan, agar organisasi dapat mengendalikan ancaman dan mengembangkan kinerja keamanan organisasi. Tidak dinyatakan kriteria spesifik kinerja keamanan, serta tidak memberikan spesifikasi detail untuk desain dari sistem manajemen.

Spesifikasi pengamanan ini dapat diaplikasikan dalam organisasi yang berharap untuk :

1. Menetapkan sebuah sistem manajemen pengamanan untuk mengeliminasi atau meminimalisasi resiko terhadap personel dan pihak terkait lainnya yang terpapar oleh ancaman yang terkait dengan entitas, aset dan personel;
2. Menerapkan, memelihara dan perbaikan berkelanjutan sistem manajemen pengamanan;
3. Menjamin untuk patuh/taat terhadap kebijakan keamanan yang telah dinyatakan ;

4. Menunjukkan kepatuhan terhadap spesifikasi keamanan dengan :
 - a. Membuat ketentuan sendiri dan mendeklarasikan sendiri;
 - b. Mengkonfirmasi kesesuaian dengan beberapa pihak dalam organisasi, seperti : pelanggan-pelanggan atau komunitas;
 - c. Mengkonfirmasi pendeklarasian sendiri melalui pihak eksternal organisasi;
 - d. Sertifikasi/ registrasi sistem manajemen pengamanan organisasi oleh pihak eksternal organisasi.

Semua persyaratan dalam spesifikasi keamanan merupakan bagian dari sistem manajemen pengamanan, cakupan aplikasi tergantung beberapa faktor sesuai dengan kebijakan keamanan organisasi, sifat kegiatan bisnis organisasi dan resiko-resiko serta kompleksitas operasionalnya.

2.1.4. KONSEP TENTANG POLISI

Pertama sekali dunia mengenal istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani “politeia” yang berarti seluruh pemerintahan kota. Dalam implementasinya, nomenklatur atau penamaan pada istilah yang digunakan oleh lembaga kepolisian di masing-masing negara adalah berbeda-beda. Seperti di Amerika Serikat kita pernah mendengar istilah “sheriff”, “marshall”. Di Jerman ada istilah “polizei”. Di Spanyol kita kenal dengan istilah “policia” dan juga di Belanda kita kenal dengan istilah “politie”. Di Indonesia kata polisi berasal dari pengindonesiaan kata “politie” yang berasal dari Belanda. Dalam kamus umum bahasa Indonesia menyebutkan bahwa polisi mengandung arti sebagai badan pemerintah yang terdiri dari sekelompok pegawai yang mempunyai tanggung jawab tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum .

Dalam penggunaannya kata “polisi” menurut beberapa pendapat ahli terdapat perbedaan makna, yaitu ; 1) Polisi sebagai fungsi. 2) Polisi sebagai lembaga negara, 3)

Polisi sebagai pejabat atau petugas. Dalam pengertiannya sehari-hari polisi sering didefinisikan sebagai petugas atau pejabat, karena dalam kenyataannya merekalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Untuk melihat perbedaannya maka polisi itu dibuatkan atribut-atribut atau seragamnya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan polisi, dalam melakukan tugasnya polisi hendaknya mengetahui batas kewenangannya serta tanggung jawabnya untuk menghindari resistensi dari masyarakat yang membutuhkannya, hal ini termasuk juga meliputi adat istiadat, kebudayaan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar tempatnya bertugas.

Dalam konsep polisi sipil dewasa ini polisi berfungsi sebagai pengayom masyarakat, pelindung masyarakat dari segala bentuk ancaman dan tindakan kejahatan yang dapat mengganggu rasa aman serta mencegah dari kerugian baik secara moral maupun materiil yang dapat dialami masyarakat, dengan segenap daya upaya memelihara ketertaturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat mendeteksi dan mencegah kejahatan yang dapat kapan saja dan dimana saja menimpa masyarakat.

2.1.5. KONSEP TENTANG KEJADIAN, INSIDEN KEAMANAN DAN RESIKO

Sesuai peraturan Kapolri No. 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan / atau instansi / Lembaga Pemerintah dijelaskan tentang beberapa konsep antara lain :

Kejadian adalah sesuatu yang terjadi tidak sepadan dalam konteks keamanan, biasanya mewakili sebuah kejadian, seperti : insiden keamanan, alarm, keadaan darurat dalam medis, atau berkaitan dengan pengalaman.

Insiden keamanan adalah keamanan yang terkait dengan kejadian atau aksi yang mengarah pada kematian, luka atau kerugian moneter, suatu penyerangan terhadap

karyawan, pelanggan, supplier didalam property organisasi dapat menjadi salah satu insiden keamanan.

Resiko adalah kemungkinan dari kerugian yang dihasilkan dari ancaman, insiden atau kejadian yang berdampak pada keamanan. Sedangkan kerawanan keamanan adalah suatu kemampuan eksploitasi dari suatu kelemahan keamanan atau kekurangan pada fasilitas organisasi atau personel.

2.2. TINJAUAN LITERATUR

Peneliti juga menggunakan tinjauan literatur yang berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, dengan maksud untuk menjelaskan dan menguraikan tentang permasalahan yang terjadi, penelitian-penelitian sebelumnya tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1. PENELITIAN TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN DI GELORA BUNG KARNO JAKARTA PUSAT OLEH YUYUN YUDHANTARA TAHUN 2004

Yuyun dalam studinya mengungkapkan bahwa kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh petugas pos polisi dan petugas satuan pengamanan Gelora Bung Karno sudah menggunakan pendekatan manajerial yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun, pada kenyataannya yang ditemui Yuyun di lapangan konsep majemen yang diterapkan belum menggambarkan suatu manajemen pengamanan yang terpadu, sehingga masih sering terjadinya gangguan keamanan dan kejadian-kejadian kejahatan sehingga menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat yang datang atau beraktifitas di Gelora Bung Karno.

Dari penelitian ini dijelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh direksi badan pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) untuk memberi pelayanan keamanan kepada warga masyarakat dengan menunjuk Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP) yang baru sebagai mitra kerja. Di dalam melaksanakan kegiatan pengamanan antara lain dengan menertibkan kawasan parkir timur sebagai paru-paru kota, juga dengan melakukan pelarangan terhadap pedagang kaki lima di parkir timur dan penjualan minuman keras. Hal ini menyebabkan berkurangnya gangguan keamanan di areal Gelora Bung Karno, di lain sisi kesadaran masyarakat untuk secara bersama-sama menjaga keamanan dengan cara memberikan laporan dengan cepat setiap melihat atau menemui setiap gangguan atau kejahatan yang terjadi di Gelora Bung Karno.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan manajemen yang diterapkan dengan mengutamakan profesionalisme, dan adanya suatu keterpaduan manajemen dalam melaksanakan kegiatan pengamanan antara petugas Kepolisian yang bertugas di Polpos dan petugas Satuan Pengamanan.

2.2.2. PENELITIAN TENTANG MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI PT. GADANG GARAM Tbk KEDIRI OLEH MARJOKO TAHUN 2006

Hampir sama dengan Yuyun di atas, Marjoko juga menjelaskan tentang upaya manajemen oleh PT. Gudang Garam Tbk Kediri. Namun Marjoko juga berbicara tentang perlindungan aset-aset perusahaan supaya terhindar dari kerugian dan kehilangan. Lebih jauh Marjoko juga menggali tentang beberapa spesifikasi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian) yang diterapkan oleh satuan pengamanan perusahaan secara swakarsa.

Temuan menarik dari Marjoko adalah penerapan manajemen pengamanan yang diselenggarakan belum optimal, mengingat masih banyaknya terdapat gangguan keamanan baik pencurian dan pengamanan terhadap aksi mogok kerja. Dalam prosesnya

gangguan keamanan tersebut dapat menyebabkan terhalangnya proses produksi yang dilakukan oleh pabrik untuk beberapa waktu sehingga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi pengusaha, pekerja atau bahkan bagi pemerintah daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut perlunya dukungan semua pihak dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti di PT. Gudang Garam Tbk Kediri, selain itu juga diperlukan peningkatan upaya-upaya taktis berupa pengamanan perimeter, perekrutan SDM, upaya penyelamatan masa depan usaha, tanggung jawab sosial perusahaan, membuat perjanjian kerja bersama serta pembinaan lingkungan masyarakat sekitar (*Community Development*).

2.2.3. PENELITIAN TENTANG MANAJEMEN PENGAMANAN KAWASAN WISATA TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL PADA BADAN USAHA JASA PENGAMANAN OLEH TRISAKSONO PUSPO AJI TAHUN 2010

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Trisaksono Puspo Aji tahun 2010 ini menjelaskan Manajemen Pengamanan kawasan Wisata Taman Impian Jaya Ancol yang diterapkan oleh tiga Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yaitu PT. Kibar Asta Saptia, PT. Metro Security Nusantara-911 SG dan PT. Sword Security yang bekerjasama dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Hasil penelitian Trisaksono ini menyimpulkan bahwa manajemen pengamanan sudah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur namun belum berjalan optimal karena belum menerapkan pelayanan pengamanan prima kepada wisatawan. Sehingga perlunya dilakukan pelatihan pengamanan kepariwisataan kepada seluruh satpam yang bertugas di kawasan wisata PT. Pembangunan Jaya Ancol, menunjuk Manager Security yang membawahi ketiga BUJP tersebut serta membuat SOP bagi satpam apabila terjadi suatu kejadian yang bersifat kontijensi.

2.3. TEORI TEORI

Peneliti menggunakan beberapa teori teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis data penelitian. Sehingga menjadi kerangka berpikir peneliti dengan menghubungkan konsep dan teori untuk mencapai kesimpulan, yang dijelaskan berikut ini.

2.3.1. TEORI MANAJEMEN DARI HENRY FAYOL

Teori manajemen timbul dari kebutuhan akan pedoman untuk mengelola organisasi yang kompleks. Menurut Henry Fayol yang mengemukakan pendapat bahwa praktek manajemen yang baik mempunyai pola tertentu yang dikenali dan dianalisa. Menurut Fayol ada enam kegiatan manajemen, yaitu :

1. *Technical*, yaitu kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa
2. *Commercial*, yaitu kegiatan membeli atau mendapatkan bahan yang diperlukan dan menjual barang atau jasa yang dihasilkan,
3. *Financial*, yaitu kegiatan untuk mendapatkan atau mengatur penggunaan dana dengan sebaik-baiknya
4. *Security*, yaitu kegiatan melindungi semua orang yang bekerja serta kekayaan perusahaan,
5. *Accountancy*, yaitu kegiatan mencatat dan menghitung biaya, pendapatan laba dan kekayaan perusahaan, menyusun neraca dan membuat statistik
6. *Managerial*, yaitu kegiatan melaksanakan fungsi manajemen.

Fayol menyatakan manajemen sebagai kegiatan perusahaan pada point keenam yaitu kegiatan manajerial, yang mana ini menjadi tugas utama setiap manajer yang disebut fungsi-fungsi manajemen. Di mana fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemberi perintah, pengkoordinasian dan pengawasan.

Dari definisi-definisi yang diutarakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengamanan menggunakan manajemen pengamanan yang baik dan bertujuan mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen agar dikerjakan dengan cara yang benar dan yang dikerjakan adalah benar sesuai dengan prinsip efektif dan efisien diatas.

Dari pemahaman diatas, maka dapat kita nyatakan bahwa satu organisasi dalam proses operasionalisasinya memerlukan suatu manajemen, yang artinya juga bahwa seluruh anggota organisasi berusaha menerapkan semua konsep manajemen yang mengarah pada perbaikan yang berkesinambunan. Untuk lebih jelasnya di sini peneliti akan menjelaskan pemahaman semua fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

2.3.1.1.PERENCANAAN (*PLANNING*)

Perencanaan merupakan proses pertama dalam memilih tujuan dan cara pencapaiannya, yang mana pengertian perencanaan adalah penyusunan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut pendapat Strickland dan Gamble dalam Hadiman (2010) menjelaskan untuk dapat menganalisis profil suatu perusahaan dapat menggunakan pendekatan analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Oppurtunity* (peluang) dan *Threat* (tantangan).

2.3.1.2.PENGORGANISASIAN (*ORGANIZING*)

Pengorganisasian merupakan tahap kedua dalam manajemen yaitu fungsi dari para manajer yang bertanggung jawab untuk merancang suatu struktur organisasi. Fungsi ini berperan untuk menetapkan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab pada siapa hingga kapan dan di mana keputusan itu akan diambil.

Dalam fungsi pengorganisasian ini manajer mengkoordinasikan sumber-sumber daya manusia dan material yang ada pada organisasi untuk diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam perencanaan. Koordinasi yang baik dan tepat akan membuat jalannya organisasi lebih efektif. Pengorganisasian ini dilakukan untuk menyeimbangkan keselarasan kinerja anggota organisasi dalam pelaksanaan tugasnya agar tercapainya tujuan organisasi.

2.3.1.3.PELAKSANAAN (ACTUATING)

Dalam fungsi pelaksanaan ini semua personel yang telah dibagi sesuai deskripsi tugasnya sebagaimana yang telah diatur oleh fungsi pengorganisasian melaksanakan perannya masing-masing sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas yang telah direncanakan. Dalam fungsi ini seorang manajer harus berperan aktif dalam mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya agar dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada organisasi dengan efektif dan efisien.

Di sini juga dituntut peran manajer dalam menciptakan kondisi dengan inovasi dan suasana yang baru, sehingga kinerja yang dilakukan oleh bawahan dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Dalam fungsi manajemen pelaksanaan merupakan komponen dasar struktur organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil analisis dari isi pekerjaan disebut deskripsi tugas (*job description*), dan untuk memudahkan memposisikan seseorang sesuai dengan bidang keilmuannya dan keahliannya maka perlu dibuat klasifikasi atau spesifikasi pekerjaan.

2.3.1.4.PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (CONTROLLING)

Dalam fungsi pengawasan dan pengendalian dalam proses manajemen ditujukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai, sejauh mana efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh karyawan, sehingga kendala dan penyimpangan yang ada dapat diinventarisir sedini mungkin untuk dapat dilakukan perbaikan.

Terry (1997) berpendapat bahwa pengawasan merupakan salah satu langkah dalam proses manajemen dan sekaligus sebagai salah satu fungsi organisasi manajemen paling penting dan paling sulit. dikatakan paling penting, karena langsung menyangkut unsur manusia dalam organisasi dengan aneka ragam karakteristik biografikal, persepsi, kepribadian, filsafat hidup, latar belakang sosial, pendidikan, kemampuan, temperamen, dan latar belakang pengalaman seseorang. Faktor-faktor tersebut membuat langkah dan fungsi penggerak menjadi sangat sulit karena sifatnya yang sangat khas berdasarkan kenyataan bahwa setiap orang merupakan individu dengan jati diri yang bersifat khas pula dalam pengawasan.

Pengendalian (*controlling*) adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan dan pengendalian mempunyai hubungan yang erat dan kedua fungsi manajemen tersebut tidak dapat dipisahkan. Tanpa tujuan dan rencana-rencana, pengendalian adalah tidak mungkin dilaksanakan, karena harus membandingkan antara rencana-rencana yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Dari penjelasan di atas, maka konsep manajemen merupakan sebuah proses yang memiliki kekhususan yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan seta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya.

2.3.2. TEORI *CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN* (CPTED) DARI RAY C, JEFFREY

Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pengamanan di suatu areal proyek usaha membutuhkan perencanaan dengan melibatkan desain lingkungan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan. McCrie (2001) mengutip pendapat Ray C. Jeffrey

(1971) yang mengatakan bahwa *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) adalah upaya pencegahan kejahatan demi menghindari terjadinya kerugian dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan desain lingkungan. Kejahatan dapat diminimalisir dengan desain lingkungan dalam manajemen pengamanan, sehingga terjadi interaksi yang baik dengan lingkungan. Frekuensi kejadian terutama kejahatan diharapkan menurun karena faktor korelatif kriminogen (FKK) dan *police hazard* (PH) yang berpotensi, dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat dilakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan.

CPTED ini memiliki empat prinsip dasar perencanaan keamanan yang meliputi :

1. Pembagian area, yang memudahkan pengawasan halaman dan lingkungan, sehingga kejadian sekecil apapun dapat dikenali atau mudah dikenali, diawasi dan menghalangi orang yang tidak berkepentingan atau seseorang yang akan masuk secara tidak sah. Diantara zona perpindahan transisi area yang satu dengan yang lainnya terdapat ruang yang termonitor dan terkendali.
2. Pengawasan lingkungan, dilakukan dengan mengamati area luar/lingkungan dari dalam dengan jelas, dan dapat dengan mudah untuk meminta bantuan bila diperlukan. Jalan, gang, dan akses area terbuka, tidak menghambat bila sewaktu-waktu diperlukan. Daerah yang tidak terjangkau dapat dimonitor dengan menggunakan CCTV dan sistem alarm.
3. Citra/image, reputasi perusahaan yang memiliki kesan bahwa lingkungan yang tertata dengan baik, terawat dan teratur serta mudah diawasi dan diamankan. Penggunaan ruang kosong diprogramkan secara efektif sesuai dengan peruntukan.
4. Lingkungan yang meliputi kawasan sekitar perusahaan, bangunan yang berdekatan, jalan-jalan, pedagang kaki lima, ruang kosong yang belum dimanfaatkan dan taman yang merupakan area yang harus diawasi dan diamankan. Sistem komunikasi dan akses jalan ke-

luar/masuk terbuka dan siap digunakan ketika memerlukan bantuan darurat. Tidak tersedianya area yang dapat menarik untuk tempat tinggal gelandangan.

Keterkaitan teori CPTED ini dengan keberadaan perusahaan adalah tentunya secara tidak langsung perusahaan telah menerapkan upaya pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan yang sudah ada. Dengan harapan apabila diantara desain lingkungan yang sudah ada akan tetapi masih sangat sederhana, dapat dibenahi lagi dan bila belum terpasang dapat dijadikan sebagai bahan masukan demi terciptanya keamanan di lingkungan Yanma Polda Metro Jaya.

2.3.3. TEORI PENCEGAHAN KEJAHATAN SITUASIONAL (SITUATIONAL CRIME PREVENTION) DARI RONALD V. CLARKE

Teori strategi pencegahan kejahatan situasional merupakan bagian dari teori strategi pencegahan kejahatan. Teori strategi pencegahan kejahatan digunakan untuk menearangkan tentang berbagai bentuk strategi pencegahan kejahatan yang diterapkan pada suatu lokasi.

Kaiser dalam Dermawan (1994) mengatakan bahwa :

Strategi pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik itu melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan, ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh-pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Kemal Dermawan (1994) mengutip pendapat beberapa ahli mengatakan terdapat tiga bentuk strategi pencegahan kejahatan, yaitu :

1. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut *social crime prevention* yang mempunyai arti segala kegiatannya bertujuan

untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran menjadi sasarannya.

2. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut dengan *situational crime prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
3. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sering disebut dengan *community based crime prevention* yang segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi aksi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Peneliti menitikberatkan pada pencegahan kejahatan melalui mengatakan bahwa :

Ruang lingkup strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional tidak hanya terbatas kepada pelaku kejahatan saja, akan tetapi juga kepada lingkungan sosial fisik dan organisasional dan mengubah cara pandang strategi pencegahan kejahatan yang pada umumnya memfokuskan diri pada pelaku kejahatan saja.

Hasil riset yang dilakukan oleh *The Home Office Unit*, yaitu departemen riset kriminologi milik pemerintah Inggris pada tahun 1960-an yang mengembangkan teori strategi pencegahan kejahatan, menunjukkan bahwa : “Perilaku kejahatan sangat tergantung pada adanya perbedaan dalam kesempatan. Selain itu, dalam pengambilan keputusan pada pemilihan target, aspek penghindaran resiko dan upaya yang dilakukan memainkan peranan penting” (Clarke, 1997). Hasil riset ini memberikan dasar bagi dilakukannya pencegahan kejahatan situasional.

Ronald V. Clarke adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori pencegahan kejahatan dengan tulisannya yang berjudul *Designing Out Crime* (1980). Clarke mengatakan bahwa strategi pencegahan kejahatan situasional adalah :

“...defined as comparing, opportunity-reducing measure that are :

1. Directed at highly specific forms of crime,
2. Involve the management, design or manipulation of the immediate environment in as systematic and permanent way as a possible.
3. Make crime more difficult and risky, or less rewarding and excusable as judged by a wide range of offender”...(hal. 4)

(“...yang didefinisikan sebagai suatu alat pengurangan kesempatan yang baik adalah :

1. Ditujukan ada jenis kejahatan yang spesifik
2. Meliputi manajemen, desain atau manipulasi dari lingkungan yang ada dengan cara yang sistematis dan sepermanen mungkin.
3. Membuat kejahatan yang lebih sulit dan lebih beresiko bila dilakukan atau kurang menguntungkan dan kurang dapat dimaafkan bila dinilai pelaku...”)

2.3.3.1. STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN

Strategi pencegahan kejahatan memiliki tiga pendekatan, yaitu pendekatan secara sosial (*Social crime prevention*), pendekatan situasional (*Situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*Community based crime prevention*).

Pendekatan yang pertama, *social crime prevention*, merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat.

Pendekatan sosial ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-laku yang berpotensi melakukan kejahatan.

Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.

Fokus utama pencegahan kejahatan dengan pendekatan sosial ini adalah kepada anak-anak dan remaja, dan juga kelompok-kelompok yang termarjinalkan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan sosial ini dapat dibagi menjadi 5 area: 1) Pencegahan kejahatan terhadap anak usia dini atau yang berada dalam masa perkembangan; 2) Pendekatan pengembangan masyarakat; 3) Pencegahan yang memiliki fokus pada lembaga-lembaga seperti sekolah dan perusahaan yang memiliki karyawan (bukan individu); 4) Pencegahan dengan cara pengalihan program untuk kelompok-kelompok yang beresiko; 5) Media dan publikasi lain yang bertujuan untuk mensosialisasikan perubahan nilai-nilai.

Pendekatan yang kedua adalah *situational crime prevention*, yang memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu: 1) Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik; 2) Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis; 3) Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku (Clarke, 1997).

Situational crime prevention pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

Pendekatan yang ketiga, *community-based crime prevention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerjasama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan.

Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat dapat meliputi: 1) *Community policing*, yaitu pendekatan kebijakan yang mempromosikan dan mendukung strategi untuk mengatasi masalah kejahatan melalui kemitraan polisi dengan masyarakat; 2) *neighborhood watch* yaitu sebuah strategi pengerahan masyarakat, di mana kelompok-kelompok dalam masyarakat mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka; 3) Pemberlakuan program-program seperti *Comprehensive Communities*, yang menggabungkan beberapa pendekatan untuk menanggapi masalah dalam masyarakat; 4) Aktivitas penegakan hukum khusus yang berhubungan dengan kejahatan

2.3.3.2. KOMPONEN DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN SITUASIONAL

Jumlah pelaku potensial adalah sebagian dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-ekonomi terlihat pada bagian atas gambar. Target, seperti mobil dan bank, adalah fungsi dari lingkungan fisik, seperti kompleks apartemen, dan aktivitas rutin, seperti sebuah rumah kosong selama hari karena bekerja. Seperti ditunjukkan dalam gambar, pengaruh subkultur seperti mengamati aktivitas kriminal oleh interaksi teman sebaya dengan faktor-faktor lain yang diperlihatkan untuk membentuk persepsi pelaku tentang risiko, upaya dan manfaat dalam struktur kesempatan. Tetapi, model ini berhenti singkat komisi kejahatan sebenarnya. (Clarke, 1997).

Komponen *kedua* Situasional pencegahan, aksi metodologi penelitian, merupakan model penelitian di mana peneliti dan praktisi bekerjasama untuk menganalisis masalah, mencoba solusi, mengevaluasi hasil, dan ulangi siklus, jika perlu, untuk mencapai hasil yang positif. Pengaruh model penelitian tindakan dapat dilihat dalam lima tahapan proyek pencegahan situasional. Mereka adalah:

1. Pengumpulan data tentang sifat dari masalah kejahatan tertentu;

2. Analisis kondisi yang memungkinkan atau memfasilitasi pelaksanaan kejahatan tersebut;
3. Studi sistematis cara yang mungkin untuk memblokir kesempatan untuk melakukan kejahatan di pertanyaan dan analisis biaya;
4. Pelaksanaan langkah-langkah terbaik;
5. Pemantauan hasil dan penyebaran informasi.

Komponen ketiga dari pendapat Clarke tentang Teori *Situational Crime Prevention* merupakan strategi pencegahan kejahatan yang ditujukan untuk satu jenis kejahatan yang spesifik dan bertujuan untuk mengubah situasi dan kondisi yang ada pada awalnya menguntungkan pelaku kejahatan menjadi kondisi yang tidak menguntungkan pelaku kejahatan. Dalam hal strategi pencegahan kejahatan pada tahun 2003, Clarke (2003) membagi 25 teknik pencegahan kejahatan yang meliputi :

1. Meningkatkan upaya (*increase the effort*), langkah-langkahnya meliputi :
 - a. Memperkuat sasaran (*target harden*) yang dapat dilakukan dengan cara mengunci pintu ruangan yang tidak digunakan, memasang teralis dan gembok.
 - b. Mengendalikan akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*)
 - c. Mengawasi pintu keluar (*screen exits*)
 - d. Menjauhkan pelaku dari target (*deflect offender*).
 - e. Mengendalikan peralatan/senjata yang digunakan pelaku (*control tools/weapons*).
2. Meningkatkan resiko (*increase the risk*), langkah-langkahnya meliputi :
 - a. Memperluas penjagaan (*extend guardianship*)
 - b. Membantu pengawasan alamiah (*assist natural surveillance*)
 - c. Mengurangi anonimitas (*reduce anonymity*)
 - d. Memberdayakan manajer lokasi (*utilize place managers*)
 - e. Memperkuat pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*)
3. Mengurangi imbalan (*reduce the rewards*), langkah-langkahnya meliputi :
 - a. Menyembunyikan target (*conceal targets*)
 - b. Memindahkan target (*remove target*).
 - c. Memberikan identitas pada benda (*identify property*).
 - d. Mengganggu pasar (*disrupt markets*)
 - e. Mencegah keuntungan yang akan diperoleh pelaku (*deny benefits*)
4. Mengurangi provokasi (*reduce provocation*), langkah-langkahnya meliputi :

- a. Mengurangi frustrasi dan stress (*reduce frustrations dan stress*)
 - b. Mencegah munculnya pertengkaran (*avoid disputes*)
 - c. Mengurangi rangsangan emosional (*reduce emotional arousal*)
 - d. Menetralkan tekanan rekan (*neutralize peer pressure*)
 - e. Mencegah imitasi (*discourage imitation*)
5. Menghilangkan alasan (*remove excuses*), langkah-langkahnya meliputi :
- a. Membuat aturan (*set rules*)
 - b. Menempatkan rambu-rambu larangan maupun perintah (*post instruction*)
 - c. Meningkatkan kewaspadaan (*alert conscience*)
 - d. Meningkatkan kesadaran orang untuk patuh (*assist compliance*)
 - e. Mengendalikan peredaran narkoba dan alkohol (*controlling drugs and alcohol*)

Sebagian besar masyarakat dan bisnis saat ini, tentang usaha mengurangi kesempatan untuk kejahatan tanpa sadar berpikir tentang hal itu. Namun, jika pemerintah dan bisnis serta polisi mengambil pendekatan, agresif terintegrasi dengan pencegahan kejahatan, dapat dibayangkan bahwa beberapa jenis kejahatan dapat hampir dihilangkan dan tingkat kejahatan keseluruhan dapat diturunkan.

Dalam *American Society of Criminology* tugas laporan ke Jaksa Agung Amerika Serikat Janet Reno, Dr Clarke dan lain-lain mengusulkan pembentukan Departemen Federal Pencegahan Kejahatan dan Pencegahan Kejahatan *Extension Service*. Departemen pencegahan kejahatan akan dimodelkan pada departemen yang ada di negara-negara Eropa dan akan memulai kegiatan untuk "desain dari kejahatan" di tingkat nasional. Layanan penyuluhan akan dianalogikan ke layanan penyuluhan pertanian dengan tujuan memberikan saran ahli pencegahan kejahatan untuk usaha kecil dan masyarakat lokal. Layanan ini akan melengkapi upaya polisi. (Clarke, dkk., 1998)

"Semua teori kejahatan juga teori pencegahan kejahatan mereka berbeda hanya dalam skala perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu." (Pease, 1994: 660). Pilihan teori pencegahan kejahatan situasional yang menarik dari sudut pandang kebijakan karena pencegahan kejahatan telah manfaat langsung kepada masyarakat sebagai kontras dengan program-program seperti *Operation Head Start* yang

jika berhasil, dapat mengambil 10 sampai 20 tahun untuk manfaat melampaui pengeluaran. Selain itu, di Kanada telah diperkirakan bahwa untuk setiap pencurian dicegah yang akan pergi melalui sistem peradilan pidana keseluruhan sampai ke penjara, tabungan kepada masyarakat mendekati \$ 160,000.00 tabungan serupa dapat diharapkan di Amerika Serikat. (Clarke, dkk., 1998)

Literatur yang diterbitkan berisi beberapa cerita keberhasilan pencegahan kejahatan situasional. Beberapa contoh adalah:

1. Pengurangan substansial dalam pembajakan pesawat pada 1970-an dicapai dengan skrining bagasi dan tindakan bandara lainnya;
2. Penurunan pencurian dari tempat parkir karena pengawasan;
3. Sangat berkurang mengutil buku dan perpustakaan sebagai hasil dari penandaan barang elektronik, dan;
4. Pengurangan pencurian radio mobil yang beroperasi hanya dengan pengetahuan tentang PIN. (Clarke, dkk., 1998)

Tidak semua tindakan pencegahan telah berhasil. Salah satu contoh adalah tanda-tanda dirancang untuk memperingatkan pencopet. Orang-orang akan memeriksa kantong mereka setelah membaca tanda-tanda sementara pencopet menonton. Ini memperingatkan mereka untuk mana orang-orang dan kantong untuk menargetkan. Namun, mengukur efektivitas langkah-langkah pencegahan, komponen keempat pencegahan kejahatan situasional, adalah bagian penting dari proses. (Clarke, 1997)

BAB 3 METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan ilmiah yang pada hakekatnya berawal dari minat untuk mengetahui gejala tertentu. Selanjutnya berhubungan dan berkembang menjadi gagasan teori, konseptualisasi yang pada akhirnya menentukan metode penelitian yang sesuai. Senada dengan ini menurut Cooper dan Emory, penelitian merupakan suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah (Cooper & Emory, 1995). Suparmoko menjelaskan bahwa penelitian adalah usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia (Suparmoko, 1991). Mirip dengan pengertian di atas, Dane (1990: 4) menyarankan definisi sebagai berikut: penelitian merupakan proses kritis untuk mengajukan pertanyaan dan berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang fakta dunia.

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN

Secara umum pendekatan penelitian atau sering juga disebut paradigma penelitian yang cukup dominan dan sering digunakan oleh para peneliti saat ini adalah paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menyajikan penulisan tesis dengan judul “Alternatif Solusi Manajemen Pengamanan Markas Kepolisian oleh Yanma Polda Metro Jaya”. dari judul yang diangkat maka setelah melakukan serangkaian pertimbangan maka peneliti memilih metode penelitian kualitatif. Secara umum pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan kualitatif memfokuskan pada prinsip-prinsip dasar dari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Yang menjadi obyek analisisnya bukanlah variabel-variabel, akan tetapi lebih cenderung pada prinsip-prinsip umum dengan satuan-satuan gejala lainnya dengan menggunakan kebudayaan komunitas yang bersangkutan sebagai sebuah kesatuan

yang menyeluruh. Moleong (2004) mengatakan bahwa penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran dan untuk lebih membenarkan kebenaran. Metode penelitian ini dipilih oleh penulis karena beberapa pertimbangan, antara lain seperti apa yang disampaikan oleh Moleong (2004) yaitu :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah, apabila dengan kenyataan jamak
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan sumber informasi
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajam pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan cara pandang yang dilakukan dengan melihat aspek manajemen dan kriminologi. Maka sebelumnya peneliti akan menjelaskan beberapa pendapat para ahli mengenai penelitian kualitatif ini.

Menurut Suparlan (1994) menyatakan bahwa :

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganalisa tentang gejala-gejala social dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan, makna tindakan dari kejadian orang yang ingin dipahami, yang terekspresikan secara langsung dalam bahasa yang diterima dan disampaikan secara tidak langsung, kemudian dianalisa dengan teori yang obyektif.

Ahli lain seperti Creswell (2002) mengemukakan bahwa definisi penelitian kualitatif adalah Sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah social atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengamatan terlibat karena secara kebetulan peneliti saat melakukan penelitian ini sedang bertugas di Yanma Polda Metro Jaya. Pengamatan terlibat dilaksanakan peneliti dengan cara ikut mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan pengamanan markas Polda Metro jaya,

pengamatan ini dilakukan secara terbuka, karena selain sebagai personel Yanma peneliti juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini peneliti sekaligus melakukan penelitian guna penulisan tesis sebagai mahasiswa KIK UI.

Dalam materi perkuliahan tentang Metode penelitian sosial yang dikeluarkan oleh FISIP Universitas Indonesia, penelitian kualitatif memiliki karakteristik pokok, yaitu ;

1. Melandaskan pemahaman akan realitas/gejala sosial berdasarkan konteksnya.
2. Menekankan pada kajian kasus, dalam upaya memahami gejala secara utuh (*holistic approach*), sehingga subyek yang diteliti dianggap unik dan khas.
3. Menuntut integritas peneliti mengingat peneliti adalah instrumen pokok penelitian.
4. Integritas ini menyangkut isu : (a) ada tidaknya keberpihakan/bias peneliti, (b) akurasi data, terkait dengan pentingnya peneliti melakukan klarifikasi data (*cross checking data*).
5. Membangun teori dari bawah (*grounded theory*), dengan metode perbandingan.
6. Menjelaskan dan memahami gejala dengan penekanan pada proses dan jalinan peristiwa, bahwa satu peristiwa dijelaskan dengan peristiwa lainnya, salah satunya melalui metode kronologi peristiwa.
7. Mengintepretasikan data adalah menerjemahkan data dengan memaknainya secara signifikan dan kohern dengan merujuk pada cara pandang subyek yang dikaji.

3.2. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah jenis deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sukmadinata (2006) yang dimaksud jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menginteprestasikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, baik dalam bentuk

aktifitas, karakteristik, perubahan hubungan kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain.

3.3. DATA PRIMER DAN DATA SEKUNDER

Data primer yang didapat peneliti dalam penelitian ini adalah yang didapat langsung dari sumbernya baik bersumber dari para sumber informasi atau informan dan para responden yang ditemui oleh peneliti dengan cara wawancara mendalam yang dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Data primer lainnya yang diperoleh berdasarkan pengamatan terlibat yang dilakukan peneliti yang mana kebetulan saat ini peneliti bertugas di Yanma Polda Metro jaya, sehingga peneliti dapat merasakan langsung gejala-gejala serta fenomena sosial dalam penerapan manajemen pengamanan yang diterapkan oleh Yanma Polda Metro Jaya, melalui dialog-dialog serta diskusi singkat pada kesehari-hariannya peneliti saat bertugas di Yanma Polda Metro jaya.

Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung yaitu bersumber dari data-data serta dokumen-dokumen yang didapat peneliti baik dari Urmin Yanma sebagai bagian yang mengurus urusan administrasi Yanma Polda Metro jaya, maupun dari beberapa literatur tertulis penelitian sebelumnya yang membahas tentang permasalahan yang hampir sama, serta beberapa literatur konseptual yang didapat peneliti dari peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dan juga literatur tertulis lainnya seperti buku, artikel surat kabar, majalah, ataupun berita internet dan lain-lain.

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari wawancara, pengamatan terlibat (*Participant Observation*) dan pengumpulan dokumen. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara

mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Bungin (2007) mengemukakan bahwa beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.

Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Atau dalam kata lain pengamatan partisipasi ini sering juga disebut dengan pengamatan terlibat. Karena peneliti turut serta secara langsung dalam subyek penelitian sebagai instrument penelitian, maka peneliti dapat merasakan setiap gejala-gejala yang berkaitan dengan fokus penelitian. Ahli lain Suparlan (2007) menerangkan bahwa :

Pengamatan terlibat adalah suatu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat, memahami gejala-gejala yang diamati maupun dirasakan, berdiskusi, mendengarkan penjelasan –penjelasan yang disampaikan oleh masyarakat yang diteliti. Metode wawancara dengan pedoman adalah suatu teknik pengumpulan informasi dari masyarakat mengenai suatu

masalah khusus dengan teknik bertanya secara bebas untuk memperoleh informasi dan respon

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang didokumentasikan baik berbentuk *soft copy* maupun *hard copy* disebut “dokumen”. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cinderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan *flashdisk*, data tersimpan di website, dan lain-lain.

3.5. TEKNIK ANALISA DATA

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan data dan cara-cara yang ditempuh oleh peneliti guna menguji tingkat kredibilitas penelitian yang dilakukan dengan cara : a) perpanjangan masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri; b) Pengamatan yang terus menerus, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci; dan c) Triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Selain validitas dan kredibilitas peneliti, maka penting juga untuk memperhatikan aspek reliabilitas data. Reliabilitas penelitian kualitatif dipengaruhi oleh definisi konsep yaitu suatu konsep dan definisi yang dirumuskan berbeda-beda menurut pengetahuan peneliti, metode pengumpulan dan analisis data, situasi dan kondisi sosial, status dan kedudukan peneliti di hadapan responden, serta hubungan peneliti dengan responden.

3.6. KENDALA DALAM PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini peneliti merasakan menemui beberapa kendala antara lain adalah keterbatasan waktu yang ada di dalam melakukan penelitian karena di samping tugas pokok yang dilakukan peneliti pada saat meneliti sebagai anggota Satuan Jatanras di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang mempunyai intensitas pekerjaan yang cukup tinggi, peneliti juga mendapatkan tugas tambahan sebagai tim Penyidik Independen yang menangani kasus pidana perpajakan yang melibatkan tersangka Gayus Tambunan, dkk sehingga hampir tidak memiliki ketersediaan waktu dalam melakukan penelitian.

Kendala lainnya adalah dari ketersediaan waktu yang dimiliki peneliti mengalami pergantian judul sampai dua kali mengingat fenomena yang ditemukan penyidik saat melakukan penelitian tidak sesuai dengan harapan dan tujuan penyidik yang mana ada suatu hal yang sangat fundamental dalam penelitian ini selain sebagai alasan akademis, peneliti juga ingin memberikan suatu kontribusi yang berguna dalam menyusun atau memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap kekhawatiran peneliti terhadap keamanan peneliti dan polisi lainnya dalam melaksanakan tugas. Di kantor Polda Metro Jaya, yang mana sebenarnya sebagai seorang reserse hampir 2/3 waktu kita perhari dihabiskan di kantor untuk itu kiranya perlu ada suatu penerapan manajemen pengamanan yang baik sehingga dapat terhindar dari permasalahan yang dapat timbul . Pada pertengahan penelitian peneliti mendapat mutasi di Yanma Polda Metro Jaya, disinilah peneliti merasa lebih tertantang untuk dapat memberikan suatu buah pikir dari masalah pengamanan ini karena di salah satu tugas Yanma menyebutkan bahwa Yanma

bertanggung jawab untuk masalah penjagaan dan pengamanan markas, sehingga disini peneliti menemukan suatu fenomena yang cocok dengan tujuan awal peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu Yanma juga bertanggung jawab untuk pengamanan pejabat, dalam hal ini adalah para pejabat Polda Metro Jaya. Disinilah poin pentingnya tugas Yanma sebagai unsur pelayanan yang bertugas mengamankan markas dan pejabat yang berkantor di markas tersebut.

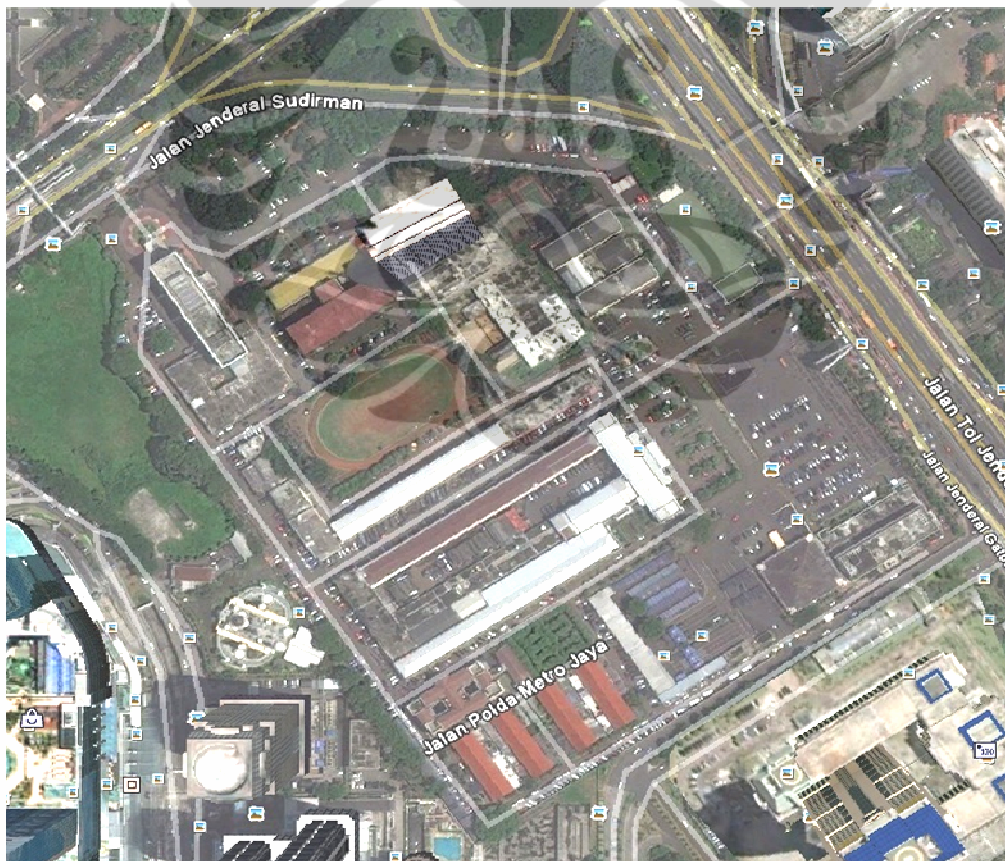
Kendala lain yang dirasakan oleh peneliti adalah saat melakukan pengumpulan data dan wawancara dalam menggali informasi tentang bahan penelitian ini adalah adanya sikap pesimistis oleh para personel yang ada di Yanma karena merasa bahwa Yanma ini adalah tempat buangan di setiap markas kepolisian, yang mana anggapan ini menjadikan Yanma bukanlah tempat favorit bagi anggota kepolisian untuk berdinamika, sehingga rasa ini menimbulkan sikap yang apatis terhadap pelaksanaan tugasnya sehingga dirasa menjadi suatu budaya yang negatif di kantor tersebut, sehingga jawaban-jawaban yang diberikan saat peneliti menggali informasi di sini sering seadanya dan terkadang terkesan tidak adanya kepedulian. Hal ini dapat kita sadari sebagai sikap yang kurang baik, bagaimana ia dapat menjalankan tugasnya dalam mengamankan markas kepolisian ini, sedangkan para personil yang mengawakinya adalah orang-orang yang merasa terbuang dan diabaikan. Oleh sebab peneliti melakukan upaya yang cukup keras dan butuh waktu selama lebih 2 bulan dalam melakukan penelitian di Yanma ini.

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM POLDA METRO JAYA

Setelah peneliti melakukan pengamatan selama lebih 2 bulan tentang gambaran situasi secara umum di Polda Metro Jaya maka peneliti mencoba mendeskripsikan situasi dan kondisi Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya adalah suatu satuan pelaksana utama yang berada di bawah Mabes Polri yang berkedudukan dan bertanggung jawab pada wilayah di ibukota Negara Republik Indonesia yaitu DKI Jakarta yang mempunyai wilayah hukum seluruh kota Jakarta, sebagian wilayah administratif di Propinsi Jawa Barat (Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok), dan dua wilayah administratif propinsi Banten (Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang).



Gambar 4.1 : Lay out Polda Metro Jaya

Sumber : Data sekunder dari www.googlemap.com diakses 15 April 2011

Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman no. 56 Jakarta Selatan dan untuk dapat memasuki Polda Metro Jaya dapat diakses dari beberapa alternatif jalan yaitu dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jembatan Semanggi, kemudian melalui jalan Tol Gatot Subroto baik dari arah Grogol maupun Cawang turun di pintu Tol Semanggi Senayan, lalu berputar di jembatan Semanggi lalu turun melewati jalan Sudirman, masuk kawasan SCBD dan keluar arah jalan Gatot Subroto dan tepatnya disebelah Kantor Pusat Bank Mandiri, kita dapat menemukan pintu masuk yang selalu digunakan untuk memasuki Polda Metro Jaya yaitu dari depan (Jl. Jend.Sudirman) dan samping (Jl. Gatot Subroto). namun pintu masuk samping ini hanya dapat diakses sampai pukul 17.00 wib, karena setelah itu untuk memasuki Polda Metro Jaya dapat diakses melalui pintu belakang tepatnya di jalan Gatot Subroto. Sebenarnya masih ada satu lagi pintu masuk yang dapat diakses untuk masuk ke Polda Metro Jaya yaitu di jalan Jenderal Sudirman namun untuk pintu ini hanya dapat diakses oleh Pejabat Utama serta tamu VVIP saja.

Seluruh pintu masuk Polda Metro Jaya selalu dijaga oleh aparat keamanan yang dilakukan oleh Samapta Polda, Bid Propam serta diperkuat oleh Sat Brimob Polda Metro Jaya. Setelah melewati pintu masuk maka gedung pertama yang kita temukan adalah gedung Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya, dan langsung dapat melihat gedung yang ke arah utara dapat kita lihat gedung Biro Sumber Daya Manusia, di sebelah kanan kita dapat melihat lapangan yang digunakan untuk parkir masyarakat yang mengurus surat-surat kendaraan di Ditlantas Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya memberlakukan jalan satu arah untuk menghindari kesemrawutan kendaraan yang melewati jalanan Polda maka setelah melihat gedung Biro SDM maka kita berbelok ke arah kiri melewati kantor Provos, Yanma, Telematika dan lainnya. Tepat di ujung jalan tersebut kita akan menemukan simpang tiga yang apabila kita berbelok ke kiri untuk menuju kantor Resmob yang merupakan bagian dari Dit Reskrim dan Dit Narkoba PMJ, di depannya dapat kita lihat sebuah Bangunan Masjid yang begitu megahnya dengan desain yang menyerupai Masjid Timur Tengah. Menyusuri jalan menuju utara

dapat kita temui gedung utama yang digunakan oleh pimpinan Polda berkantor, pada gedung ini juga mempunyai fungsi yang sangat penting karena di lantai dasar gedung ini terdapat Rumah Tahanan Polri, sehingga menjadikan gedung ini merupakan salah satu gedung vital yang ada di Polda Metro Jaya. Di gedung ini terdapat beberapa bidang, biro serta direktorat yang merupakan sub struktural dari Polda Metro Jaya, melalui jalan di belakang gedung utama ini di sebelah kanan dapat kita lihat sebuah lapangan sepak bola yang digunakan oleh anggota Polda Metro Jaya untuk sesekali bermain bola dan melakukan test kesamaptaan jasmani.

Berbelok ke kiri maka kita lihat dapat menjumpai gedung berlantai enam warna abu-abu dimana gedung ini sebagai gedung utama tempat pimpinan Polda yaitu Kapolda berkantor, selain Kapolda beberapa pejabat utama lainnya juga berkantor di gedung ini, tepat di sebelah kanan gedung utama ini dapat kita lihat gedung berlantai dua yaitu gedung Direktorat Kriminal Khusus, lalu terus ke arah selatan dapat kita temui SPBU milik Polda Metro Jaya yang. Selanjutnya menuju pintu keluar Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 56 Jakarta Selatan. Luas wilayah Markas Komando Kepolisian ini adalah sekitar 774.096 M² sehingga luas bangunan secara keseluruhan adalah sekitar 73.477 M², areal ini terletak di antara perkantoran. Selain kantor, juga terdapat beberapa perusahaan dan tempat hunian apartemen. Pada bagian depan dan belakang markas komando ini terdapat jalan besar yang juga merupakan jalan protokol utama

Denah markas Polda Metro Jaya pada gambar 4.1 dapat digambarkan sebagai berikut, secara umum tidak ada perubahan yang mendasar tetapi ada penambahan beberapa gedung baru yang terdapat di sebelah gedung Dit Reskrimsus yaitu gedung yang akan diperuntukkan sebelumnya untuk Detasemen Khusus Anti terror 88, namun karena pada proses pembangunannya terjadi perubahan struktural dalam Detasemen ini maka untuk lebih lanjut akan diatur pelaksanaannya oleh pimpinan puncak dalam hal ini Kapolda.

Dari pengamatan peneliti beberapa gedung perkantoran dan tempat parkir umum kendaraan R2 maupun R4, yang berada di gedung maupun ruangan yang rawan

terhadap ancaman keamanan yang merupakan aset Polda Metro Jaya sebagai salah satu objek vital negara yang harus dilindungi. Aset yang harus dilindungi tersebut antara lain :

1) Gedung Kantor

Di dalam gedung kantor yang berada di lokasi markas Polda Metro Jaya terdapat ruangan kantor masing-masing satuan kerja seperti Biro, Direktorat dan staf lainnya pada gedung ini terdapat data/file dan dokumen penting yang menjadi rahasia negara.

2) Gedung utama tempat dimana terdapat ruangan kerja unsur pimpinan Polda Metro dan wakilnya.

3) Gedung Samsat wilayah Jakarta Selatan pada gedung ini terdapat file/dokumen penting dan berharga tentang kelengkapan administrasi kendaraan bermotor.

4) Gudang Senjata. Gedung ini merupakan tempat penyimpanan senjata api berikut peluru.

5) Gedung tempat rumah tahanan (rutan) pelaku tindak pidana.

6) Alutsista yang berupa kendaraan dinas Polri.

7) Gedung balai pertemuan dan lapangan parkir di sekitar tersebut.

8) Gedung TMC (Traffic Manajement Centre) terdapat berbagai informasi dengan teknologi canggih.

9) Gedung proyek pembangunan Detasemen 88 yang sedang dalam proses penyelesaian pembangunannya.

10) Perumahan Pejabat Utama Polda Metro Jaya.

11) Mess TMC yang dipergunakan anggota untuk keperluan dinas.

12) Masjid Al – Kautsar yang berdiri megah dan indah.

- 13) Lapangan olah raga
- 14) Luas areal Markas Polda Metro Jaya sekitar 774.096 M².

Polda Metro Jaya mempunyai motto “pelayanan, profesional, proporsional, dan humanis”. Berdasarkan *overview* Polda Metro Jaya tahun 2010, situasi kamtibmas di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya selama tahun 2010 dinyatakan cukup kondusif. Di bidang ekonomi dapat digambarkan situasi perekonomian di wilayah Jakarta Raya mengalami peningkatan, walaupun beberapa masalah krisis ekonomi masih terasa di beberapa sektor namun tidak mempengaruhi secara signifikan situasi dan kondisi kamtibmas di Jakarta. Di dalam bidang sosial budaya, beberapa aktifitas masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta, seperti perkelahian antar warga, antar kelompok pemuda dan ormas yang ada, yang walaupun beberapa diantaranya di tumpangi oleh isu SARA namun secara umum dapat ditangani dengan baik oleh Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya merupakan barometer Polda yang ada di seluruh Indonesia, selain dinamika kejahatan yang terjadi, dinamika pertumbuhan penduduk di Jakarta juga menjadi perhatian serius karena hal tersebut mempengaruhi beban tantangan tugas Polda Metro Jaya untuk selalu meningkatkan pelayanannya pada masyarakat. Untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat, Polda Metro Jaya dalam setiap pelaksanaan tugasnya berpedoman pada grand strategy polri, yang dirumuskan dalam tiga tahapan yang menggambarkan seluruh upaya polri secara gradual dan komprehensif, pentahapan itu terdiri dari, tahap I *TRUST BUILDING* (membangun kepercayaan), tahap II yaitu *PARTNERSHIP BUILDING* (membangun kemitraan) yang saat ini sedang digalakkan oleh polri. Dan tahap terakhir yaitu tahap III *STRIVE FOR EXCELLENT* yaitu membangun kemampuan-kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat.

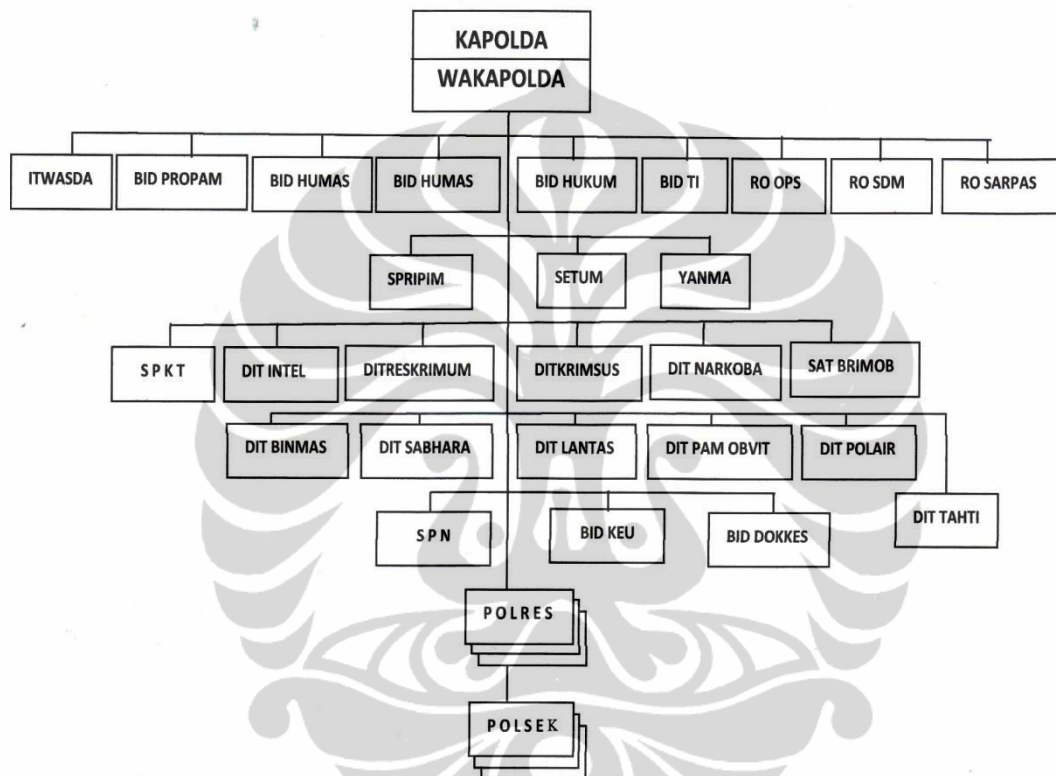
Bertolak dari *Grand Strategy* Polri tersebut, maka Polda Metro Jaya dalam menyongsong tujuannya menetapkan visi, misi dan sasaran prioritas pada tahun 2011 yaitu tergelarnya Polisi yang dipercaya masyarakat di semua titik dan lini

pelayanan masyarakat disepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan diwilayah hukum Polda Metro Jaya dan tegaknya hukum sebagai sinergi pencapaian hasil pembangunan yang berwawasan keamanan.”

Berdasarkan visi di atas, maka Polda Metro Jaya merancang misi kepolisian yang terdiri dari : 1) Perkuat dan tingkatkan kemampuan intelijen keamanan Polda Metro Jaya guna menjangring informasi untuk mencegah gangguan keamanan dan pengungkapan kasus secara sistematis dan tuntas; 2) Kembangkan pelayanan publik di setiap lini berbasis pelayanan prima; 3) Menggelar polisi sebanyak-banyaknya di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat; 4) Kembangkan falsafah dan strategi perpolisian masyarakat (polmas) dalam bangun hubungan polisi dan masyarakat yang lebih dekat dan interaktif dalam upaya wujudkan masyarakat patuh hukum; 5) Berdayakan seluruh kekuatan dan kemampuan organisasi pengemban fungsi lidik dan sidik dalam wujudkan polri sebagai penegak hukum yang terdepan; 6) Tingkatkan kinerja Polda Metro Jaya secara profesional, transparan dan akuntabel guna dukung tupoksi polri.

Setelah visi dan misi ditentukan, maka kepolisian Polda Metro Jaya merumuskan sasaran prioritas yang terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran yaitu 1) Terwujudnya kondisi kamtibmas wilayah hukum Polda Metro Jaya yang kondusif ; 2) Lanjutkan pembangunan sarana dan prasarana; 3) Tingkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan personel Polda Metro Jaya; 4) Melaksanakan pembinaan personel polri; 5) Tertanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui giat preventif dan represif; 6) Tertanggulangnya kejahatan transnasional (*trafficking in person* dan *people smuggling*); 7) Terealisasinya program perpolisian masyarakat (polmas) untuk tingkatkan kemitraan dan kepatuhan hukum masyarakat; 8) Terpeliharanya kamtibmas perairan dan tertanganinya segala bentuk kejahatan di perairan yuridiksi Polda Metro Jaya; 9) Tertanganinya perkara-perkara korupsi; 10) Penanganan bencana banjir; 11) Meningkatkan pencapaian *quick wins*; 12) Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman dan bebas dari premanisme, kejahatan jalanan, (*street crime*) dan perjudian dan ; 13) Tingkatkan kualitas peserta pendidikan polri (bintara)

Polda Metro jaya membawahi 13 Polres Metropolitan, 109 Polsek, Jumlah personel yang bertugas dilingkup polda Metro jaya tahun 2010 terdiri dari 30.909 orang anggota Polri, 501 orang PNS, dan 22 orang calon pegawai. Jumlah penduduk di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebanyak 23.474.841, sehingga perbandingan anggota Polri dengan masyarakat yang dilayani di propinsi DKI Jakarta adalah 1 : 672 orang .(overview PMJ, 2010).



Gambar 4.2 : Struktur organisasi Polda Metro Jaya
Sumber : Data sekunder Biro SDM Polda Metro Jaya Tahun 2011

Mengingat begitu luasnya wilayah yang menjadi kewenangan hukum yang berada di bawah naungan Polda Metro Jaya dan keberagaman etnis masyarakat yang ada, maka Polda Metro Jaya mempunyai karakteristik khusus berkaitan dengan struktur organisasi yang dimiliki. Kekhususan karakteristik ini menjadi struktur organisasi Polda Metro Jaya berbeda dibanding dengan Polda lainnya di Indonesia. Berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol : Kep/7/I/ 2005 tanggal 3 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Metro Jaya masuk dalam kategori tipe A 1 – khusus yang dipimpin Kapolda yang berpangkat Inspektur

Jenderal Polisi (Irjen Pol). Struktur organisasi Polda Metro jaya berdasarkan Keputusan Kapolri, yaitu :

1. Organisasi polda Metro Jaya disusun dalam dua tingkat , yaitu :
 - a. Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro jaya.
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort.
2. Susunan organisasi Mapolda Metro Jaya, terdiri atas ;
 - a. Unsur pimpinan, yaitu :
 - 1) Kepala Polda Metro Jaya
 - 2) Wakil Kepala Polda Metro Jaya
 - b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan , terdiri atas :
 - 1) Inspektorat Pengawasan Daerah
 - 2) Biro Operasi
 - 3) Biro Perencanaan dan Anggaran
 - 4) Biro Sumber Daya Manusia
 - 5) Biro Sarana dan prasarana
 - 6) Bidang Profesi dan Pengamanan
 - 7) Bidang Hukum
 - 8) Bidang Hubungan Masyarakat
 - 9) Bidang Telekomunikasi Informasi Polri
 - 10) Staf Pribadi pimpinan
 - 11) Sekretariat Umum
 - 12) Pelayanan Markas

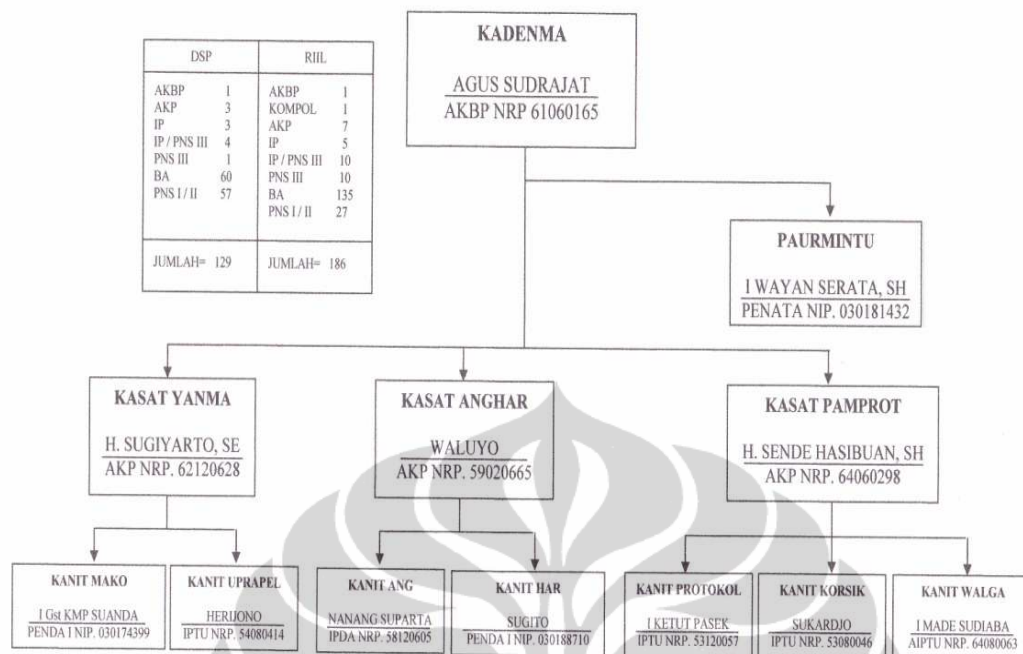
c. Unsur Pelaksana tugas pokok, terdiri atas :

- 1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
- 2) Direktorat Intelijen Keamanan
- 3) Direktorat Kriminal Umum
- 4) Direktorat Kriminal Khusus
- 5) Direktorat Reserse Narkotika
- 6) Direktorat Pembinaan Masyarakat
- 7) Direktorat Sabhara
- 8) Direktorat Lalu Lintas
- 9) Direktorat Pengamanan Obyek Vital
- 10) Direktorat Kepolisian Perairan
- 11) Direktorat tahanan dan Barang Bukti
- 12) Satuan Brigadir Mobil

d. Unsur Pendukung, yang terdiri dari :

- 1) Sekolah Polisi Negara,
- 2) Bidang keuangan
- 3) Bidang Kedokteran Kesehatan

e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan yang terdiri dari Polrestro polrestro jajaran Polda Metro Jaya.



Gambar 4.3 : Struktur organisasi Yanma Polda Metro Jaya
Sumber : Data sekunder urmin Yanma Tahun 2011

Sesuai dengan konsep metropolitan, terdapat beberapa Polres secara administratif pemerintahan berada dalam wilayah propinsi lain di luar propinsi DKI Jakarta namun masuk dalam lingkup tugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polres Metro Bekasi dan Polres kabupaten Bekasi, merupakan Polres dalam wilayah propinsi Jawa Barat.

Di propinsi lainnya seperti Banten juga terdapat beberapa Polres seperti Polres Metro Bandara Soekarno Hatta, Polres Metro Tangerang dan Polres kabupaten Tangerang. Dalam kegiatan operasionalnya maka Polda Metro Jaya didukung oleh Polresto-Polresto di wilayah hukum Jakarta Raya, meliputi ; Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Tangerang, Polres Tangerang, Polres Metro Bekasi, Polres Bekasi, Polres Metro Depok, Polres Metro Bandara Soekarno Hatta, Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok dan Polres Kepulauan Seribu.

4.1.1 SITUASI PELAYANAN MARKAS (YANMA) POLDA METRO JAYA

Pelayanan Markas yang disingkat Yanma sebagaimana diatur dalam susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah yang tertuang dalam PERKAP NO : 22 tahun 2010 adalah unsur pelayanan pada tingkat polda yang berada dibawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan/pengamanan markas, dan urusan dalam dilingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugasnya Yanman menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian bimbingan dan arahan teknis pelaksanaan pelayanan markas atau kantor kepada penyelenggara urusan dalam pada semua satker dilingkungan Polda
2. Pembinaan, pengadministrasian, perencanaan program dan anggaran, pelayanan peñatausahaan material logistic dilingkungan Yanma serta pengatura perumahan dilingkungan polda
3. Pelayanan markas, fasilitas perkantoran, dukungan komunikasi, dan elektronika markas serta pemakaman dilingkungan polda.
4. Pelayanan angkutan personil dan pejabat serta pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan dilingkungan polda
5. Pemeliharaan fasilitas umum perkantoran dan perumahan dilingkungan polda.
6. Pengamanan markas, pejabat kegiatan protokoler, upacara, dan rapat-rapat pimpinan.
7. Pembinaan korps musik polda , dan
8. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi.

Pelayanan Markas atau yang disingkat Yanma dipimpin oleh KaYanma yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wakapolda, Yanma terdiri dari :

- a. Subbagian pelayanan kantor atau yang disingkat Subbag Yantor
- b. Subbagian pemeliharaan bangunan dan lingkungan yang disingkat subbag Harbangling
- c. Subbagian Pengamanan dan pembinaan musik yang disingkat Subbag Pamsik.
- d. Urusan perencanaan dan administrasi yang disingkat Ur Renmin

Subbag Yantor sebagaimana dimaksud bertugas menyelenggarakan pelayanan markas yang bersifat umum, fasilitas markas dan perkantoran di lingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugas Subbag Yantor menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengadministrasian dan pembinaan personel di lingkungan Yanma; dan
- 2) Pelayanan fasilitas kantor dan peralatan, serta persiapan kegiatan protokoler di lingkungan Polda.

Dalam melaksanakan tugas Subbag Yantor dibantu oleh:

- 1) Urusan Pelayanan Umum (Uryanum), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pembinaan personel di lingkungan Yanma;
- 2) Urusan Fasilitas Kantor (Urfastor), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan fasilitas kantor, peralatan dan protokoler, antara lain untuk upacara, rapat, dan pemakaman di lingkungan Polda.

Subbag Harbangling bertugas menyelenggarakan pemeliharaan bangunan dan lingkungan termasuk kantor dan perumahan dinas di lingkungan Polda, dalam melaksanakan tugas Subbag Harbangling menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemeliharaan fasilitas perkantoran dan perumahan di lingkungan Polda dan;
- 2) Pemeliharaan bangunan milik Polda dan lingkungan sekitarnya.

Dalam melaksanakan tugas Subbagharbangling dibantu oleh :

- 1) Urusan Pemeliharaan Barang (Urharbang), yang bertugas memelihara dan merawat fasilitas umum perkantoran dan perumahan dan;
- 2) Urusan Pemeliharaan Lingkungan (Urharling), yang bertugas memelihara dan merawat bangunan kantor, mess, asrama, rumah jabatan, lingkungan kantor, pertamanan, dan kebersihan di lingkungan Polda.

Subbag Pamsik bertugas menyelenggarakan pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pejabat, serta pembinaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda, dalam melaksanakan tugas Subbagpamsik menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelayanan protokoler dan pengamanan markas serta pejabat di lingkungan Polda dan;
- 2) Pembinaan dan pelayanan musik.

Dalam melaksanakan tugas Subbag Pamsik dibantu oleh:

- 1) Urusan Pengamanan dan Protokoler (Urpamprot), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan protokoler, pengamanan markas, dan pengamanan pejabat di lingkungan Polda dan;

- 2) Urusan Musik (Ursik) yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda.

Ur Renmin bertugas menyelenggarakan pembinaan, administrasi, perencanaan program dan anggaran, pelayanan ketatausahaan dan materiil logistik, pengaturan pemondokan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Yanma, dalam melaksanakan tugas Urrenmin menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel dan anggaran;
- 2) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- 3) Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- 4) Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
- 5) Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam dan;
- 6) Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas Ur Renmin dibantu oleh Perwira:

- 1) Perencanaan, bertugas menyusun perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, LAKIP Satker, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran serta pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan Yanma di lingkungan Polda;

- 2) Administrasi, yang bertugas membantu menyelenggarakan pelayanan administrasi, pemeliharaan, perawatan dan pembinaan personel dan logistik di lingkungan Yanma;
- 3) Keuangan (Keu) yang bertugas membantu menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Yanma dan;
- 4) Tata Usaha yang bertugas menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Yanma Polda Metro Jaya.

4.1.2 POTENSI ANCAMAN DI MARKAS POLDA METRO JAYA

Dalam melakukan pengamanan dari berbagai ancaman yang dapat terjadi terhadap aset-aset negara yang terdapat di dalam lingkungan markas Polda Metro Jaya, dalam hal ini Kapolda melalui Kayanma selalu berusaha untuk meminimalisir segala bentuk ancaman, baik yang berasal dari alam, teknologi maupun manusia.

Ancaman dari alam antara lain banjir, kebakaran, gempa bumi dan lain – lain, sedangkan ancaman yang berasal dari penggunaan teknologi antara lain seperti adanya polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor di lingkungan perkotaan disekitar Markas Polda Metro Jaya dan berbagai akibat yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi lainnya.

Adapun Ancaman yang berasal dari manusia dapat dibagi menjadi 2 faktor yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Ancaman yang berasal dari faktor internal yang berada di lingkungan Markas Polda Metro Jaya dapat dicontohkan berupa pencurian kendaraan bermotor, pencurian dokumen penting/berharga serta dokumen rahasia milik negara, penggelapan terhadap aset yang telah diinventarisasi kepada Polda Metro Jaya berupa senjata api, tahanan yang melarikan diri dan tindak kejahatan lain yang dilakukan oleh internal anggota Polda Metro Jaya, sedangkan ancaman faktor eksternal dari luar lingkungan institusi Polri dapat dicontohkan berupa ancaman terorisme dengan

menggunakan bom dan pembunuhan terhadap anggota Polri yang berada di Polda Metro Jaya, unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, pencurian aset – aset Polri yang dilakukan oleh orang luar seperti penipuan terhadap masyarakat tentang wajib pajak kendaraan maupun kejahatan sosial lainnya yang dapat mengancam keamanan di Markas Polda Metro Jaya.

Beberapa potensi ancaman tersebut, yang sekiranya dirasakan dapat mengganggu produktifitas dan pelayanan. Potensi ancaman yang sedemikian menjadikan kita untuk berpikir mengatasinya. Hadiman (2009) mengatakan bahwa :

Dalam penyelenggaraan sekuriti kita harus memperhatikan : ancaman apa yang mungkin timbul, kapan akan terjadi , dibagian mana kemungkinan munculnya, siapa kemungkinan pelaku – pelakunya dan bagaimana proses peristiwanya. Hal ini merupakan kemajuan penyelidikan masa depan atau kegiatan memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi .

Dalam tesis ini peneliti mengklasifikasikan potensi ancaman yang terjadi di Markas Polda Metro Jaya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara lain :

1. Ancaman yang mungkin terjadi : Ancaman ini cakupannya lebih luas dan merupakan perkiraan keadaan sehingga ancaman ini meliputi :
 - 1) Bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran dan lain – lain.
 - 2) Pembakaran dan kebakaran.
 - 3) Pencemaran lingkungan.
 - 4) Unjuk rasa.
 - 5) Tindak pidana seperti pencurian, penggelapan / penipuan, tahanan melarikan diri dan lain – lain.
 - 6) Pembocoran rahasia Negara.
 - 7) Pemalsuan data – data dan informasi komputer, dokumen, arsip, peralatan dan lain – lain.
 - 8) Pengutilan aset – aset inventaris Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu sendiri.

- 9) Perampokan uang di kantor Samsat.
 - 10) Perusakan dan penjarahan aset – aset inventaris Polda bila terjadi situasi *Chaos*.
 - 11) Sabotase.
 - 12) Ancaman bom.
 - 13) Ancaman dari hipnotis, santet, teluh, guna – guna dan sebagainya yang bersifat metafisik dari pihak – pihak tertentu.
2. Ancaman yang terjadi : Adapun bentuk ancaman yang terjadi di Markas Kepolisian ini meliputi :

1) Unjuk Rasa.

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan yang terjadi, gangguan keamanan ini dapat menyebabkan sebagian atau seluruh proses pelayanan terhadap masyarakat berjalan tidak optimal, begitu juga dengan pelaksanaan tugas lainnya apalagi bila unjuk rasa ini ditangani dengan dengan baik sehingga massa yang melakukannya dengan anarkis dan melakukan perlawanan terhadap petugas yang mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut. Terhitung dari awal tahun 2011 sampai dengan bulan April tahun 2011 telah terjadi 9 (Sembilan) kali kejadian unjuk rasa di Markas Polda Metro Jaya, dari hasil wawancara didapati bahwa kejadian unjuk rasa ini sering sekali terjadi dan penanganannya sudah sesuai dengan perintah dan arahan pimpinan, Ujar AKP Sende.

2) Tindak Kejahatan.

Tindak Kajahatan yang terjadi di lingkungan Polda, antara lain :

- (1) Pencurian kendaraan bermotor.
- (2) Penipuan terhadap nasyarakat wajib pajak kendaraan bermotor oleh calo.

- (3) Tahanan pelaku tindak pidana yang melarikan diri dari rumah tahanan yang berada di dalam Markas Polda Metro Jaya.

Sesuai dengan data gangguan keamanan pada Markas Polda Metro Jaya, tindak pidana yang paling sering terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor baik Roda 2 (dua) maupun Roda 4 (empat) baik itu milik pengunjung / tamu, sedangkan yang datang adalah kendaraan milik anggota Polda Metro Jaya itu sendiri, selama 1 (satu) tahun terakhir terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan bulan Februari Tahun 2011 tercatat 11 (sebelas) kasus pencurian kendaraan bermotor. Hal ini didapat dari wawancara dengan Kasubbag Pamsik Yanma Polda Metro Jaya AKP Sende pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 14.00 Wib di ruang kerjanya yang mengatakan bahwa :

Setiap kejadian tindak pidana yang terjadi di Mapolda selalu saja ada anggota Kepolisian yang terlibat, yang saya ingat kejadian pencurian mobil di dalam lingkungan Polda Metro Jaya tahun 2009 melibatkan oknum anggota Provos.

4.1.3 PELAKSANAAN PENGAMANAN DI MARKAS POLDA METRO JAYA

Pengamanan lingkungan kerja Polda Metro Jaya diatur dalam Juklak Kapolda Metro Jaya No. Pol : Juklak / 03 / II / 1999 tanggal 26 Februari 1999 tentang penanggulangan serangan fisik terhadap Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Juklak Kapolda Metro Jaya No. Pol : Juklak / 01 / I / 2003 tanggal 26 Januari 2003 tentang Sistem Pengamanan Markas Polda Metro Jaya dari gangguan Kamtibus dalam Markas, Juklak inilah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengamanan yang dilaksanakan oleh Pelayanan Markas (YANMA) Polda Metro Jaya, sayangnya belum dibuatkan Standar Operasional Prosedur yang lebih menjabarkan lagi dalam setiap pelaksanaan tugas sehingga lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh petugas pengamanan.

Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Pelayanan Markas Polda Metro Jaya, AKBP AGUS SUDRAJAT pada tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 Wib, di ruang kerja Ka Yanma Polda Metro Jaya, kemudian dijelaskan pada peneliti :

Sasaran Pengamanan pada kawasan Mapolda ini sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari satuan Pengamanan Protokol Pelayan Markas Polda Metro Jaya secara umum yang berpedoman dengan kebijakan pimpinan berdasarkan dengan Juklak dan Juknis di bidang keamanan dengan mengutamakan koordinasi serta kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini.

4.1.3.1 KEBIJAKAN PENGAMANAN MARKAS POLDA METRO JAYA

Kebijakan Pengamanan Markas kepolisian tidak terlepas dari pengamanan fisik yang diselenggarakan di Markas Polda Metro Jaya. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan harus dapat berhasil efektif dan efisien. Namun semua yang diterapkan itu sangat terkait dengan sumber daya manusia yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Pada kenyataannya bahwa anggota jaga dari Sat Pamprot Yanma Polda Metro Jaya, beberapa diantaranya merupakan anggota Kepolisian yang bermasalah secara mental maupun kepribadiannya dan tidak dilakukan pelatihan yang berkesinambungan secara keseluruhan, begitupun dengan proses rekrutmen dari satuan pengamanan *Outsourcing* tidak dilakukan dengan sesuai ketentuan yang berlaku yang didapat dari hasil penelitian.

Pelayanan Markas (Yanma) yang ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadap pengaturan pengamanan di lingkungan Polda Metro Jaya, dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya ada beberapa tugas dan kewenangan yang diambil alih oleh satuan lain seperti Elektronika Markas yang peran tanggung jawabnya diambil oleh Bidang Informasi dan Telekomunikasi (Bid TI), Pengaturan Angkutan dan Kendaraan yang peran tanggung jawabnya diambil oleh Biro Sarana Prasarana (Biro Sarpras), kemudian Perparkiran yang peran tanggung jawabnya diambil oleh Koperasi Polda Metro Jaya (Primkopol) karena berkaitan dengan adanya pendapatan uang jasa parkir, dengan demikian membuat Pelayanan Markas merasa tidak lagi bertanggung jawab terhadap peran tugas yang sudah diambil alih, sehingga sistem pengamanan terlihat tidak terintegritas dan

satu komando untuk memudahkan pengaturan dan pelaksanaan tugas pengamanan di lingkungan Polda Metro Jaya.

4.1.3.2 MANAJEMEN PENGAMANAN *IN HOUSE* DAN *OUT SOURCING*

Pengamanan yang baik harus memiliki proses manajerial dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan yang baik. Hal ini terkait erat dengan masalah sumber daya manusia khususnya personil pengamanan.

Pengamanan petugas Inhouse di Markas Polda Metro Jaya dengan mempergunakan petugas jaga Pengamanan Protokoler dari Pelayanan markas dan pelibatan piket fungsi dari masing – masing satuan fungsi di Polda Metro Jaya .

Komponen petugas yang dilibatkan Pengamanan di Markas Polda Metro Jaya dalam satu hari, meliputi :

- a. Petugas pengamanan inhouse Markas Polda Metro Jaya berjumlah kurang lebih 500 (lima ratus) orang yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang dari petugas Yanma dimasukkan ke dalam shift yang ada, sedangkan sisanya bervariasi jumlah yang bertugas pada masing – masing satuan fungsi terkait yang mempunyai tugas pengamanan terbatas pada tempat kerjanya saja.
- b. Petugas pengamanan Outsourcing berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Danru, yang terbagi menjadi 1 shift komandan shift yang sudah masuk ke dalam jumlah tersebut, yang membantu pengamanan pada daerah terbatas dilingkungan Markas Polda Metro Jaya yaitu hanya pada kantor Samsat dan gedung biru Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya hanya pada kerja.

Petugas pengamanan tenaga kontrak (*Outsourcing*) yang melaksanakan pengamanan di Polda Metro Jaya diperoleh dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang dikontrak oleh Direktorat Lalu Lintas sehingga untuk pelaksanaan tugasnya tidak dibawah pengawasan dan pengaturan Pelayanan Markas (Yanma), sehingga kegiatan pengamanan yang dilakukan sepenuhnya dikendalikan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

4.1.3.3 SASARAN PENGAMANAN

Dalam kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di Markas Polda Metro Jaya, yang menjadi sasaran dari pengamanan adalah :

- a. Manusia, yaitu tamu dan anggota Kepolisian yang bertugas di Markas Polda Metro Jaya yang terdiri dari 10.211 (Sepuluh ribu dua ratus sebelas) anggota Polri dan 510 (lima ratus Sepuluh) orang PNS (Sumber : Biro SDM Polda Metro Jaya) serta tahanan pelaku tindak pidana yang berada di rutan Polda Metro Jaya.
- b. Fisik atau benda yang menjadi inventaris Polda Metro Jaya yaitu seluruh bangunan seluas 73.477 M² yang terdapat di area Markas Polda Metro Jaya seluas 774.096 M² dan juga Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) milik negara.
- c. Dokumen - dokumen penting dan berharga serta rahasia Negara yang berupa dokumen fisik dan dokumen berbentuk file komputer yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di Markas Polda Metro Jaya.
- d. Kegiatan – kegiatan pelayanan para anggota Kepolisian yang bekerja di Markas Polda Metro Jaya terhadap masyarakat ibu kota Jakarta dan sekitarnya.

Pada kawasan Markas Polda Metro Jaya pengamanannya atau klasifikasi pengawasan dan pembinaan daerah berdasarkan safety pengamanan di Markas Polda Metro Jaya menjadi beberapa tingkatan, meliputi :

- a. Tingkat Pengamanan level satu atau minimum security.
- b. Tingkat pengamanan level dua atau low level security.
- c. Tingkat pengamanan level tiga atau medium security.
- d. Tingkat pengamanan level empat atau high security.
- e. Tingkat pengamanan level lima atau maximum security.

Tingkat pengamanan tersebut memiliki ciri tersendiri sesuai dengan tingkatan pengamanan yang di miliki Polda Metro Jaya, yang di mulai dari gudang persenjataan, gudang asrsip kendaraan bermotor sampai pada tempat perkantoran serta gedung pelayanan masyarakat, dari pengamatan peneliti bahwa di Markas Polda Metro Jaya, penerapannya banyak kekurangannya sesuai dengan persyaratan serta ketentuan pokok dari sistim pengamanan masing – masing tingkatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan Ka Yanma, AKBP Agus Sudrajat diruang kerjanya mengatakan bahwa:

Pelaksanaan Pengamanan Markas yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sepenuhnya dilaksanakan oleh pelayanan Markas dan di bantu dengan pelibatan piket fungsi, sedangkan untuk tingkatan level pengamanan yang di terapkan oleh Polda Metro Jaya masih banyak kekurangannya dan masih perlu ditingkatkan lagi.

Hasil pengamatan di lapangan ditemukan bahwa pada kawasan Markas Polda Metro Jaya tidak diterapkan pembagian berdasarkan klasifikasi Zone dan Ring yang dapat memudahkan pelaksanaan tugas pengamanan di kawasan tersebut.

4.1.3.4. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang proses pelaksanaan tugas – tugas pengamanan, pengadaan beberapa peralatan pengamanan sangat diperlukan selain sebagai sarana pendukung dalam menjalankan tugas pengamanan, hal tersebut juga sebagai investasi dari Instansi / perusahaan. Sarana dan Prasarana yang dimiliki, antara lain :

- a. Untuk kesiapan petugas pengamanan Markas dalam pelaksanaan tugas dilengkapi dengan *Handy Talky* (HT) dan telpon. HT sebagai alat yang digunakan untuk komunikasi hanya ada 5 unit sedangkan 2 Unit dalam kondisi rusak berat, hal ini sangat minim dari kebutuhan yang harus ada dan dapat menyebabkan pengawasan menjadi terbatas hanya pada petugas yang memegang HT saja sedangkan untuk telepon hanya ada 1 buah yang berada di Pos terdepan (pos utama).

- b. Kendaraan sepeda motor yang disediakan berupa 1 (satu) unit jenis YAMAHA T-RS, dengan kondisi kendaraan yang kurang terawat dan dalam kesehariannya digunakan oleh Kasubbag Pamsik AKP. H. Sende
- c. Untuk peralatan pengamanan petugas inhouse maupun *outsourcing* tidak dilengkapi dengan tongkat Polisi dan borgol yang memadai, petugas pengamanan hanya dibekali dengan 3 buah stick mirror, itu pun saat ini sudah sangat ketinggalan zaman, sehingga petugas pengamanan terbatas dalam memantau barang yang dibawa oleh tamu dan 2 buah senjata laras panjang yang terdapat di Pos penjagaan utama.
- d. Dalam menghadapi kebakaran, Markas Polda Metro Jaya tidak memiliki fire station dan juga tidak dilengkapi unit mobil pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan sebanyak 10 buah berada di masing – masing gedung dan hidran air sebanyak 2 buah dalam kondisi rusak dan tidak dapat dipergunakan. Berdasarkan pengamatan peneliti apabila terjadi bencana kebakaran maka akan terjadi kekacauan dan masing – masing petugas tidak mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana yang harus mereka lakukan.
- e. Kantor petugas satuan pengamanan *outsourcing* yang berfungsi sebagai posko keamanan tidak disediakan pihak Polda Metro Jaya.
- f. Pakaian yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana ditempatkan, antara lain :
 - 1) Pengamanan umum, yang dilaksanakan di Markas Polda Metro Jaya, yaitu di area parkir keluar masuk karyawan dan pengunjung, dengan menggunakan pakaian PDL untuk kelengkapan dinas jaga yaitu : pakaian dinas khusus dengan kopel riem hitam, memakai tanda dinas jaga berbentuk ban lengan coklat dengan tulisan "Jaga" warna kuning pada lengan kiri, bersenjata organik laras panjang.
 - 2) Pengamanan terbatas, dilaksanakan oleh masing – masing piket fungsi satuan kerja pada lingkungan dalam gedung yang ditempati sebagai tempat kerjanya dengan menggunakan pakaian dinas harian yang

disesuaikan pada masing – masing fungsi satuan kerja berlaku pada hari itu dengan dilengkapi dengan kartu identitas diri, sedangkan untuk pakaian seragam satpam menggunakan putih biru atau biru – biru dan menggunakan kartu identitas diri.

4.1.3.5 POLA PENGAMANAN

Bila ditinjau dari segi sistem keamanan yang ada di Markas Polda Metro Jaya berdasarkan organisasi pengamanan yang pengelolaannya dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga keamanan (bukan Badan usaha jasa pengamanan/BUJP), maka sistem keamanan dibagi menjadi 2 sistem pengamanan, yaitu :

a. Sistem Terbuka.

Tanggung jawab pelaksanaan pengamanan dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas pengamanan *inhouse*, mengelola sistem pengamanan dengan pembatasan hak akses yang berbeda untuk tiap bagian yang ada di Markas Polda Metro Jaya, sehingga hanya orang – orang tertentu saja yang boleh masuk ke dalam kawasan tersebut. Langkah – langkah yang dilakukan antara lain :

- 1) Melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan yang ada di dalam maupun di luar Markas Polda Metro Jaya.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap semua orang (tamu maupun anggota), barang dan dokumen yang ada di Markas Polda Metro Jaya.
- 3) Melakukan Pengamanan dan perlindungan terhadap pejabat dan tamu VIP (*Very Important Person*).
- 4) Melaksanakan pemeriksaan terhadap orang, barang dan kendaraan yang keluar dan masuk kawasan Markas Polda Metro Jaya.

- 5) Melaksanakan kegiatan patroli di seluruh area Markas Polda Metro Jaya.
- 6) Melaksanakan penanganan apabila terjadi kasus unjuk rasa di Markas Polda Metro Jaya.

b. Sistem Tertutup.

Tanggung jawab pelaksanaan pengamanan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota Kepolisian yang ada di Markas Komando Polda Metro Jaya.

Dewasa ini sebagian besar lembaga kepolisian yang ada didunia sudah sangat menyadari bahwa fungsi pencegahan atau preventif lebih penting dibanding fungsi refresif, sebagai fungsi preventif juga terdapat preventif langsung dan preventif tidak langsung, preventif tidak langsung ini sejak zaman Kapolri R.S Sukanto (Awaloeddin djamin) dikenal dengan sebutan pembinaan masyarakat, yaitu menggugah partisipasi masyarakat agar anggota masyarakat patuh dan taat hukum, dibidang preventif ini polri melaksanakan sebagian tugas tersebut sebagian lagi dilaksanakan oleh instansi lain dan masyarakat yang disebut dengan pengamanan swakarsa.

Yanma Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan tugasnya yang bertanggung jawab dalam pengamanan markas Polda Metro Jaya menurut Agus Sudrajat sebagai Ka Yanma pada tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 Wib, di ruang kerja Kayanma Polda Metro Jaya, mengatakan

Yanma sudah melaksanakan pengamanan fisik yang mana upaya yang sudah dilakukan adalah mengambil kebijakan pengamanan dengan melakukan upaya pencegahan ancaman dari luar dan dari dalam Polda Metro Jaya, seperti mendirikan pintu gerbang, pagar keliling markas Polda Metro Jaya, pengaturan tempat parkir anggota dan menambah kunci tambahan pada beberapa gerbang masuk Polda, serta memasang CCTV di beberapa sudut gedung yang berada dilingkungan Mapolda Metro Jaya sesuai yang diamanatkan dalam Perkap. 22 tahun 2010 bahwa Yanma mempunyai tugas Pelayanan markas, fasilitas perkantoran, dukungan komunikasi, dan elektronika markas tetapi pada kenyataannya ini tidak dilakukan oleh Yanma tetapi oleh biro lain yang menangani elektronika.

Kasubbag Pamsik Yanma Polda Metro Jaya AKP. Sende pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 14.00 Wib di ruang kerjanya yang mengatakan bahwa :

Begitu juga untuk Pengamanan markas, pejabat kegiatan protokoler ini juga seharusnya menjadi tanggung jawab Yanma tetapi dilakukan oleh Bid Propam. Masih menurut Sende angkutan personil dan pejabat serta pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan Polda, itu sesuai perkap tersebut masih menjadi tanggung jawab Yanma tetapi pada kenyataannya ditangani oleh Biro logistik.

Beberapa kendala ini sebenarnya yang menyebabkan Yanma tidak dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Ironisnya seperti kejadian pembakaran mobil Wairwasum di Mabes Polri beberapa bulan yang lalu seperti yang peneliti sampaikan pada latar belakang penelitian ini di Bab I, yang bertanggung jawab terhadap pengaturan pengamanan adalah Ka Yanma.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam melakukan pelayanan markas maka Yanma Polda Metro Jaya membuat suatu alternatif solusi untuk masalah pengamanan markas Polda Metro Jaya dengan menjalankan spesifikasi standar sistem Manajemen Pengamanan yang diambil dari Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007, dimana Sistem Manajemen Pengamanannya mengandung beberapa elemen antara lain :

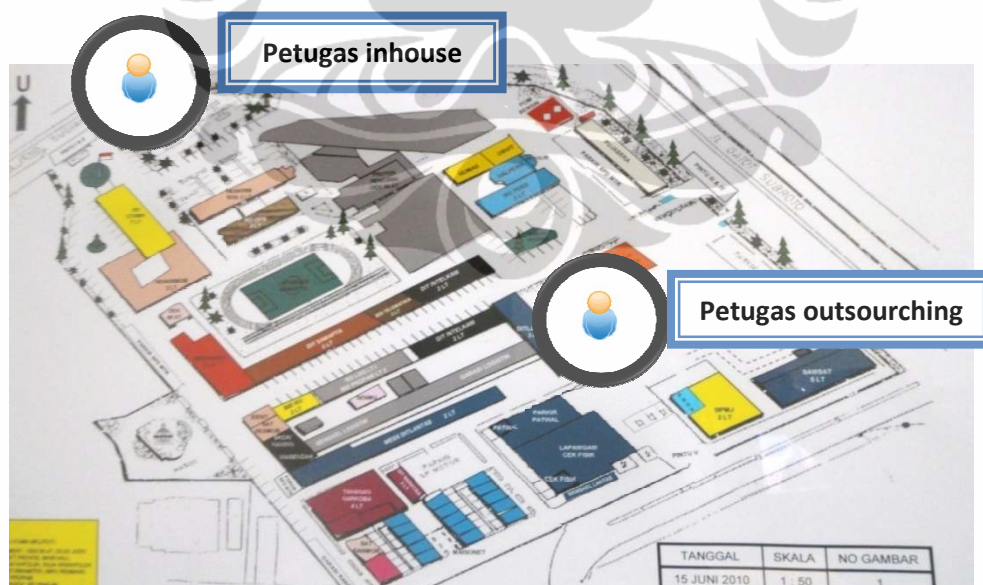
- 1) Pemeliharaan dan pembangunan Komitmen,
- 2) Pemenuhan Aspek Peraturan Perundangan Keamanan.
- 3) Manajemen Risiko Pengamanan
- 4) Tujuan dan Sasaran
- 5) Perencanaan dan Program
- 6) Pelatihan, Kepedulian dan Kompetensi Pengamanan
- 7) Konsultasi, Komunikasi dan Partisipasi
- 8) Pengendalian Dokumen dan Catatan
- 9) Penanganan Keadaan Darurat
- 10) Pengendalian operasi
- 11) Pemantauan dan Pengukuran Kinerja pengamanan
- 12) Pelaporan, Perbaikan dan Tindakan pencegahan Ketidaksesuaian
- 13) Pengumpulan dan analisa Data
- 14) Audit sistem Manajemen Pengamanan

- 15) Tinjauan Manajemen
- 16) Peningkatan Berkelanjutan

4.2 ANALISA MANAJEMEN PENGAMANAN MARKAS KEPOLISIAN OLEH YANMA POLDA METRO JAYA (DESKRIPSI DAN TEMUAN KELEMAHANNYA)

Manajemen Pengamanan Markas di Polda Metro Jaya selama ini hanya dilakukan oleh Yanma sebagaimana yang tertuang dalam Perkap Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang struktur organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah, khususnya pada pasal 104 ayat 3 butir c dan f.

Selanjutnya berdasar Peraturan Kapolri tersebut, maka impleementasi dari manajemen pengamanan tersebut mengacu pada *rule of conduct* sebagaimana yang tertulis dalam Perkap nomor 24 tahun 2007 tentang Sistim Manajemen Pengamanan organisasi, perusahaan dan / atau instansi / lembaga pemerintah, khususnya pada Polda Metro Jaya.



Gambar 4.4 : Lay out pembagian petugas pengamanan Polda Metro Jaya
Sumber : Data sekunder Urmin Yanma Tahun 2011

Tanggung jawab pengamanan markas dibebankan pada petugas pengamanan inhouse dan outsourcing (sebagai pelaksana pengamanan). Meski fokus tugas

mereka berbeda namun pembagian tugas (inhouse dan outsourcing) terpola dalam bentuk yang sama yaitu dalam bentuk shift/regu.

Petugas pengamanan inhouse, bertanggung jawab hanya di pintu masuk Polda Metro Jaya (pintu masuk dari arah Sudirman dan Gatot Subroto). Secara rutin pelaksanaan tugas mereka dijalankan dalam waktu shift. Shif I berjumlah 21 orang yang bertugas dari jam 08.00 – 20.00 Wib. Shif II berjumlah 20 orang yang bertugas dari jam 20.00 – 08.00 Wib. Dan terakhir, Shif III (shif cadangan) berjumlah 20 orang yang bertugas pada hari berikutnya. Tugas jaga dilaksanakan dengan melakukan penjagaan di setiap pos – pos yang ada di Markas Polda Metro Jaya, untuk pelaksanaan di pos 3 dan Pos 5 perlu penjagaan ketat dengan melakukan pemeriksaan agar kondisi keamanan gedung dan perkantoran dapat dinyatakan steril dari ancaman dan gangguan.

Umumnya dalam pelaksanaan tugas jaga tersebut mereka juga sekaligus melakukan tugas pemeriksaan terhadap orang dan kendaraan. Pemeriksaan orang, tindakan yang dilakukan dengan menanyakan maksud kedatangan, siapa yang dituju, mencatat identitas pribadi, menghubungi pejabat yang dituju dan diijinkan apabila telah mendapatkan persetujuan dari yang dituju. Pemeriksaan kendaraan Roda 4 atau lebih tindakan yang dilakukan yaitu pemeriksaan kendaraan menggunakan *mirror detector*, pemeriksaan bagian dalam mobil dan bagasi (menggunakan metal detector atau visual), dan setelah dinyatakan steril diberikan tiket parkir untuk masuk dan diserahkan pada saat ke luar.

Selain itu, petugas inhouse juga melakukan patroli dan kegiatan pengawasan area Markas Polda Metro Jaya melalui pos – pos jaga yang telah di tentukan. Patroli dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda 2 di kawasan Markas Polda Metro Jaya seperti patroli area parkir kendaraan bermotor, pintu – pintu gerbang akses masuk dan keluar, kawasan gedung – gedung, gudang senjata dan sarana atau tempat lain yang dianggap perlu, sedangkan penjagaan di setiap pos – pos yang jumlah seluruhnya ada 6 pos. Namun kegiatan patroli tidak berjalan optimal karena mereka tidak memiliki kendaraan khusus untuk patroli, yang terjadi seringkali adalah mereka terpaksa menggunakan kendaraan pribadi. Konsekuensinya adalah mereka harus mengisi bensin sendiri. Jika hanya sesekali

saja tidak menjadi soal. Tentu saja tuntutan untuk melakukan kegiatan patroli secara terus menerus tidak dapat mereka kerjakan dengan optimal. Sehingga terkadang pelaksanaan tugas yang satu ini tak lebih dari sekedar formalitas belaka. Sebenarnya dalam pelaksanaan tugas patroli tersebut juga melekat tugas pengawasan.

Berbeda dengan petugas inhouse, maka penugasan oleh petugas outsourcing hanya terbatas pada lingkungan kerjanya saja yaitu kantor Samsat dan Gedung Biru Direktorat Lalu lintas. Kegiatan – kegiatan rutin pengamanan yang dilaksanakan oleh petugas pengamanan *outsourcing* terbagi menjadi 1 shif/regu, shif I berjumlah 12 orang yang terdiri dari 12 tenaga sekuriti *outsourcing* bertugas dari jam 06.00 – 14.00 Wib (sesuai dengan jam kerja) sedangkan hari minggu / hari libur tidak bertugas, fakta di lapangan ditemui bahwa satpam *outsourcing* yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari setiap pengunjung / tamu yang datang akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilakukan.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas anggota Polri yang jaga merupakan urusan Pamprot Yanma Polda Metro Jaya selaku petugas *inhouse* yang dilaksanakan oleh Kepala Unit Pengawasan dan Penjagaan (Kanit Walga), Kasubbag Pamsik berjenjang sampai dengan Kepala Pelayanan Markas (Ka Yanma) dibantu oleh satuan provos Polda Metro Jaya ataupun dari pimpinan Polda Metro Jaya lainnya, begitu juga dengan Satuan Pengamanan tenaga sekuriti Outsourcing, tugas yang dilaksanakan oleh semua petugas Pengamanan seperti telah dijelaskan sebelumnya pada umumnya bersifat rutin, kecuali ada hal – hal khusus seperti terjadinya tindak pidana.

Hasil pengamatan Peneliti dilapangan ditemukan fakta bahwa monitoring dan pengawasan dilaksanakan oleh Kanit Walga dengan dibantu oleh para Komandan regu dari masing – masing shif seperti mengecek kesiapan petugas serah terima dari masing – masing shif, melakukan pengecekan situasi di setiap pos – pos di waktu tertentu dengan cara melakukan pengecekan baik secara langsung maupun dengan menggunakan alat komunikasi (handy talky dan pesawat telepon).

Untuk evaluasi pelaksanaan tugas pengamanan dilakukan setiap satu minggu sekali dan pelaksanaan rapat dilaksanakan setiap hari Kamis dengan melaksanakan apel satuan kerja di Yanma Polda Metro Jaya sedangkan untuk security outsourcing yang bertugas di polda, evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis yang diambil oleh Kepala Sub Seksi Samsat Jakarta Selatan (Kasubsi) atau Bintara Urusan Tata Usaha Samsatnya.

Pengarahan / Arahan petunjuk pimpinan (APP) / Breefing berikut Anev untuk piket fungsi masing – masing satker dilaksanakan oleh perwira siaga Biro Operasi Polda Metro Jaya selaku koordinatornya dilaksanakan setiap hari pada pukul 06.00 Wib.

Petugas pengamanan baik petugas *inhouse* maupun *outsourcing* masing – masing dilengkapi dengan kartu anggota namun dalam pelaksanaan tugasnya tidak dilengkapi dengan surat tugas dan pada saat menjalankan tugas dan kartu kontrol tidak diterapkan dalam pelaksanaan tugas patroli yang dilaksanakan karena jarang dilaksanakannya pengecekan terhadap kelengkapan administrasi tersebut.

Pada saat melaksanakan tugas petugas diwajibkan mengisi buku jurnal mutasi penjagaan dengan disesuaikan pada lokasi pos jaga yang ditempatinya yang teradapat di pos 1 (gerbang utama) dan kewajiban tersebut dilaporkan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kaur Pamprot Yanma Polda Metro Jaya.

Menurut Keterangan salah seorang Komandan Regu I Aiptu. Heri Mujiono di Pos penjagaan pada tanggal 4 Maret 2011, bahwa :

Sistim Pelaporan buku mutasi tidak pernah dilaporkan kepada pimpinan hanya diletakkan pada pos saja, pengecekan dilakukan pada saat atasan saya yang datang ke Pos tersebut.

Sedangkan pembuatan laporan pelaksanaan tugas tidak dilaksanakan karena menganggap merupakan tugas rutinitas saja, karena secara tidak langsung melakukan pengawasan kepada petugas jaga, adapun laporan pelaksanaan tugas mencakup semua bentuk kejadian baik itu sifatnya rutinitas maupun isidentil seluruhnya dimasukkan dalam buku mutasi tanpa terkecuali termasuk kejadian

khusus seperti tindak pidana yang berskala tinggi yang terjadi di Markas Polda Metro Jaya.

Sistem pelaporan dibuat terhadap insiden berikut tindak kejahatan yang ada, artinya dibuat laporan pelaksanaan tugas setiap pergantian shift, hari, minggu dan bulan, temuan - temuan yang ada ketika patroli, hadapan yang dihadapi serta bagaimana cara mengatasinya namun sistem laporan tersebut tidak terdokumentasi dengan baik padahal laporan tersebut penting untuk pelaksanaan analisis dan evaluasi kerja, dengan adanya data tersebut dapat diambil langkah – langkah antisipasi agar tidak terjadi tindak pidana yang dapat merugikan Markas Kepolisian Polda Metro Jaya.

Berbicara mengenai *Physical Security* atau keamanan yang bersifat fisik maka akan terkait dengan bagaimana akses orang ke gedung, peralatan dan media yang di gunakan. *Physical Security* juga tidak terlepas dari hal - hal yang terkait dengan keamanan fisik yang ada di Markas Polda Metro Jaya, disamping itu juga terkait dengan perlindungan secara fisik terhadap aset institusi.

Untuk menjaga aset Institusi secara fisik, tentu sudah menjadi tanggung jawab bersama dari semua petugas pengamanan yang ada di Markas Polda Metro Jaya, namun peran petugas inhouse Yanma cukup jelas, mengingat tugas mereka yang berat yaitu pengamanan aset – aset Polda Metro Jaya. Sistem Pengamanan fisik di Markas Polda Metro Jaya, yaitu :

1. KONTROL AKSES (*ACCES CONTROL*)

Markas Polda Metro Jaya dari sisi akses control belum menerapkan satu pintu masuk ke dalam kawasan lingkungannya, karena terdapat 4 (empat) jalan yang dapat digunakan sebagai pintu masuk dan keluar bagi orang – orang yang berurusan dengan Polda Metro Jaya merupakan akses masuk maupun keluar kawasan tersebut, 1 (satu) pintu digunakan untuk masuk dan 1 (satu) pintu lagi untuk keluar khusus bagi pengguna kendaraan bermotor, sedangkan yang 2 (dua) lainnya khusus peruntukan bagi pejalan kaki yang masuk maupun keluar dari Markas Polda Metro Jaya, masing – masing pintu dijaga oleh beberapa petugas pengamanan inhouse dari Pelayanan Markas. Karena Polda Metro Jaya

merupakan tempat pelayanan masyarakat umum, maka terlihat control akses di Pos untuk pintu akses keluar masuk areal Markas Polda Metro Jaya terlihat diabaikan kecuali pada akses masuk gedung ruangan – ruangan tertentu . beberapa pintu ditempatkan pos jaga untuk memonitor kondisi tempat tersebut sebagai pos jaga untuk piket fungsi masing – masing kantor satuan kerja yang ada. Tapi pada kenyataannya untuk alasan menghilangkan kesan militeristik maka pos penjagaan hanya ditempatkan pada pintu utama.

Terdapat 6 buah pintu yang berada di Markas Polda Metro Jaya, yaitu :

Pintu gerbang 1, digunakan sebagai pintu masuk dan keluar bagi kendaraan pimpinan Polda serta tamu VVIP (*very very Important Person*). Pada pos ini dijaga oleh 6 orang petugas pengamanan dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan yang akan masuk dan keluar area Markas Polda Metro Jaya.

Pintu Gerbang 2, digunakan untuk orang pejalan kaki yang akan masuk dan keluar area Markas Polda Metro Jaya dari jalan sudirman, diberlakukan mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, yang dijaga oleh 2 orang petugas dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap semua orang yang akan masuk.

Pintu Gerbang 3 adalah pintu dari arah jalan Gatot Subroto untuk keluar kendaraan dan orang yang akan masuk atau keluar Markas Polda Metro Jaya yang diberlakukan dari mulai pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib, yang dijaga oleh 4 (empat) orang petugas setelah itu pos ini di pergunakan hanya untuk kendaraan yang akan keluar yang dijaga oleh 2 (dua) orang petugas Pengamanan.

Pintu Gerbang 5, adalah pintu keluar masuk dari arah kawasan SCBD khusus untuk kendaraan bermotor dan dijaga oleh 4 (empat) orang petugas pengamanan yang melakukan pemeriksaan kendaraan roda 2 atau lebih, tindakan yang dilakukan yaitu pemeriksaan kendaran menggunakan *mirror detector*, pemeriksaan bagian dalam mobil dan bagasi (menggunakan *metal detector atau visual*), dan setelah dinyatakan steril kemudian mengambil karcis parkir dan diserahkan pada saat keluar dari Markas Polda Metro Jaya.

Pintu masuk tambahan adalah pintu yang di pergunakan orang pejalan kaki yang akan melaksanakan ibadah sholat di masjid Polda Metro Jaya, pos ini dibuka hanya pada waktu – waktu tertentu yaitu pada pukul 12.00 Wib dan pukul 14.00 Wib, yang dijaga oleh 2 (dua) petugas pengamanan.

2. PENGHALANG FISIK (*BARRIER*)

Markas Polda Metro Jaya tidak dilengkapi dengan Barrier atau penghalang fisik permanen hanya barrier yang berupa pagar kawat berduri portable yang dipasang sepanjang gerbang utama pada saat adanya unjuk rasa / demonstrasi yang berguna untuk menghalangi masa pengunjuk rasa yang tidak berkepentingan masuk ke dalam kawasan Markas Polda Metro Jaya. Sehingga dari pengamatan peneliti unuk sepanjang wilayah Polda Metro Jaya hanya pagar yang membatasi wilayah pengamanan dan pagar yang itupun langsung berbatasan dengan area umum ataupun gedung perkantoran lain tanpa ada penghalang fisik (*barrier*) yang seharusnya menjadi pembatas antara pagar dengan area umum.

3. PAGAR (*FENCES*)

Untuk pagar (*Fences*) yang digunakan oleh Markas Polda Metro Jaya, terbuat dari 2 (dua) macam bahan material sebagian besarnya dibuat dengan sangat baik dari batako putih yang disemen kemudian di ujungnya ditambahi besi tajam, kecuali unuk sisi wilayah pagar di selatan yang berbatasan dengan jalan raya sudirman yang hanya menggunakan pagar berbahan jenis besi biasa dengan ketinggian tidak lebih dari 1 meter yang tidak memenuhi standar dengan pertimbangan keamanan sehingga masih memungkinkan orang luar dapat dengan mudah masuk ke Markas Polda Metro Jaya dengan cara melompati pagar tersebut.

4. KUNCI (*LOCK*)

Kunci dan anak kunci adalah mekanisme kontrol akses yang paling murah. Kunci dianggap sebagai alat pencegah terhadap penyusup dan alat penunda / mencegah bagi orang – orang yang mempunyai niat yang tidak baik untuk masuk ke Polda Metro Jaya, semakin lama waktu yang diperlukan untuk menghancurkan atau membuka kunci akan memberi waktu yang lebih panjang kepada petugas jaga tiba

di tempat jika penyusup mudah diketahui. Sistem penguncian yang digunakan oleh Markas Polda Metro Jaya untuk mengunci semua pintu pagar dan palang besi dengan menggunakan rantai dan gembok. Cara sistem penguncian seperti masih sangat sederhana dan ketinggalan jaman (masih tradisional).

Hasil penelitian di lapangan mendapatkan yaitu untuk kunci gedung – gedung tertentu tidak pernah terkunci sehingga orang dapat memasuki gedung tersebut dengan leluasa pada waktu kapan pun, sedangkan beberapa gedung kunci dipegang oleh pejabat terkait seperti gudang senjata dan brankas bendahara satuan masing – masing.

5. PENERANGAN (*LIGHTING*)

Sistem penerangan listrik yang digunakan Markas Polda Metro Jaya masih menggunakan sistem pengamanan lampu standar. Penerangan listrik digunakan dari malam sampai pagi hari mulai pukul 17.30 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib dengan menggunakan jasa dari PLN, namun untuk alasan efisiensi beberapa lampu hanya dinyalakan seperlunya, cukup untuk tidak membuat tempat tersebut gelap gulita. Selama penelitian dilakukan, penerangan diareal dinilai mencukupi dengan jarak pandang yang jelas di setiap area maupun sudut.

Untuk beberapa kawasan yang cukup rawan seperti sepanjang wilayah selatan dan pos 3 yang orang luar dapat mudah masuk terlihat tidak cukup penerangannya hanya gedung utama dan ruang tahanan yang penerangannya cukup.

6. LAHAN PARKIR

Lahan parkir yang tersedia di Markas Polda Metro Jaya sangat terbatas dari hasil pengamatan penelitian sehingga menyebabkan banyak terdapat tempat atau lahan parkir yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak ada pembagian area yang baik antara kendaraan anggota dengan parkir kendaraan tamu, pengaturan dan pengelolaan parkir dilaksanakan oleh Primkopol Polda Metro Jaya yang juga mengelola dana hasil pemungutan retribusi biaya parkir, hampir sepanjang gedung gedung beberapa satuan fungsi dijadikan lahan parkir tanpa ada petugas yang

khusus mengawasi kendaraan tersebut dan juga mengganggu kelancaraan kendaraan lain yang sedang melintas daerah tersebut.

Faktanya seperti yang peneliti alami pada saat masuk ke dalam area Markas Polda Metro Jaya kendaraan yang dipergunakan susah untuk di parkir sehingga harus memarkir ditempat yang semestinya bukan untuk peruntukan parkir sampai dengan kembali tidak ada yang menegur pelanggaran tersebut hal ini terjadi dikarenakan tidak ada penempatan petugas khusus di area parkir dan hal ini pula yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di lingkungan Markas Polda Metro Jaya.

Hasil pengamatan peneliti lahan parkir di Polda Metro Jaya juga dimanfaatkan oleh karyawan yang bekerja di sekitar Polda Metro Jaya dikarenakan tarif parkir yang hanya satu kali bayar bukan per jam sehingga menghemat ongkos parkir, hal ini yang membuat lahan parkir menjadi penuh.

7. POS JAGA

Pos Jaga hanya difokuskan pada pintu utama diperuntukan sebagai tempat untuk sebagai simbol penjagaan markas yang bertugas sebagai Pengamanan Protokoler dan dari pengamatan peneliti seluruh penjagaan markas dipusatkan di pos jaga utama yang terlatak di gerbang utama Polda Metro jaya yang bertujuan untuk memudahkan petugas jaga dalam mengawasi dan mengontrol setiap orang yang akan masuk bertujuan untuk mengunjungi pimpinan Polda Metro Jaya.

8. SISTEM PENGAMANAN ELEKTRONIK

Institusi yang digolongkan sebagai objek vital nasional, idealnya dilengkapi dengan piranti keamanan yang dipasang mulai dari ring luar hingga dalam, termasuk pemasangan kamera CCTV di setiap area dan penempatan kamera tersembunyi (*hidden camera*) pada titik – titik tersembunyi yang benar – benar dinilai vital. Selain itu juga, untuk pemantauan semua kamera yang terpasang itu ditangani oleh orang-orang khusus dinsuatu ruangan khusus pula.

Sistim pengamanan elektronik Markas Polda Metro Jaya merupakan tanggung jawab Bidang Telekomunikasi dan Informasi yang seharusnya merupakan

tanggung jawab dan tugas Pelayanan Markas (Yanma), pelaksanaannya masih belum didukung dengan teknologi yang modern, seperti menggunakan CCTV tidak pada seluruh kawasan Markas Polda Metro Jaya yang dianggap rawan, sehingga tidak ada ruangan pengendali yang dapat memantau situasi lengkap dengan menggunakan komputer serta tidak ada petugas yang khusus untuk mengawasi monitor CCTV.

Dengan terbatasnya anggota petugas pengamanan dan luasnya daerah yang harus diawasi, cakupan CCTV dinilai kurang maksimal untuk menggantikan pengawasan yang dilakukan oleh anggota pengamanan. Penggunaan sistem CCTV merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan, karena mempunyai dampak yang mendalam bagi setiap orang yang ada di dalam kawasan itu. Dilihat dari faktor psikologis keamanan dapat mempengaruhi totalitas pelayanan institusi, pengaruh ini lebih besar kerugiannya dibandingkan dengan kerugian karena pencurian, kebakaran atau kecelakaan.

Bila dilihat dari segi obyek pengamanan dalam penelitian ini adalah Markas Polda Metro Jaya, apabila dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh Polda Metro Jaya sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan pengamanan, antara lain :

- a. Ada beberapa obyek pengamanan di kawasan Polda Metro Jaya yang harus steril dari orang – orang (khususnya anggota dan tamu) seperti gudang penyimpanan senjata, amunisi dan lain – lain.
- b. Menurut Richard J. Gigliotti dan Ronald C. Jason dalam Hadiman (2008), yang membagi level upaya sekuriti menjadi 5 level, antara lain :
 - 1) Level 1 disebut *minimum security* dengan kelengkapan *simple physical barrier* dan *simple lock*;
 - 2) Level 2 disebut *low level security* dengan kelengkapan *basic local alarm security, simple security lighting, basic security physical barrier and high securitylocks*;
 - 3) Level 3 adalah *medium security dengan kelengkapan advance remote alarm system high security physical barrier ad parimeter, guard dog, wacth man with basic communication*.

- 4) Level 4 adalah *high security* dengan kelengkapan CCTV. *Parimeter alarm system, highly trained alarm guard with advance communication. Acces controle, high security lihting, low and for cemen coordination. Formal contigencye planks;*
- 5) Level 5 *maximum security* dengan kelengkapan *on city armed response force* dan *soft histecated alarm system*

Petugas pengamanan markas yang diaplikasikan di Polda Metro Jaya meliputi pendayagunaan *petugas pengamanan inhouse* dan *outsourcing*, penggunaan akses kontrol di 2 pintu masuk / keluar kawasan, penerapan barrier penghalang di sekeliling, pemgaran keliling walaupun tidak sesuai dengan standar konsep pagar menurut konsep petugas pengamanan markas, penggunaan kunci, lampu penerangan kawasan, adanya pos – pos jaga dan perlatan komunikasi. Hal ini semuanya diterapkan dalam lingkungan walaupun tidak maksimal dan sesuai ukuran standar petugas pengamanan markas, dengan adanya bentuk – bentuk petugas pengamanan markas tersebut peneliti menganalisa bahwa manajemen petugas pengamanan markas yang diaplikasikan Polda Metro Jaya sesuai dengan pendapat Gigliotti dan Jason merupakan upaya sekuriti tingkat 3 yaitu tingkat medium sekuriti, namun ada kekurangannya berupa tidak adanya *advance remote alarm system dan guard dog*. Adapun kelebihanannya adalah adanya acces kontrol pada lingkungan yang sebenarnya termasuk pada kategori tingkat 4 yaitu High level security, karena level ini dibuat dan merupakan urutan dan tingkatan, maka level 3 tingkat medium security sudah mencakup upaya security level 1 (minimum security) dan level 2 (low security). Kegunaanya selain untuk menghalangi merintangi, mendeteksi dan menafsir / menilai aktifitas gangguan dari dalam yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah kepada konspirasi untuk melakukan sabotase, juga dirancang untuk menghalangi / merintangi beberapa gangguan aktifitas dari luar yang tidak sah.

c. Pengamanan objek

Pengamanan objek secara fisik harus dilengkapi dengan hidran tempat air guna memadamkan jika terjadi kebakaran. Dalam hal menghadapi

kebakaran Markas Polda Metro Jaya tidak memiliki *Fire Station* dan juga tidak dilengkapi dengan Unit mobil Pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan sebanyak 10 buah berada di masing – masing gedung dan hidran air sebanyak 2 buah dalam kondisi rusak. Berdasarkan pengamatan peneliti apabila terjadi bencana kebakaran maka akan terjadi kekacauan dan masing – masing petugas tidak mengetahui yang jelas apa yang seharusnya diperbuat. Seharusnya, instansi sebesar Polda Metro Jaya mempunyai mobil pemadam kebakaran stand bay yang berada di lingkungan Mapolda dan *fire Station*.

Polda Metro Jaya sudah seharusnya mempunyai alat – alat pengamanan canggih seperti pendeteksi logam, *security door, access control elektronik* dan sebagainya. Pada kondisi riil dari hasil pengamatan peneliti Polda Metro Jaya telah menggunakan stick mirror dan metal detector, dari hasil pengamatan sementara penyelenggaraan aspek sekuriti di lingkungan markas Polda Metro Jaya sudah memadai. Hal ini tentunya akan menjadi kebijakan pimpinan untuk meningkatkan pengamanan markas sehingga dapat mencegah pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab atau tidak berkepentingan masuk ke dalam lingkungan Polda Metro Jaya. Dari hasil pengamatan peneliti, Polda Metro Jaya seharusnya mempunyai beberapa pos tinjau atau pos pemantauan yang disesuaikan dengan lokasi yang rawan terjadinya gangguan atau ancaman sehingga pos – pos tersebut harus di isi personel sekuriti lengkap dengan alat pengamanan personel dan alat komunikasi yang dibutuhkan oleh petugas pengamanan bahkan bila perlu diperkuat dengan personel Brimob dan anjing Penjaga serta *metal detector*.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti masih terdapat banyak kelemahan – kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen pengamanan markas Kepolisian yang tidak sesuai dengan standar manajemen pengamanan Markas Kepolisian, kelemahan – kelemahan yang ditemukan seperti : pembuatan barrier yang tidak memadai atau tidak ada

sama sekali, akses kontrol yang tidak berfungsi, banyaknya ruangan yang tidak terkunci, masih adanya beberapa sudut lokasi yang belum mempunyai fasilitas penerangan, kurangnya pos jaga atau pos pemantauan termasuk jumlah personel termasuk alat pengamanan personel bahkan kerangnya keahlian personel dalam hal pengamanan, kurangnya alat komunikasi seperti HT sehingga hal ini seharusnya menjadi perhatian pimpinan puncak Polda Metro Jaya untuk dapat merencanakan alokasi anggaran untuk masalah pengamanan ini.

Sudah menjadi sesuatu hal yang wajar Markas Polda Metro Jaya yang begitu besar yang seharusnya menjadi barometer yang dijadikan contoh bagi Polda-Polda seluruh Indonesia apabila menggunakan K9 yaitu Anjing Penjaga (*guard dog*) untuk membantu pelaksanaan tugasnya sehari-hari, tapi hal ini belum diterapkan oleh Polda Metro Jaya.

4.2.1 ANALISA RESIKO KEAMANAN DI POLDA METRO JAYA

Dalam melakukan pencegahan atau antisipasi untuk setiap ancaman dan gangguan yang dapat beresiko terjadi di Polda Metro Jaya adalah dengan cara menginventarisir resiko-resiko keamanan yang dapat terjadi di Markas Polda Metro Jaya. Resiko keamanan yang mungkin terjadi meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

4.2.1.1 FAKTOR LINGKUNGAN

Faktor lingkungan berhubungan dengan bangunan – bangunan serta gedung – gedung yang ada atau yang berdiri di dalam Markas Polda Metro Jaya sebagai awal perhatian penyelenggara pengamanan atau pimpinan puncak dalam mengamankan fasilitas – fasilitas gedung itu sebagai aset, penerapan manajemen keamanan markas Kepolisian harus memperhatikan faktor lingkungan dan menerapkan pengawasan penerapan lingkungan. Beberapa penyebab gangguan

yang berasal dari kondisi alam seperti bencana alam, gempa dan banjir sudah barang tentu tidak dapat dihindari namun setidaknya dengan analisa yang baik dan penerapan konsep manajemen pengamanan yang terstandar dapat meminimalisir resiko dan kerugian yang disebabkan oleh bencana alam tersebut. Diantara hal – hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang berskala besar sesuai dengan Teori CPTED sebelum mendirikan bangunan atau gedung agar direncanakan bangunan atau gedung tersebut memiliki konstruksi yang baik sehingga memiliki ketahanan terhadap gempa, bajir atau bencana alam lainnya, dengan kata lain sebelum mendirikan bangunan konstruksinya harus di perkokoh dengann teknologi pembangunan yang memadai. Sudah barang tentu dengan adanya manajemen pengamanan yang baik terhadap asset – asset tersebut maka pencegahan kerugian yang besar dapat diminimalisir sedimikian rupa. Faktor lingkungan yang mempengaruhi penyelenggaraan pengamanan di Polda Metro Jaya meliputi beberapa faktor antara lain;

- a. Faktor eksternal yaitu faktor – faktor yang berasal dari luar lingkungan Polda metro Jaya contohnya Unjuk Rasa atau Demondtrasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang diluar personel Polda Metro Jaya.
- b. Faktor Internal yaitu faktor – faktor yang berasal dari markas Polda Metro Jaya, antara lain : luasnya kawasan markas Polda Metro Jaya tidak sebanding dengan tugas pengamanan *inhouse* dan *outsourcing* yang ada saat ini. Sarana dan prasarana tugas pengamanan yang kurang memadai baik dalam hal jenis dan jumlah seperti HT sebagai sarana telekomunikasi, CCTV dan masih banyak yang lainnya. Ancaman gangguan atau tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh personel Polda Metro Jaya sendiri.

4.2.1.2 FAKTOR MANUSIA

Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pengamanan ini adalah manusia. Penyelenggaraan pengamanan terhadap fasilitas dan aset – aset yang ada di Polda Metro Jaya sebagaian besar dilakukan oleh

manusia. Jika ada anggapan bahwa tidak adanya kemungkinan orang – orang yang mempunyai motifasi kejahatan terhdap markas Kepolisian maka menurut hemat peneliti itu adalah sesuatu persepsi yang keliru justru faktor manusia ini adalah ancaman terbesar bagi stabilitas penyelenggaraan pengamanan namun faktor manusia ini menjadi penting bukan hanya manusia yang berasal dari luar, namun manusia yang berasal dari dalam markas Kepolisian itu sendiri yang tidak lain adalah personel Polda Metro Jaya adalah merupakan faktor manusia yang paling besar beresiko melakukan kejahatan yang lebih berbahaya, hal ini disebabkan karena personel yang bertugas di markas Polda Metro Jaya lebih mengetahui dan mengenal secara detil situasi dan kondisi markas Kepolisian dimana dia bertugas sehingga apabila ada personel yang berniat melakukan kejahatan maka dari segi perencanaan personel tersebut lebih banyak mempunyai data daripada orang yang berasal dari luar.

4.2.1.3 FAKTOR FINANSIAL

Untuk dapat menyelenggarakan manajemen pengamanan yang terintegrasi secara sistematis yang ada di markas Polda Metro Jaya dibutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga dengan mengalasankan faktor anggaran yang tersedia maka penyelenggaraan pengamanan kurang menjadi perhatian serius kalau para pimpinan puncak Polda Metro Jaya mau menganalisa lebih lanjut lagi, maka sebenarnya dengan menerapkan suatu standar sistem manajemen pengamanan yang baik yang terbiayai dengan anggaran yang cukup maka resiko gangguan keamanan yang dapat mengganggu dinamika kinerja atau personel yang bertugas di Markas Polda Metro Jaya dapat diminimalisir.

Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dalam manajemen pengamanan secara tidak langsung dapat mengurangi resiko gangguan keamanan yang bersumber dari manusia dan lingkungan sehingga ini dapat menjadi upaya pencegahan terhadap kejahatan yang mungkin terjadi, dengan kata lain resiko hilangnya dan atau rusaknya aset-aset dan fasilitas dalam penguasaan Polda Metro Jaya lebih kecil sehingga kerugian yang diderita tidak bes

4.2.2 UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH YANMA POLDA METRO JAYA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN MANAJEMEN KEAMANAN UNTUK MENGANTISIPASI SEGALA BENTUK RESIKO ANCAMAN DAN KEJAHATAN TERHADAP POLDA METRO JAYA

Upaya Taktis dalam penyelenggaraan manajemen pengamanan yang dilakukan oleh Yanma Polda Metro Jaya dalam proses pengamanan markas sebagai aset – aset Negara yang dilindungi, maka upaya Yanma Polda Metro Jaya diaplikasikan sebagai upaya dalam bentuk preventif dan represif.

1) Upaya Taktis manajemen pengamanan secara preventif.

Pencegahan (preventif) dengan tujuan untuk mencegah timbulnya ancaman dan gangguan untuk menjaga stabilitas keamanan di Polda Metro Jaya pada prosesnya meliputi bentuk kegiatan – kegiatan baik dalam bentuk bimbingan dan latihan kepada personel petugas pengamanan serta personel lainnya untuk secara sadar akan pentingnya suatu situasi dan kondisi yang berjalan dengan aman dan tertib di lingkungan kerjanya baik yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung bahkan secara spontan dapat mengajak masyarakat untuk turut serta membantu Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungan atau area Markas Polda Metro Jaya, bentuk peranan yang dapat dilakukan oleh petugas pengamanan dalam suatu upaya yang bersifat preventif ini dapat diasumsikan sebagai upaya deteksi dini (early warning) yang berupa pengoperasian peralatan – peralatan elektronik yang dijadikan sebagai sarana dalam membantu petugas pengamanan untuk mengawasi daerah – daerah atau ruang yang cakupannya lebih luas atau sulit ke dalam satu media penyimpan data yang nantinya juga dapat memudahkan petugas dalam melakukan pengecekan ulang atau penyidikan terhadap gangguan atau kejahatan yang terjadi di dalam atau di luar Kawasan Polda Metro Jaya

(1) Pengaturan dan Pengendalian Pos Penjagaan atau Pos Pengamanan Markas

Dalam menempatkan personel pengamanan baik petugas kepolisian atau petugas pengamanan inhouse dan outsourcing yang bertugas melaksanakan pintu gerbang keluar masuk markas Polda, pos penjagaan, pos pemantauan, piket fungsi, pintu VVIP harus diawasi atau diisi oleh para petugas – petugas pengamanan yang di dalam aturan yang tercantum didalam Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 adalah menjadi kewenangan Yanma Polda Metro jaya tetapi dikarenakan suatu hal baik dilihat dari aspek Psikologi dan tradisi yang dibudayakan oleh pejabat – pejabat sebelumnya menyebabkan pada kenyataannya tugas pengamanan ini tidak semestinya di bawah pengendalian dan pengawasan Yanma, sebagian peran dan tugasnya dilakukan juga oleh fungsi lain seperti Bid Propam Polda Metro Jaya, sehingga Ka Yanma tidak dapat secara sinergi dan simultan mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pengamanan markas.

Pengaturan dan penjagaan yang seharusnya dikendalikan Ka Yanma Polda Metro Jaya namun dilakukan oleh Sub Bid Provos Bid Propam Polda Metro Jaya, dari menganalisa dan kajian manajemen pengamanan di atas sebenarnya tugas pengamanan markas harus dibawah satu kendali supaya jelas *job description* tugas yang harus dilakukan oleh petugas di lapangan, seharusnya dari hasil wawancara oleh peneliti kepada Kasubag Pamsik AKP. Sende Hasibuan sebenarnya fungsi Sub Bid Provos di pintu gerbang dan pos – pos penjagaan tersebut lebih difokuskan kepada fungsi pengawasan jalannya proses pengamanan markas dan bukan secara fisik melakukan penjagaan di pos – pos tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri pada saat terjadinya pembakaran mobil Wairwasum Mabes Polri dalam keterangan

Persnya, mengatakan bahwa atas kejadian tersebut sudah melakukan pemeriksaan terhadap Ka Yanma Mabes Polri karena menurut beliau Ka Yanma yang bertanggung jawab dalam pengamanan Markas dalam lingkungan Mabes Polri.

Kelemahan lain yang ditemukan oleh peneliti dalam pengaturan dan penjagaan terhadap Ka Yanma tidak adanya suatu aturan (petunjuk yang jelas) tentang kewenangan pengaturan area parkir terhadap personel polri (anggota) dengan masyarakat. Disamping faktor – faktor teknis yang dijumpai penelitian ternyata terdapat beberapa faktor non teknis seperti adanya Stikma atau labeling yang diberikan kepada personel yang bertugas di Yanma adalah orang – orang buangan atau orang – orang yang bermasalah, hal ini sebenarnya baik secara langsung maupun tidak langsung terdapat peran yang besar dari pimpinan dalam hal pembinaan terhadap personel karena kebiasaan apabila ada personel yang akan dimutasi secara Demosi maka Yanma akan menjadi tempat atau media penyaluran personel – personel tersebut sehingga *stigma* dan *labeling* tersebut menurut peneliti hal tersebut akan melemahkan semangat dan kinerja yang ditunjukkan oleh petugas – petugas pengamanan tersebut.

Dalam aspek pengaturan dan pengendalian tugas penjagaan atau pengamanan markas dilakukan secara simultan selama 24 jam dengan pembagian waktu jaga dalam 3 shift yang mana dilakukan masing – masing shift selama 12 jam, pengaturan dan pembagian penjagaan serta pengamanan ini dikendalikan oleh seorang kepala Sub Dit ataupun Sub Bag dari masing – masing struktural yang ditunjuk menjalani tugasnya selama 12 jam di Yanma Polda Metro Jaya sebagai posko induk untuk pengendalian dan pengaturan serta penjagaan pengamanan markas sesuai dengan tempat – tempat yang telah disusun dalam daftar petugas penjagaan atau pengamanan markas. Dalam hal pengendalian tugas personil pengamanan markas

sesuai dengan daftar yang sudah dibuat maka selain melaksanakan tugas pengamanan petugas tersebut juga melakukan kegiatan lain seperti patroli baik menggunakan roda 2 maupun patroli jalan kaki, pengawaalan dan pengisian mutasi guna sebagai bahan pertanggung jawaban dan laporan kepada pimpinan.

(2) Pengawasan

Peranan petugas pengamanan markas dalam fungsi pengawasan dilakukan dengan tugas penjagaan, dalam fungsi pengawasan ini petugas diharapkan dapat mengamati tingkah laku orang ataupun barang yang dianggap dapat menimbulkan resiko ancaman dan gangguan stabilitas keamanan markas pada saat dia bertugas pada shift tersebut, dalam fungsi pengawasan ini dibutuhkan satu fungsi pengawasan yang bertugas mengawasi petugas pengamanan markas dan jalannya proses pelaksanaan tugas tersebut yang mana tugas inilah yang dilakukan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya.

(3) Patroli

Pelaksanaan tugas patroli yang dibebankan kepada petugas pengamanan markas dengan maksud untuk mempersempit ruang gerak dari timbulnya resiko akan ancaman dan gangguan bahkan kejahatan yang terjadi di kawasan Polda Metro Jaya, sehingga juga dapat terselenggaranya proses pengamanan yang menyentuh area – area atau fasilitas kantor yang jauh atau kurang terpantau dari pos penjagaan, patroli yang dilakukan oleh petugas inhouse dan outsourcing juga ditujukan kepada sekitar area luar markas Polda Metro Jaya dan area dalam markas Polda Metro Jaya pada jam – jam rawan sesuai dengan kirka intelijen.

2) Upaya Taktis manajemen pengamanan secara Represif

Upaya taktis manajemen pengamanan secara refresif atau penindakan dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Penanganan Tempat Kejadian Perkara

Seberapa tinggi tingkat pengamanan yang dilakukan oleh petugas pengamanan markas yang disimpulkan oleh peneliti termasuk level 3 kategori medium security dilihat dari fakta – fakta dan kondisi yang ditemukan peneliti masih terdapat faktor – faktor gangguan bahkan kejahatan terhadap markas Polda Metro Jaya sehingga tidak menutup kemungkinan dalam di satu bagian areal markas Polda Metro Jaya dapat terjadi tempat kejadian perkara (TKP), apabila hal ini terjadi peranan petugas pengamanan dengan petugas Dit Reskrim yang akan melaksanakan pengolahan tempat kejadian perkara dengan mengambil langkah seefektif mungkin dalam mempertahankan tempat kejadian perkara untuk tidak rusak sehingga memudahkan tim Dit Reskrim dalam melakukan olah TKP apabila pelaku seketika dapat diamankan maka petugas pengamanan markas bertugas melakukan pengamanan sementara sampai dapat diserahkan kepada petugas Reskrim yang akan melakukan penyidikan.

- (2) Kasus Pencurian di dalam areal parkir atau didalam fasilitas kantor oleh salah satu oknum anggota polisi

Dalam menangani kasus yang dilakukan oleh orang dalam sama dengan menangani pengamanan TKP dimana petugas dapat mengamankan oknum tersebut untuk sesegera mungkin melakukan koordinasi kepada pihak Bid Propam Polda Metro Jaya dalam hal ini Sub Bid Provos untuk dapat diproses lebih lanjut.

- (3) Penanganan Peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Polda Metro Jaya

Seiring dinamika perkembangan politik belakangan ini seperti memberikan angin segar kepada masyarakat untuk dapat mengekspresikan pendapatnya untuk memvisualisasikan ketidakpuasannya dalam suatu bentuk orasi atau sikap yang mana orasi dan sikap itu tidak jarang terjadi di kantor Kepolisian di seluruh Nusantara ini. Pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti pada saat terjadi unjuk rasa oleh sekelompok masyarakat di Mapolda, petugas *inhouse* dan *outsourcing* terlihat sudah terbiasa dengan

fenomena yang terjadi tersebut, ketenangan yang ditunjukkan dalam menghadapi massa tersebut, peneliti memberikan kesimpulan sementara bahwa kejadian pengunjung rasa tersebut sudah menjadi hal biasa sehingga peneliti dapat melihat secara fisik dan psikologis bahwa tidak ada kekhawatiran yang berlebihan, tetapi dalam mengantisipasi tindakan – tindakan anarkhis dan kejadian – kejadian kontijensi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya aspirasi massa tersebut maka petugas pengamanan markas digantikan oleh anggota Brimob yang secara prosedural sebagai pasukan pendukung untuk menghadapi situasi meningkatnya eskalasi yang dimungkinkan dapat memasuki markas Polda Metro Jaya.

Secara umum peranan petugas pengamanan markas kepolisian yang dilakukan oleh Yanma Polda Metro Jaya di dalam rangkaian kegiatan tugasnya yang diwujudkan sebagai upaya pencegahan (prefentif) dan penindakan (represif) yang diwujudkan secara langsung dalam mengantisipasi bahkan penanganan awal yang dapat menimbulkan resiko gangguan, ancaman bahkan kejahatan yang dapat diderita oleh Polda Metro Jaya.

Dalam prosesnya sebagai unsur deteksi dini atau penanganan awal dalam proses penegakan hukum sudah dapat terlaksana cukup baik, tetapi dikarenakan masih ditemukannya beberapa kelemahan yang disebabkan oleh beberapa faktor – faktor baik secara teknis maupun taktis bahkan suatu tradisi pemberian stigma dan labeling yang dibudayakan oleh pimpinan puncak terdahulu diharapkan dari penelitian ini dapat ditemukan satu alternatif solusi manajemen pengamanan yang diselenggarakan oleh Yanma Polda Metro Jaya sehingga nantinya dapat memberikan pandangan positif data yang dapat menjadikan satu informasi bagi pimpinan di setiap satuan kewilayahan pada umumnya dan Polda Metro Jaya pada khususnya sehingga bisa menjadikan suatu buah pikir yang kritical positif yang

dilihat dari kacamata akademis dengan menyajikan data – data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk dijadikan informasi kepada pimpinan dalam mengambil langkah membuat suatu kebijakan penerapan manajemen penamanan yang mempunyai standar kalifikasi yang baik dan sistematis sehingga dapat terciptanya suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamika hubungan kerja yang sehat di lingkungan markas kepolisian.

4.2.3 FAKTOR PENYEBAB LEMAHNYA MANAJEMEN PENGAMANAN YANG DILAKUKAN OLEH YANMA

Dalam membedah faktor penyebab lemahnya manajemen pengamanan di Polda Metro Jaya oleh Yanma, maka peneliti menggunakan pisanalisis dari CPTED dan pencegahan kejahatan situasional.

Dalam frame CPTED sebagaimana yang dimuat dalam bab II diatas, maka konteks pengaman yang dilakukan dikaitkan dengan situasi lingkungan dengan terjadinya tindak kejahatan. Lahirnya CPTED ini sangat dipengaruhi pemikiran dan konsep diatas, karena CPTED sangat berkaitan dengan desain fisik lingkungan yang dapat mempengaruhi kejahatan. CPTED itu sendiri dalam penelitian ini menunjukkan 1) Kejahatan adalah spesifik dan situasional; 2) Distribusi kejahatan berhubungan dengan penggunaan lahan dan jaringan transportasi dan ; 3) Pelaku oportunist akan melakukan kejahatan di tempat yang sudah mereka ketahui dengan baik.

Penyelenggaraan Manajemen Pengamanan pada Markas Polda Metro Jaya sesuai dengan pendapat MC. Crie (2001) mengatakan bahwa *Crime Prevention Through and Environment Design* (CPTED) adalah :

Upaya pencegahan kejahatan dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan designlingkungan demi menghindari kerugian, teori ini memiliki 4 prinsip dasar perencanaan penyelenggaraan pengamanan, setelah ke 4 prinsip dasar perencanaan penyelenggaraan pengamanan dibandingkan dengan kondisi

riil pada saat melakukan penelitian ini, maka peneliti menganalisa dengan hasil sebagai berikut :

- a. *Natural Surveillance* (Pengawasan Lingkungan) pada prinsipnya pelaku kejahatan tidak suka diawasi, karena hal tersebut meningkatkan perasaan akan resiko yang akan dihadapi oleh pelaku, pengawasan yang dilakukan oleh Yanma sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan manajemen pengamatan dengan cara melakukan pengamatan lingkungan di sekitar area Polda Metro jaya maupun lingkungan didalam area Polda Metro Jaya yang mencakup gedung-gedung, fasilitas dan sarana lainnya yang menjadi aset Polda Metro Jaya dapat terawasi secara jelas dan konfrensif sehingga memudahkan dalam pengkoordinasian atau melakukan peringatan bila terjadi suatu situasi yang tidak diinginkan. Dalam pengawasan ini pula jalan, gang, akses pintu masuk, akses pintu keluar dapat di pastikan terpantau oleh petugas. Selain pengawasan yang dilakukan oleh faktor manusia sebenarnya pengawasan lingkungan ini dapat diawasi atau di pantau dengan menggunakan alat CCTV (circuit closet television) dan untuk sarana peringatan dapat menggunakan alat berupa alarm, dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa alat – alat inipun menjadi kewenangan Yanma dalam mengoperasikan dan memaintaince akan tetapi dalam kenyataannya pengoperasian alat – alat tersebut dilakukan oleh unsure lain, kelemahan lain yang ditemukan dari segi jumlah bahwa CCTV yang ada masih dirasakan sangat kurang malah yang sudah adapun tidak dapat digunakan atau dengan kata lain sudah rusak.
- b. *Natural Access Control*, dalam hal ini berhubungan dengan pintu masuk, dan segala bentuk pagar yang membatasi orang untuk masuk kesuatu Lingkungan yang berada di markas Polda Metro Jaya, hal ini berhubungan dengan bangunan yang bersebelahan secara langsung serta jalan – jalan menuju atau yang digunakan sebagai jalan alternatif oleh Polda Metro Jaya belum maksimal, sehingga terkadang

membutuhkan petugas yang bertindak sebagai pengatur atau pelaksana pengamanan jalur baik masuk maupun yang keluar dari Markas Polda Metro Jaya. Termasuk ketersediaan ruang untuk pembagian areal parkir yang dapat di gunakan oleh personel yang bertugas di Markas Polda Metro Jaya dengan areal parkir yang dapat digunakan oleh masyarakat yang datang ke Polda Metro Jaya.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap lingkungan yang berada di sekitar atau di dalam Mapolda Metro Jaya sudah dilakukan suatu pengaturan yang cukup baik mengingat akses pintu yang digunakan untuk masuk maupun keluar dari Polda Metro Jaya sudah ditentukan di area – area yang semestinya dan juga di sekitar Markas Polda Metro Jaya sebenarnya masih terdapat suatu area yang dapat di gunakan oleh masyarakat yang tuna wisma untuk mendirikan rumah atau menetap di kawasan tersebut akan tetapi karena pengawasan pengamanan tersebut di *back up* oleh petugas pengamanan dari SAG yang bertugas mengawasi wilayah SCBD dan sekitarnya sehingga dapat meringankan tugas pengamanan yang dilakukan oleh petugas pengamanan inhouse dan outsourcing Polda Metro Jaya.

Dari analisa diatas motifasi yang mendorong jumlah dan kualitas kejahatan yang beresiko mengancam markas Polda Metro Jaya sangat dipengaruhi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengamanan tersebut untuk menambah perkuatan didalam pengamanan lingkungan Markas Polda Metro Jaya ini dirasakan belum maksimal karena kurangnya *target hardening* baik dalam bentuk tembok pembatas maupun *barrier* yang mana didalam pengadaannya dibutuhkan suatu kebijakan dari pimpinan puncak Polda Metro Jaya.

- c. *Territorial Reinforcement* (Pembagian Area), pembagian area yang dalam konsepnya meliputi pengawasan halaman, gedung, fasilitas dan lingkungan sekitar markas Polda Metro Jaya sehingga hal ini apabila di terapkan maka dapat menjadi suatu upaya deteksi secara dini dalam mengenali dan mengantisipasi setiap ancaman dan gangguan

keamanan baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Markas Polda Metro Jaya sehingga seharusnya dalam pembagian area ini memiliki suatu ruang yang termonitor dan terkendali yang terdapat di antara cakupan perpindahan transisi area yang satu dengan yang lainnya, dari hasil pengamatan peneliti pembagia area pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen pengamanan di markas Polda Metro Jaya yang di lakukan oleh petugas pengamanan inhouse dan outsourcing dilakukan oleh masing pimpinan di sub – sub struktural yang ada di Polda Metro Jaya seperti contoh di gedung TMC (*Traffic management centre*) petugas keamanan *inhouse* dan *outsourcing* dibawah pengendalian Dir lantas Polda Metro Jaya, sesuai dengan *job description* tugas yang diamanatkan dalam Perkap Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja di tingkat Kepolisian Daerah penyelenggaraan dan Pembinaan terhadap petugas keamanan *inhouse* dan *outsourcing* dilakukan oleh Ka Yanma Polda Metro Jaya.

Hal ini menjadi kelemahan di dalam terselenggaranya suatu manajemen keamanan yang terintegrasi dengan baik. Pengadaan akses kontrol yang dilakukan untuk mencegah pihak yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam fasilitas kantor atau gedung yang ada di dalam markas Polda Metro Jaya tidak dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan kurangnya adanya perhatian yang serius dalam perawatan alat – alat pengamanan tersebut.

Pagar yang merupakan pengendalian akses ke dalam fasilitas sesuai dengan Teori pencegahan situasional dibuat mengitari seluruh area Polda Metro Jaya untuk upaya pencegahan pihak – pihak yang tidak berkepentingan dapat memasuki kawasan Polda Metro jaya dengan mudah sedangkan bila kita tinjau dari sekuriti fisik pagar merupakan bentuk sarana pengamanan perimeter berupa *fences*.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penerliti sesuai dengan yang di utarakan Ka Yanma AKBP Agus Sudrajat, dalam pertanyaan yang diajukan peneliti dengan pertanyaan, apakah menurut Ka Yanma

sebagai seorang Kepala yang membawahi suatu unsur pengamanan markas yang bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pengamanan apakah pagar yang sudah ada yang mengelilingi Polda Metro Jaya bila dilihat dari segi ukuran serta perkiraan kondisi kekuatan materi yang ada dapat melindungi seluruh fasilitas dan aset yang ada di markas Polda Metro Jaya, dengan sedikit keraguan ataupun kekhawatiran dalam memberikan keterangan agus mengatakan bahwa apabila dilihat dari segi ukuran dan kekuatan materi yang sudah ada pagar tersebut belum memenuhi standar untuk melindungi markas Polda Metro Jaya sehingga dikhawatirkan pihak – pihak yang tidak berkepentingan dapat memasuki ke kawasan Polda Metro Jaya dengan berbagai cara dan dari berbagai sudut seperti memanjat dan melompati pagar dari daerah sekitar Mapolda yang tidak diawasi dan tidak tersentuh oleh pengawasan pihak keamanan.

Secara gambaran umum dari segi pembagian area ini sesungguhnya sudah di terapkan dalam mengatur pengamanan yang dilakukan oleh petugas pengamanan namun dalam pelaksanaannya hal tersebut belum dapat dilakukan oleh Ka Yanma sebagai pihak yang ditugasi untuk menyelenggarakan manajemen pengamanan tersebut.

- d. *Maintenance and management*, pemeliharaan dan “Citra“ suatu wilayah dapat berdampak besar pada apakah tempat tersebut akan menjadi sasaran, untuk mendapatkan suatu reputasi dalam pencitraan untuk penata kelolaan pengamanan terhadap lingkungan yang baik terawat dan mudah dalam operasionalisasi penggunaan ruang kosong yang diprogramkan secara efektif yang sesuai dengan peruntukannya menurut pengamatan peneliti hal tersebut sudah dilakukan Polda Metro Jaya, hal ini dapat kita lihat dari pengaturan perkantoran atau gedung serta pos – pos penjagaan yang sudah terlaksana secara baik namun akibat penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap masyarakat mengakibatkan kurangnya ketersediaan waktu, tenaga dan anggaran dalam pemeliharaan tempat gedung atau

lokasi – lokasi tersebut sehingga terkadang pada sudut – sudut atau lokasi masih dijumpai kondisi atau suatu tempat yang belum sempat dilakukan perawatan dan ditata secara rapi sehingga menimbulkan kesan atau citra yang sudah dibangun kurang mendapatkan penilaian yang positif dari masyarakat.

Dalam frame pencegahan kejahatan situasional sebagaimana yang dimuat dalam bab 2, terdapat beberapa *guiden* atau petunjuk. Keberadaan petugas pengamanan *inhouse* dan *outsourcing* dalam suatu kawasan juga termasuk bentuk upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke dengan langkah pengawasan pintu ke luar (*Screen Exist*), memperluas pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*) dan menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan (*deflect offender*).

- (1) Pengawasan pintu ke luar (*screen exist*). Petugas pengamanan *inhouse* dan *outsourcing* berkewajiban mengawasi pintu masuk / ke luar kawasan. Dalam pelaksanaan mengawasi juga diikuti dengan kegiatan lain seperti memeriksa orang dan barang yang masuk dalam kawasan Markas Polda Metro Jaya, serta menanyakan identitas dan keperluan orang yang ingin masuk ke dalam kawasan Markas Polda Metro Jaya. Pekerjaan ini membutuhkan ketahanan mental dan fisik yang baik akan lebih mudah dilakukan apabila Petugas pengamanan *inhouse* dan *outsourcing*nya berusia muda, berlatar belakang pendidikan yang cukup (paling rendah SMA atau sederajat) dan mempunyai pendidikan petugas pengamanan *inhouse* dan *outsourcing* bersertifikat. Peneliti melihat bahwa petugas pengamanan *inhouse* dan *outsourcing* yang bertugas di Polda Metro Jaya ini pada umumnya masih berusia muda walaupun ada yang berusia tua namun tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas pengamanan kawasan Polda Metro Jaya.
- (2) Memperluas Pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*). Pengawasan formal memang merupakan tugas dari petugas

pengamanan *inhouse* dan *outsourcing* di lingkungan Mapolda demi terciptanya suasana aman, dimana tidak kehilangan asetnya.

- (3) Menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan (*deflect offender*). Keberadaan petugas pengamanan *inhouse* dan *outsourcing* di Polda Metro Jaya akan menyebabkan pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Hal ini tentu saja dapat menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan, karena biasanya pelaku kejahatan akan melakukan kejahatan dengan memilih terlebih dahulu tingkat keamanannya yang longgar pada suatu kawasan yang akan dijadikannya sebagai sasaran, Oleh sebab itu, diperlukan Petugas pengamanan *inhouse* dan *outsourcing* yang bertugas dan dapat bersikap tegas, bermental baik, profesional dan memiliki latar belakang yang baik dari segi pendidikan atau sudah pernah mengikuti pelatihan petugas pengamanan *inhouse* dan *outsourcing* serta memiliki latar belakang bela diri.

4.3.4. ALTERNATIF SOLUSI

Berdasar pada identifikasi kelemahan-kelemahan diatas, maka alternatif solusi yang diajukan oleh peneliti dalam hal manajemen pengamanan di Polda Metro Jaya oleh Yanma mengacu pada CPTED adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan Alami

Strategi pertahanan pada lingkungan berupa :

- 1) Setiap gedung kantor yang ada mempunyai fasilitas keamanan masing-masing.
- 2) Penghijauan yang ada disekitar gedung tidak membatasi arah pandang sehingga tidak menciptakan ruang terisolir.
- 3) Penyatuan areal parkir untuk masyarakat ditempat yang mudah diawasi.

- 4) Memiliki ruang khusus untuk pelayanan masyarakat terpadu, sehingga mudah mengawasi setiap aktivitas masyarakat yang ada di markas Polda Metro Jaya.
- 5) Menambah penerangan di beberapa titik yang rawan pada malam hari sehingga dapat diawasi oleh petugas pengamanan.

Strategi pertahanan pada pembangunan berupa :

- 1) Memiliki sarana jendela yang baik guna memudahkan jarak pandang pada lingkungan sekitar
- 2) Orientasi bangunan ke bangunan lainnya tidak terbatas oleh sesuatu atau pohon –pohon yang menyulitkan dalam pengawasan
- 3) Terdapatnya fasilitas penerangan yang baik di sekitar bangunan
- 4) Jalan masuk harus dapat dilihat secara langsung dari fasilitas keamanan yang tersedia dikantor tersebut.

b. Perkuatan Teritorial

Strategi pertahanan pada lingkungan berupa pembagian area publik, area semi publik, area terbatas terbatas atau privat dengan menggunakan :

- 1) Mendisain pagar atau pembatas area
- 2) Pembedaan pada tampilan ruangan
- 3) Pengaturan rambu-rambu atau penunjuk arah di dalam area markas Polda Metro Jaya
- 4) Menambah penerangan di beberapa titik rawan pada malam hari
- 5) Penataan landscape yang tidak membatasi arah pandangan untuk memudahkan pengawasan.

Strategi pertahanan pada pembangunan berupa :

- 1) Kejelasan akses masuk dan keluarnya kendaraan dan orang yang melalui pintu gerbang harus dapat dilihat langsung oleh pos penjagaan atau fasilitas keamanan yang tersedia
- 2) Pembedaan tampilan antara ruang publik dan pribadi harus tampak signifikan dengan penunjuk arah /rambu yang jelas
- 3) Portal yang membatasi jalan masuk untuk publik dan anggota Polda Metro Jaya harus ditempatkan ditempat yang sesuai
- 4) Adanya penomoran atau penulisan identitas/ kode ruangan di setiap ruang sehingga memudahkan orang dalam pencarian ruangan yang hendak dituju
- 5) Adanya penamaan gedung

c. Kontrol Akses

Strategi pertahanan pada lingkungan berupa Pembatasan akses keluar masuk orang dengan cara :

- 1) Membatasi pintu gerbang keluar masuk Polda menjadi maksimal 2 (dua) pintu gerbang
- 2) Pengaturan lalu lintas satu arah didalam area jalan didalam markas Polda Metro Jaya
- 3) Pemasangan portal untuk membatasi area publik dengan area lainnya seperti area pribadi
- 4) Membatasi jalan setapak untuk pedestrian yang akan masuk ke Polda Metro Jaya.

Strategi pertahanan pada pembangunan berupa :

- 1) Arah pintu masuk menghadap ke jalan, sehingga memudahkan lalu lintas orang dan pengawasan oleh petugas pengamanan

- 2) Pembuatan pembatas guna mengarahkan masyarakat agar tidak memasuki wilayah privat tanpa izin
- 3) Pintu ruangan yang diakses menuju kantor –kantor layanan masyarakat agar menunjukkan indikasi yang jelas mengenai rute mana yang dapat dilalui publik dan mana yang bersifat privat.

d. Perlindungan Sasaran

Strategi pertahanan pada lingkungan berupa :

- 1) Membuat pos penjagaan untuk setiap gedung kantor yang ada di Polda metro jaya dengan memperhatikan factor *community policing* sehingga menghilangkan kesan militeristik
- 2) Yang berguna juga sebagai pos untuk piket pelayanan masyarakat setiap fungsi.
- 3) Pembatasan aksesibilitas terhadap ruang pelayanan public dan ruang privat pimpinan dan ruang terbatas lainnya.
- 4) Pembagian area parkir umum dan area parkir khusus anggota Polda Metro Jaya.

Strategi pertahanan pada pembangunan berupa :

- 1) Adanya pembatas/pagar yang jelas dengan konstruksi yang memperhatikan faktor ketinggian dan kekuatan bangunan pagar
- 2) Menggunakan alat bantu keamanan seperti penambahan kunci, pemasangan access control berupa finger print dan retina scan
- 3) Mempunyai tempat penyimpanan barang bukti yang memadai
- 4) Mempersiapkan ruang evakuasi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan
- 5) Semua bangunan memiliki penerangan yang baik

- 6) Menambah kunci pengaman di setiap pintu dan jendela, jika dianggap perlu menambah teralis untuk ruang data dan tempat lainnya yang bersifat vital

e. Pendukung Aktivitas

Strategi pertahanan pada lingkungan berupa membuat kegiatan –kegiatan pelatihan untuk personel di ruang-ruang atau area yang belum berdirinya bangunan.

f. Citra dan lingkungan

Strategi pertahanan pada lingkungan berupa

- 1) Untuk pencitraan yang baik sebaiknya bangunan yang ada didalam markas Polda metro Jaya tidak terlalu padat
- 2) Mengurangi warna warna gedung yang kurang mencitrakan polisi
- 3) Menghadirkan symbol-simbol yang tidak terkesan menakutkan bagi masyarakat

Strategi pertahanan pada pembangunan berupa :

- 1) Karakter bangunan yang ada tidak menunjukkan kesan seram atau dapat menimbulkan rasa takut pada masyarakat
- 2) Vegetasi yang terawat dengan baik
- 3) Tersedianya penerangan yang cukup di setiap bangunan pada malam hari.

Berdasarkan perspektif Pencegahan Kejahatan Situasional dari Clarke, maka alternatif solusi yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya (*increase the effort*), langkah-langkahnya meliputi :
 - a. Memperkuat sasaran (*target hardening*) yang dapat dilakukan dengan cara mengunci pintu ruangan yang tidak digunakan, memasang teralis dan gembok.
 - Semua pintu di setiap gedung wajib memiliki kunci tambahan

- Beberapa jendela yang rusak harus diperbaiki
 - Menambahkan teralis untuk jendela/pintu yang mana terdapat barang-barang penting atau tempat penyimpanan barang bukti
- b. Mengendalikan akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*)
- Setiap anggota wajib menggunakan id card saat masuk ke dalam gedung
 - Setiap tamu wajib diberikan tanda pengenal, yang mana sebelumnya meninggalkan tanda pengenal pribadi di pos penjagaan.
- c. Mengawasi pintu keluar (*screen exits*)
- Setiap gedung wajib memasang CCTV
 - Pintu keluar masuk dekat dengan fasilitas keamanan yang dapat memudahkan petugas pengamanan dalam mengawasinya
- d. Menjauhkan pelaku dari target (*deflect offender*).
- Ruang khusus tempat penyimpanan informasi dan ruang penyimpanan barang bukti harus diatur sedemikian rupa didalam fasilitas dengan pengamanan maksimal sehingga menyulitkan pelaku untuk mengakses kefasilitas tersebut
 - Menempatkan peralatan keamanan canggih di sekitar fasilitas penyimpanan.
 - Meminta konfirmasi kewenangan setiap petugas yang hendak masuk ke fasiliats tersebut dengan menanyakan surat perintah dan sebagainya.
- e. Mengendalikan peralatan/senjata yang digunakan pelaku (*control tools/weapons*).
- Memeriksa setiap alat atau bawaan yang digunakan oleh setiap orang yang hendak masuk ke area markas Polda Metro Jaya
 - Memeriksa kendaraan yang masuk ke Polda Metro Jaya dengan alat sensor bom dan alat sekuriti lainnya.

2. Meningkatkan resiko (*increase the risk*) yang langkah-langkahnya meliputi :
 - a. Memperluas penjagaan (*extend guardianship*)
 - Memperbanyak pos penjagaan di setiap fasilitas kantor dengan memperhatikan faktor community policing yang ramah dan nyaman
 - Menambah sarana dan prasarana fasilitas penjagaan
 - b. Membantu pengawasan alamiah (*assist natural surveillance*)
 - Pada prinsipnya pelaku tidak senang diawasi sehingga sebaiknya arah pandangan antara bangunan dengan fasilitas keamanan tidak terhalang oleh apapun juga.
 - Menempatkan petugas patroli di daerah-daerah yang rawan.
 - c. Mengurangi anonimitas (*reduce anonymity*)
 - Digalakkan kegiatan tatap muka antara anggota di setiap satuan kerja di Polda Metro Jaya
 - Ditingkatkan kegiatan jam pimpinan dengan anggota
 - Pemberlakuan tanda pengenalan dan pencatatan identitas pada setiap tamu/masyarakat yang masuk ke Polda Metro Jaya
 - d. Memberdayakan manajer lokasi (*utilize place managers*)
 - Memberdayakan perwira-perwira piket fungsi untuk mengawasi lokasi disekitar bangunan
 - Menempatkan perwira pengawas markas sebagai manajer yang bertugas mengatur para petugas pengamanan markas
 - e. Memperkuat pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*)
 - Menempatkan Subdit Provos Bid Propam sebagai pengawas formal yang mengawasi para petugas pengamanan
 - Meningkatkan kerjasama antara satuan kerja untuk pengawasan baik terhadap anggota maupun masyarakat.

3. Mengurangi imbalan (*reduce the rewards*) yang langkah-langkahnya meliputi
 - a. Menyembunyikan target (*conceal targets*)
 - Membuat lemari khusus kepada barang-barang berharga yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi di setiap bangunan.
 - Membuat design “pengalihan” di setiap ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang berharga dan rahasia.
 - b. Memindahkan target (*remove target*).
 Untuk mobilisasi yang efektif sebaiknya barang-barang yang mempunyai nilai khusus dapat dipindahkan dengan sarana yang sudah disiapkan, sehingga apabila terjadi kebakaran dapat cepat dievakuasi
 - c. Memberikan identitas pada benda (*identify property*).
 - Setiap barang diinventarisir dan didata dengan baik
 - Termasuk barang bukti juga harus diberi label
 - d. Mengganggu pasar (*disrupt markets*)
 Dengan memberikan peringatan-peringatan setidaknya kita mengantisipasi agar tidak tersedianya orang yang hendak menerima atau membeli barang bukti yang berasal dari Polda Metro Jaya
 - e. Mencegah keuntungan yang akan diperoleh pelaku (*deny benefits*)
 Dengan memberikan identitas di barang-barang atau aset Polda Metro Jaya yang susah dihilangkan ini dapat menyebabkan tidak adanya orang yang mau membeli hasil curian sehingga mencegah keuntungan yang diinginkan pelaku
4. Mengurangi provokasi (*reduce provocation*) yang langkah-langkahnya meliputi :
 - a. Mengurangi frustrasi dan stress (*reduce frustrations dan stress*)
 - Mengurangi rasa stress pada anggota dengan memberikan penyegaran-penyegaran pada waktu penempatan personil
 - Memberikan reward pada anggota yang berprestasi

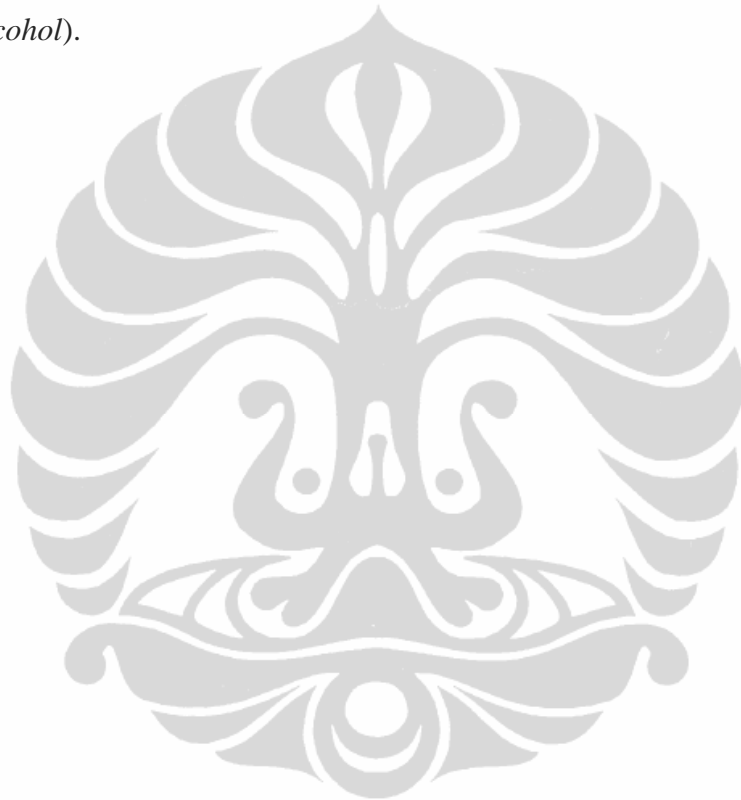
- b. Mencegah munculnya pertengkaran (*avoid disputes*)
Meningkatkan rasa solidaritas dan esprit the corps dengan pertemuan pertemuan dan sarana silaturahmi lainnya.
- c. Mengurangi rangsangan emosional (*reduce emotional arousal*)
Mengurangi rangsangan emosional diantara personel dengan memberikan siraman rohani dengan cara pembinaan mental personil Biro SDM
- d. Menetralsisir tekanan rekan (*neutralize peer pressure*)
Dengan mengurangi perbedaan perlakuan pimpinan terhadap personel dapat mencegah tekanan yang dihadapi oleh anggota lainnya, tidak dapat kita sangkal kesenjangan sosial yang ada dapat menjadi penyebab timbulnya tekanan kepada rekan sesama anggota di tempatnya bertugas.
- e. Mencegah imitasi (*discourage imitation*)
- Pengawasan terhadap penggunaan id card
 - Pengecekan rutin kartu anggota/KTP/surat tertentu
5. Menghilangkan alasan (*remove excuses*) yang langkah-langkahnya meliputi :
- a. Membuat aturan (*set rules*)
Dengan aturan yang dibuat oleh pimpinan Polda dalam penerapan manajemen pengamanan yang mengimplementasikan Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 dirasakan cukup sebagai sarana menyelenggarakan manajemen pengamanan di Polda Metro Jaya
- b. Menempatkan rambu larangan maupun perintah (*post instruction*)
Sudah adanya penempatan rambu-rambu dalam area Polda Metro jaya sehingga memudahkan orang dalam melakukan pencarian ruangan atau mencari jalan menuju bangunan yang hendak dituju
- c. Meningkatkan kewaspadaan (*alert conscience*)

Sejak terjadinya bom bunuh diri di masjid Polres Cirebon beberapa waktu yang lalu dapat dirasakan juga di Polda Metro Jaya karena setelah kejadian itu Ka Yanma membatasi akses penggunaan jalan masuk dari Kawasan SCBD menuju masjid Al-Kautsar Polda Metro Jaya

- d. Meningkatkan kesadaran orang untuk patuh (*assist compliance*)

Sudah jelas terlihat hanya belum terlaksana secara optimal

- e. Mengendalikan peredaran narkoba dan alkohol (*controlling drugs and alcohol*).



BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan manajemen pengamanan yang diterapkan oleh Pelayanan Markas (YANMA) Polda Metro Jaya di Kepolisian Daerah Metro Jaya belum berjalan dengan optimal dalam upaya menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian di Polda Metro Jaya, hal ini karena masih ditemukan kerawanan terhadap ancaman keamanan dan ketertiban di Polda Metro Jaya seperti terjadinya kasus pencurian kendaraan, penipuan terhadap pelayanan kepolisian seperti pada Kantor Samsat di dalam area Polda Metro Jaya, dan unjuk rasa.

Manajemen pengamanan yang dilaksanakan Yanma Polda Metro Jaya masih terdapat kelemahan yang menjadi kendala dalam upaya mengoptimalkan sistem pengamanan yang diterapkan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian di Polda Metro Jaya, kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala tersebut adalah :

Bidang manajemen sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 104 (2) Tugas Yanma antara lain adalah pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dukungan komunikasi dan elektronika markas dan urusan dalam lingkungan Polda termasuk perparkiran, sehingga untuk tanggung jawab pengamanan Polda Metro Jaya sepenuhnya diserahkan kepada Yanma, namun beberapa peran dan tugas yang merupakan kewenangan Pelayanan Markas (YANMA) diambil alih oleh satuan lain seperti Elektronika markas yang peran tanggung jawabnya diambil oleh Bidang Informasi dan Telekomunikasi, Pengaturan Angkutan dan Kendaraan yang peran tanggung jawabnya diambil oleh Biro Sarpras, kemudian Perparkiran yang peran tanggung jawabnya diambil

alih oleh Koperasi Polda Metro Jaya (Primkopol) karena berkaitan dengan pendapatan uang jasa parkir.

Bidang Sumber daya manusianya, sistem pengamanan yang menggunakan sistem hibrid yaitu penggabungan antara *inhouse* dan *outsourcing* (Tenaga kontrak), pada tenaga pengamanan *inhouse* yaitu adanya *label* atau *stigma* yang memberikan cap jelek kepada personel Yanma yang dianggap sebagai tempat buangan bagi personel Polri yang terkena masalah dalam tugasnya, sehingga personel Yanma sering tidak semangat dalam tugas dan bagi mereka yang sedang terkena masalah atau kasus harus membagi pikiran mereka antara tugas di Yanma dan penyelesaian kasus kedinasannya. Personel pengamanan dari tenaga kontrak (*Outsourcing*) pengelolaannya di bawah kendali Direktorat Lalu lintas dan bukan dikendalikan oleh Yanma sehingga Yanma kesulitan dalam pengaturannya karena harus melalui Ditlantas Polda Metro Jaya.

Kelemahan dari sarana dan prasarana keamanan yaitu CCTV yang ada tidak semuanya dapat berfungsi dengan baik, Pagar pengamanan langsung berhubungan dengan jalan maupun gedung instansi lain yang seharusnya terdapat penghalang fisik (*Berier*) pemisah antara pagar dengan daerah luar yang berfungsi untuk mencegah akses masuk tanpa ijin, Kurangnya sarana alat kendaraan patroli seperti sepeda motor dan dukungan BBM (bahan bakar minyak) sehingga beberapa personel pengamanan menggunakan kendaraan pribadinya untuk patroli, personel pengamanan juga tidak dilengkapi dengan kelengkapan perorangan seperti tongkat dan borgol.

Kelemahan dari sisi aturan yaitu dalam pelaksanaan pengamanan yang di lakukan oleh Pelayanan Markas (YANMA) di Polda Metro Jaya belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap pelaksanaan tugas pengamanan secara terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Diakhir tulisan ini, peneliti mengajukan beberapa alternatif solusi. Sifat alternatif solusi didasarkan dari perspektif CPTED dan *Situational Crime Prevention*. Ada beberapa yang sifatnya inovasi perbaikan dalam bentuk saran atau rekomendasi.

5.2 SARAN

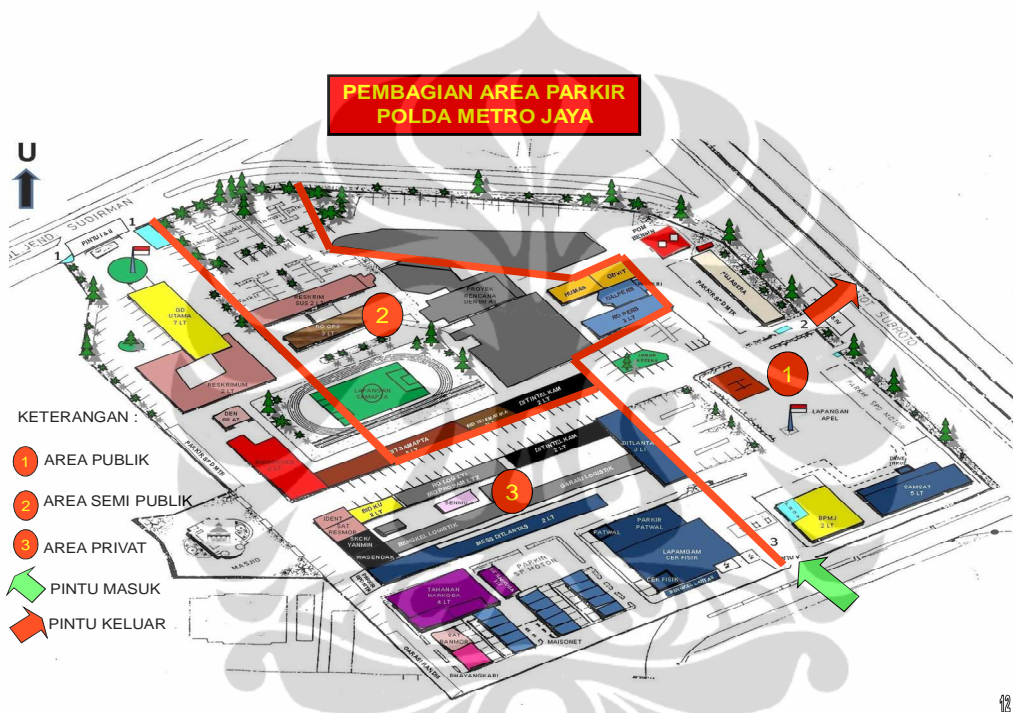
1. Konsep manajemen pengamanan yang selama ini dipergunakan oleh Polda Metro Jaya yang terkesan bersifat parsial, perlu dilakukan revitalisasi manajemen pengamanan yang bersifat integralistik, sehingga tanggung jawab pengamanan Polda Metro Jaya bukanlah semata-mata tanggung jawab Yanma, namun merupakan tanggung jawab seluruh personel Polda Metro Jaya di bawah kendali Pelayanan Markas (Yanma)
2. Perkembangan tingkat keseriusan kejahatan di masyarakat perlu juga diperhatikan aspek perspektif pelaku dan korban. Metode manajemen keamanan yang selama ini digunakan terkesan berorientasi pada kebutuhan organisasi perlu dilakukan penataan. Penting juga untuk mempertimbangkan aspek perspektif pelaku dan korban. Oleh karena itu tidak cukup jika kita hanya menggunakan konsep CPTED dan *Situational Crime Prevention* saja. Polda Metro Jaya juga perlu mempertimbangkan pendekatan lain misalnya pendekatan *routine activity*. Pendekatan ini berorientasi pada perspektif pelaku (termasuk juga korban), sehingga diperlukan pola pengamanan yang menghilangkan kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatannya.
3. Memperbaiki sistem Hibrid pada pola pengamanan yaitu dengan menjadikan satu komando antara tenaga *inhouse* dan tenaga kontrak (*outsourcing*) sehingga memudahkan pengaturan pelaksanaan tugas pengamanannya. Menjadikan Yanma merupakan bukan tempat buangan bagi personel yang terkena masalah atau kasus dan memberikan kesempatan pengembangan karier kepada personel Yanma sehingga menimbulkan semangat kerja.

4. Polda Metro Jaya harus memperbaiki sarana prasarana pengamanannya seperti membuat penghalang fisik (*Berier*), memperbaiki kamera CCTV dan ruang kontrolnya, dan melengkapi kendaraan patroli seperti mobil dan sepeda yang dilengkapi dengan kebutuhan BBMnya.
5. Perparkiran di kawasan Polda Metro Jaya pengelolaannya lebih baik diserahkan kepada pihak profesional Perusahaan Operator Parkir seperti *Secure Parking* dan untuk personel Polda Metro Jaya dibuatkan *ID Card Magnetic* yang fungsinya selain tanda pengenalan juga berfungsi sebagai kartu pass parkir sehingga setiap kendaraan yang masuk kawasan Polda Metro Jaya tanpa terkecuali harus teridentifikasi pada pintu masuk dan keluar sebagai sarana pengawasan dan pengendalian. Sebagai catatan untuk menghilangkan kesan konsumtif dimata masyarakat maka untuk masyarakat yang datang membutuhkan pelayanan polisi, membuat laporan dan yang dipanggil untuk penyidikan maka dibebaskan dari biaya parkir dengan cara menstempel karcis parkir di Sentra Pelayanan Kepolisian, piket Samsat ataupun piket Penjagaan di masing-masing direktorat.

Dan untuk pengaturan parkir Kendaraan bermotor baik untuk masyarakat ataupun personel Polda Metro Jaya maka kami menyarankan perlunya ada pembagian area perparkiran di Markas Polda Metro Jaya menjadi :

- a. Area publik yang diperuntukkan untuk masyarakat yang akan berkunjung ke Polda Metro Jaya (daerah ini adalah daerah umum yang dapat dimasuki oleh semua orang), termasuk masyarakat yang melapor , mengurus surat kendaraan bermotor, mengunjungi tahanan, dan lain-lain.
- b. Area semi publik yang diperuntukkan untuk masyarakat yang dipanggil untuk kepentingan dinas (penyidikan) , para tamu pejabat Polda Metro Jaya dan juga anggota Polri yang bukan personel Polda Metro Jaya.

- c. Area Privat (terbatas) , yang diperuntukkan khusus untuk Pejabat Polda Metro Jaya dan Personel Polda Metro Jaya. Khusus untuk daerah terbatas ini harus dibuatkan pintu masuk yang dijaga oleh petugas Provost Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya.



Gambar 5.1 : Lay out pembagian Area parkir kendaraan di Polda Metro Jaya
Sumber : Data sekunder Yanma Polda Metro Jaya Tahun 2011

- 6 Membuat aturan yang dapat dipedomani oleh seluruh personel pengamanan secara terintegrasi, seperti pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengamanan Markas termasuk pengaturan lalu lintas didalam area polda Metro Jaya yang disahkan oleh Kapolda sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BUKU

- Astor, Should D. 1978. *Loss Prevention: Control and Concepts*, United States of America: Butterworth Publishers.
- Barefoot, J. K., dan Maxwell, D. A. (1987). *Corporate Security Administration and Management*, United States of America: Butterworth Publishers.
- Burhan, Wirman. 1993. *Security Guide Book, Pembinaan Satpam Di Indonesia*. Jakarta : Mabes Polri.
- Clarke, Ronald V. 1997. *Situational Crime Prevention : Successful Case Studies (Second Edition)*. New York : Harrow and Heston.
- Creswell, John W. 2002. *Research Design Qualitative and Quantitatif Approaches (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)* dalam Aris Budiman, Chrysnanda DL, dan Bambang hastobroto (ed). Jakarta: KIK Press.
- Darmawan, Muhamad Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Djamin, Awaloedin. 2008. *Polri dan Perkembangan Industrial Security di Indonesia*. Jakarta. (Makalah tidak terbit)
- Djamin, Awaloedin , Siswanto B. 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Kontribusi Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)*, Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri
- Edward A. Thibault, Lawrence M. Lynch dan R. Bruce Mc Bride, 2001. *Proactive Police Management*. Jakarta : Cipta Manunggal
- Green, Gion & Fischer, Robert J. 1998. *Introduction Security*. Sixth edition. USA : Butterworth Heinemann.
- Hadiman , 2010, Materi Mata Kuliah manajemen Sekuriti Fisik , S2 KIK UI Angkatan XIV , Jakarta

- Marjoko, 2006. Tesis Mahasiswa KIK, *Manajemen Sekuriti Fisik di PT Gudang Garam Tbk Kediri*, Jakarta
- McCrie, R. D. 2001. *Security Operation Management*, Boston: Butterworth-Heinemann.
- Moelong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oliver, Eric dan John Wilson. 1999. *Sekuriti Manual Pedoman Tindakan Pengamanan*. Jakarta : PT. Cipta Manunggal.
- Robbin , Stephen P, 1996, *Perilaku Organisasi*, jilid 1, penyunting triana Iskandarsyah; prehalindo, Jakarta.
- Siagian, Sondang. 2000, *Sistem Informasi Manajemen* , Jakarta : PT. bumi Aksara.
- . 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 1 Cetakan 10, Jakarta : Bumi Aksara.
- Strauss, S. 1980. *Security Problem in a Modern Society*, Boston: Butterworth Publishers, Inc.
- Stoner, James A.F,dkk. 1986. *Managemen*, Jakarta : CV. Intermedia
- Suparlan, P. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika PPs UI.
- Terry. R, George. 1997. *Asas-asas Manajemen*, terjemahan dari *Prinsiple of Management*, oleh Winardi, Bandung : Alumni.
- Thibault, E.A.,Lynch, L.M.,& McBride, R.B. 2001. *Proactive police management* , Edisi ke 5 Upper Saddle River, : Prentice Hall.
- Trisaksono, 2010. Tesis Mahasiswa KIK, *Manajemen Pengamanan Kawasan Wisata Taman Impian Jaya Ancol pada Badan Usaha Jasa Pengamanan*, Jakarta

Yudhantara, Yuyun, 2004. Tesis Mahasiswa KIK, *Manajemen Keamanan di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat*, Jakarta.

Weisburd ,David,1996, “*Reorienting Crime Prevention Research and policy : From the Causes of Criminality to The Contact of Crime , Building A Safer Society*” ; The Annual Conference on Criminal Justice Research and Evaluation.

Zamani, 1998. *Manajemen*. Jakarta : Badan penerbit IPWI.

DOKUMEN PERATURAN DAN PERUNDANGAN UNDANGAN

Petunjuk Lapangan Kapolda Metro Jaya No. Pol : Juklak / 03 / II / 1999 tanggal 26 Februari 1999 tentang *penanggulangan serangan fisik terhadap Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya*

Petunjuk Lapangan Kapolda Metro Jaya No. Pol : Juklak / 01 / I / 2003 tanggal 26 Januari 2003 tentang *Sistem Pengamanan Markas Polda Metro Jaya dari gangguan Kamtibus dalam Markas*

Keputusan Kapolri No 738 Tahun 2005 *tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional.*

Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010 *tentang struktur organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah.*

Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 *tentang Sistim Manajemen Pengamanan organisasi, perusahaan dan / atau instansi / lembaga pemerintah.*

Undang Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

ARTIKEL

Detik News, 2011. Paket *Bom di BNN ditujukan untuk Kalakhar BNN Gories Mere*, Diakses pada tanggal 15 Maret 2011 di : <http://www.detiknews.com>

....., 2011, *Izin kencing, Tahanan Narkoba kabur saat diperiksa*, Diakses pada tanggal 5 Januari 2011 di : <http://www.detiknews.com>

Tempo Interaktif, 2011. *Kronologis paket Bom di Utan Kayu*, Diakses pada tanggal 15 Maret 2011 di : <http://www.tempointeraktif.com>

Berita News, 2011. *Badan Narkotika Nasional juga diteror Bom Buku*, Diakses pada tanggal 15 Maret 2011 di : <http://www.beritanews.com>

Tribun News, 2011. *Kronologis Bom bunuh diri di Mesjid Polres Cirebon*, Diakses pada tanggal 15 April 2011 di : <http://www.tribunnews.com>

Kompas, 2009. *Edan perempuan nekat bakar mobil dinas di Mabes*, Diakses pada tanggal 28 Desember 2009 di : <http://www.kompasnews.com>



LAMPIRAN FOTO FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Gambar 1 : Kantor Pelayanan Markas (Yanma) Polda Metro Jaya
Sumber : Data sekunder Polda Metro Jaya



Gambar 2 : Wawancara peneliti dengan Ka Yanma Akbp Agus Sudrajat
Sumber : Data primer Polda Metro Jaya



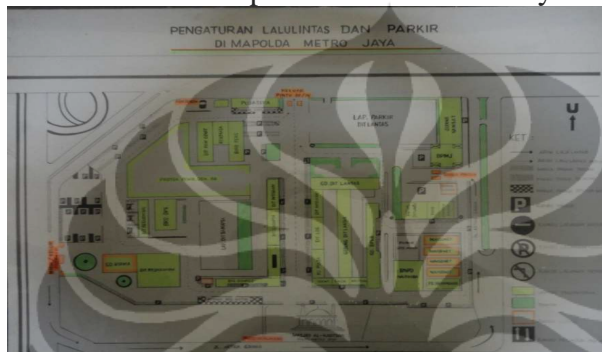
Gambar 3 : Gerbang Utama VIP Polda Metro Jaya
Sumber : Data primer Polda Metro Jaya



Gambar 4 : Gerbang belakang, akses masuk utama PMJ
Sumber : Data Primer Polda Metro Jaya



Gambar 5 : Pemeriksaan masuk pada gerbang 5 PMJ
Sumber : Data primer Polda Metro Jaya



Gambar 6 : Denah perparkiran PMJ
Sumber : Data primer Polda Metro Jaya



Gambar 7 : Pos penjagaan gerbang utama PMJ
Sumber : Data primer Polda Metro Jaya



Gambar 8 : penempatan kamera CCTV
Sumber : Data [rimet Polda Metro Jaya

- | | | |
|--|---|--------------|
| 11. PENYIDIK UNIT IV SAT II / HARDA BANGTAH DIT KRIMUM PMJ | : | : 01/12/2006 |
| 12. PENYIDIK UNIT II SAT VI/RESMOB DIT KRIMUM PMJ | : | : 2007 |
| 13. KAUR LITPERS SUBBID PAMINAL BID PROPAM PMJ | : | : 26/01/2007 |
| 14. KASAT RESKRIM POLRES METRO KPPP TANJUNG PRIOK | : | : 16/07/2007 |
| 15. KANIT IVC SAT III/UM DIT RESKRIM UM POLDA METRO JAYA | : | : 17/12/2009 |
| 16. KAUR PRODOK SUBBID PAMINAL BID PROPAM PMJ | : | : 25/05/2011 |

V PENUGASAN LUAR NEGERI

1. ILEA COMPLEX FINANCIAL SESSION 9 BANGKOK, THAILAND 24 APRIL – 4 MEI 2007
2. WORK SHOP INTERPOL : SOCCER GEMBLING DI SINGAPURA APRIL 2008
3. SIMPOSIUM TTG BARANG PENCURIAN DAN PERDAGANGAN GELAP BARANG SENI BUDAYA, BARANG2 ANTIK DI LYON PERANCIS 24-26 JUN 08
4. UNDANGAN PEMERINTAH CHINA DALAM IMPEMENTASI ISPS CODE DI HONGKONG DES 2009
5. ILEA COMPLEX FINANCIAL SESSION 9 BANGKOK, THAILAND 7 JUNI – 18 JUNI 2010

VIII PENGHARGAAN

1. PENGHARGAAN KHUSUS GUBERNUR PTIK LULUSAN TERBAIK URUTAN KE - 2 BIDANG AKADEMIK, KONSEPTUAL DAN INTEGRITAS INTELEKTUAL
2. PENGHARGAAN MENPORA BPK DR. H. ADHIYAKSA DAULT , SH. Msi UNGKAP KASUS PERAMPOKAN DAN PENEMBAKAN STAF AHLI MENPORA TANGGAL 2 APRIL 2007
3. PENGHARGAAN KAPOLDA METRO JAYA TTG 29 DESEMBER 2007 ATAS PRESTASINYA SAAT MENJABAT KPPP BERHASIL MENGUNGKAP JARINGAN NARKOBA ASAL MALAYASIA.
4. PENGHARGAAN KAPOLDA METRO JAYA TTG 18 JANUARI 2010 BERHASIL MENGUNGKAP KASUS MUTILASI
5. PENGHARGAAN KEMENTRIAN SOSIAL RI TANGGAL 26 JANUARI 2010 ATAS KINERJA DALAM PERLINDUNGAN ANAK.

VI ALAMAT

JL. CEMPAKA PUTIH TIMUR II NO. 17 JAKARTA PUSAT
HP 0816751999/ 021-8400554/ 021-42875076

Jakarta, Juli 2011
YANGMEMBUAT

MOHAMMAD IQBAL, SIK

KOMPOL POLISI NRP 77071248

Universitas Indonesia